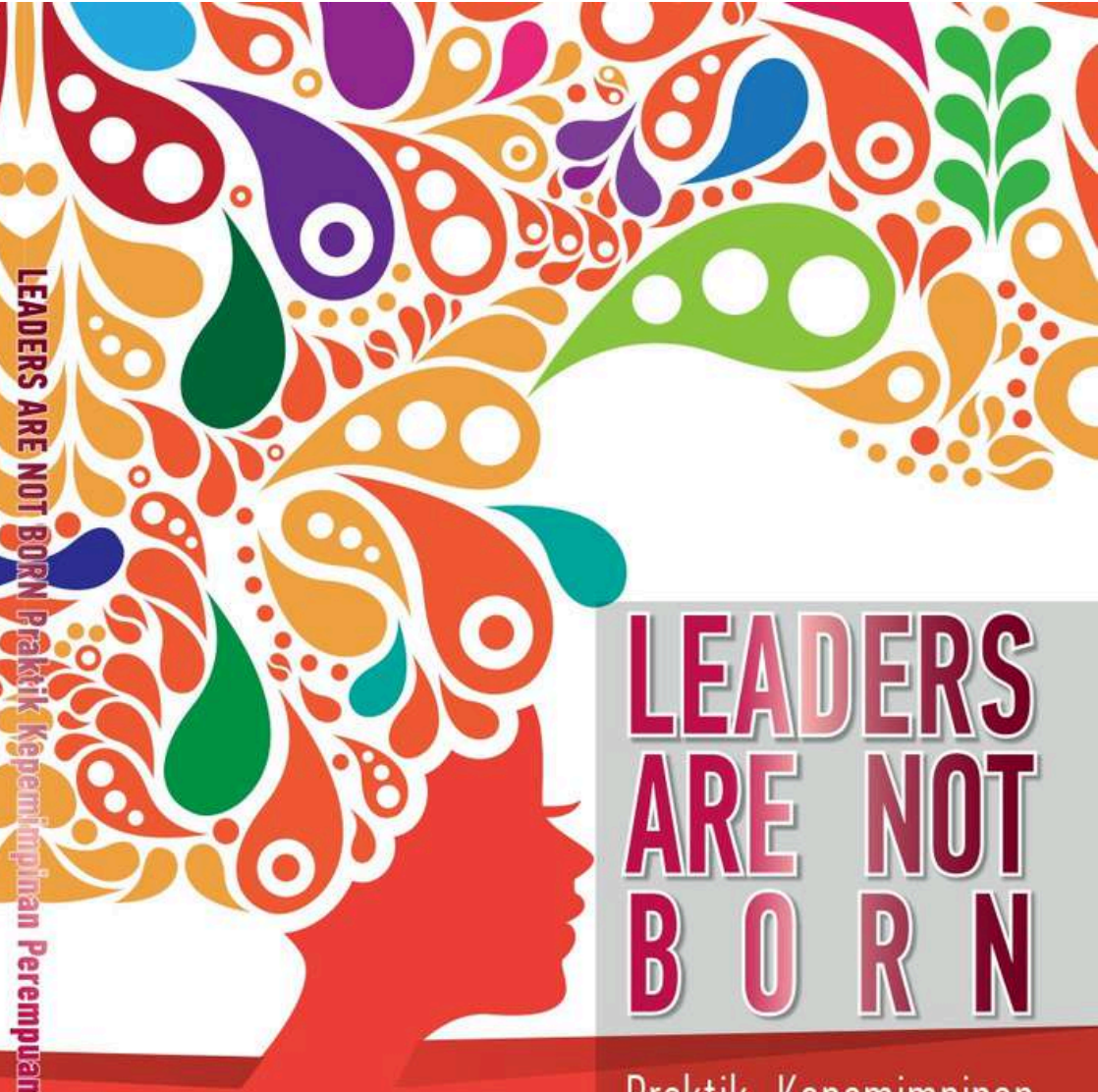




LEADERS ARE NOT BORN Praktik Kepemimpinan Perempuan di Komunitas

LEADERS ARE NOT B O R N

Praktik Kepemimpinan
Perempuan di Komunitas

kalyanamitra
Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan
Women's Communication and Information Centre



**Australian
Aid** 

LEADERS ARE NOT BORN

Praktik Kepemimpinan Perempuan di Komunitas

**Jakarta, Indonesia
Juni, 2015**

LEADERS ARE NOT BORN

Praktik Kepemimpinan Perempuan di Komunitas

Penanggungjawab Program:

Listyowati

Tim Penulis:

Hegel Terome, Ika Agustina, Listyowati,
Rena Herdiyani, Puansari Siregar, Fr. Yohana TW

Penyunting:

Hegel Terome

Penerbit:

Yayasan Kalyanamitra

Jl. SMA 14 No.7 RT 009/09, Cawang, Jakarta Timur 13630

Tel 62-21-8004712; Fax 62-21-8004713

E-mail: ykm@indo.net.id

Website: www.kalyanamitra.or.id

Edisi Pertama: Juni 2016

Desain Cover dan Tata letak:

Tumbuhdihati

Dokumen ini didukung oleh Oxfam di Indonesia dan Pemerintah Australia. Pandangan yang dikemukakan di dalamnya bukan pendapat resmi dari Oxfam di Indonesia dan Pemerintah Australia.

Copyrights@2016 by Kalyanamitra. All rights reserved.
This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form without written permission from the publishers.

KATA PENGANTAR

Pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya membawa perubahan yang signifikan terhadap tatanan kehidupan yang lebih setara dan adil antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Pembangunan dengan segala dimensinya bisa meminggirkan dan mendiskriminasi kaum perempuan terlibat mengisi arena kekuasaan publik, mengakses kesempatan, dan mengelola sumberdaya secara bertanggungjawab. Perempuan mengalami ketimpangan gender mulai dari perencanaan, penerapan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, kendali dan kritik atas pembangunan.

Oleh sebab itu, keberadaan perempuan di posisi-posisi strategis sebagai pembuat kebijakan dan penentu keputusan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masih perlu ditingkatkan jumlahnya. Sebagai contoh, jumlah pemilih perempuan dalam setiap Pemilu di Indonesia cukuplah besar, ironisnya kebutuhan praktis dan kepentingan strategis mereka acapkali tidak menjadi prioritas dalam pembangunan.

Pertanyaannya, apakah ketika perempuan berada di posisi-posisi strategis sebagai pembuat kebijakan dan penentu keputusan, menjamin terpenuhinya hak-hak asasi perempuan di Indonesia? Masalah ini tak mudah untuk dijawab, karena sulit menemukan benang merah kausalitas antara perempuan pemimpin dan jaminan pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Lagi pula, pemenuhan hak-hak asasi perempuan dipengaruhi pula oleh banyak faktor. Memang wacana ini bisa mengundang diskusi yang panjang. Namun, bila pertanyaannya akan ditanggapi dari perspektif perjuangan perempuan, maka kerangka acuannya bisa ditarik pada kerja-kerja kepemimpinan perempuan di arenanya masing-masing. Bagaimanakah perempuan pemimpin mampu membawa perubahan sosial yang lebih baik bagi perempuan khususnya, dan bagi masyarakat pada umum?

Dalam pendokumentasian yang dilakukan Kalyanamitra sebelumnya, tentang “Strategi Pemenangan Perempuan dalam

Pemilu 2014” terungkap informasi bahwa tak semua perempuan yang mencalonkan diri, bahkan yang menjadi anggota DPR RI/ DPRD dengan sadar memahami kebutuhan praktis dan kepentingan strategis kaum perempuan. Pada saat yang bersamaan, mereka harus berbicara atas nama kepentingan partai politiknya, padahal belum tentu kepentingan partai politiknya berbanding lurus dengan kepentingan kaum perempuan. Barang tentu, ini menjadi tantangan besar tersendiri bagi mereka yang duduk di parlemen untuk menentukan prioritas program dan aksi perjuangannya, apakah kepentingan perempuan ataukah kepentingan partainya?

Dokumentasi ini sekurang-kurangnya bertujuan merekam dan mengkompilasi berbagai pengalaman perempuan pemimpin di arena kiprah mereka masing-masing. Keragaman latar belakang bidang kerja, pengalaman politik, faktor eksternal yang mereka hadapi, setidaknya dapat memberikan kepada kita ilham dan pembelajaran yang menarik bagaimana mereka mencoba mengatasi dan mencari solusi-solusi atas persoalan-persoalan dalam kepemimpinannya serta mampu bertahan di tengah gempuran arus tuntutan masyarakat yang makin dinamis sekarang. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi sidang pembaca pada umumnya, untuk kalangan perempuan pada khususnya. Selamat membaca!

Jakarta, 30.06.2016

Yayasan Kalyanamitra

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Aleg	: Anggota legislatif
ASI	: Air Susu Ibu
Balita	: Bayi dibawah lima tahun
Bangdes	: Pengembangan desa
Bawaslu	: Badan Pengawasan Pemilu
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Balon	: Bakal Calon
Bapilu	: Badan Pemenangan Pemilu
Badan PP	: Badan Pemberdayaan Perempuan
BANGGAR	: Badan Anggaran (DPR RI/DPRD)
BAPEMAS KB	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana
Bapemas	
PP&KB	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BAPEMAS	: Badan Pemberdaya Masyarakat
Bappeda	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAPPEKO	: Badan Perencanaan Pembangunan Kota
BP	: Bimbingan Penyuluhan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Caleg	: Calon anggota legislatif
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
Dapil	: Daerah pemilihan
Dirjen	: Direktur jenderal
DCT	: Daftar Calon Tetap
DCS	: Daftar Calon Sementara
DPS	: Daftar Pemilih Sementara

DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
DPN	: Dewan Pimpinan Nasional
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
Dinas PP	: Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dinkes	: Dinas Kesehatan
DINSOS	: Dinas Sosial
Dispenduk capil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pengurus Pusat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Garnita	: Garda Wanita
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
Hp	: <i>Handphone</i>
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HKTI	: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
IAIN	: Institute Agama Islam Negeri
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
Jamsostek	: Jaminan sosial tenaga kerja
KAHMI	: Kesatuan Aksi Himpunan Mahasiswa Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
KAPPU	: Komite Aksi Pemenangan Pemilu
Kohati	: Korps HMI wati
Komnas	
Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Kordapil	: Koordinator daerah pemilihan
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Kasi Bidang PP:	Kepala Divisi Bidang Pemberdayaan Perempuan
KB	: Keluarga Berencana
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kemensos	: Kementerian Sosial
KK	: Kartu Keluarga
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KLB	: Kongres Luar Biasa
KMR	: Komite Manajemen Resiko
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPI	: Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia
KPPI	: Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Lansia	: Lanjut usia
LDI	: Lembaga Dakwah Islam
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
Mapala	: Mahasiswa pecinta alam
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
Ormas	: Organisasi masyarakat
ODHA	: Orang dengan HIV/AIDS
Orba	: Orde Baru
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Panwaslu	: Panitia pengawas pemilu
Parpol	: Partai politik
Pemilu	: Pemilihan umum

Pilkada	: Pemilihan kepala daerah
Pileg	: Pemilihan legislatif
Pilpres	: Pemilihan presiden
Pramuka	: Prajamuda Karana
Posko	: Pos koordinasi
Pos WK	: Pos Wanita Keadilan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PB	: Pengurus Besar
PD	: Partai Demokrat
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PAC	: Pengurus Anak Cabang
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkot	: Pemerintah Kota
Perda	: Peraturan Daerah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sosial
PLT	: Pelaksana Tugas
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
PROMEG	: Pro Megawati Soekarno Putri
PRT	: Pekerja Rumah Tangga
Raskin	: Beras Miskin
REPDEM	: Relawan Perjuangan Demokrasi
RPJMdes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga

Santika	: Barisan putri keadilan
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
Sekjen	: Sekretaris jenderal
SK	: Surat Keputusan
SMS	: <i>Short Mesage Services</i>
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
Timses	: Tim sukses
Tupoksi	: Tugas pokok dan fungsi
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TK	: Taman Kanak-kanak
UU	: Undang-Undang
UNAIR	: Universitas Airlangga
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup
WPP	: Wanita Persatuan Pembangunan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	v
BAGIAN SATU	
Pendahuluan	1
Pengantar	2
Makna Pemimpin dan Kepemimpinan	4
Gaya Kepemimpinan	10
Kepemimpinan Perempuan dan Demokrasi	12
Kepemimpinan Perempuan di Indonesia	20
Praktik Kepemimpinan Perempuan di Indonesia	24
BAGIAN DUA	
Profil Pemimpin dan Praktik Kepemimpinan	33
BAGIAN KETIGA	
Pembelajaran	179

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

Actum est de re Republica
(it's all over with the republic or commonwealth
Segalanya demi republik atau kemakmuran bersama)

“Leadership is a challenge and an opportunity facing leaders and followers in their professional and personal lives.”¹

1. Pengantar

Apabila kita cermati baik-baik pembangunan² di Indonesia, maka tak sepenuhnya hal itu membawa perubahan yang berarti bagi terbentuknya tatanan kehidupan yang lebih setara dan adil antara kaum perempuan dan laki-laki. Pembangunan dengan segala dampak negatifnya telah meminggirkan dan mendiskriminasi kalangan perempuan untuk terlibat mengisi arena kesempatan, mengakses, dan mengelola sumberdaya secara bertanggungjawab. Mereka mengalami ketimpangan dari sisi perencanaan, penerapan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, kontrol dan kritik atas pembangunan. Karena itu, keberadaan perempuan di posisi-posisi strategis penentu kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu ditingkatkan kuantitasnya. Contoh yang ironis misalnya jumlah pemilih perempuan dalam setiap Pemilu di Indonesia cukup besar, namun kebutuhan praktis dan strategis acapkali bukan menjadi prioritas dalam pembangunan.

Pertanyaan kritisnya ialah, apakah ketika perempuan berada di posisi strategis sebagai penentu kebijakan-kebijakan ataupun keputusan, menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan di Indonesia? Masalah ini tak mudah untuk dijawab, karena sulit menemukan benang merah kausalitas antara perempuan pemimpin dan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Lagi pula, pemenuhan hak-hak perempuan dapat saja dilakukan oleh pemimpin mana saja, tanpa terpaku kepada perbedaan jenis kelaminnya. Jika pertanyaannya akan ditanggapi secara khas dari perspektif perjuangan perempuan, maka acuannya bisa ditautkan

¹ George R. Goethals, Georgia J. Sorenson, and James MacGregor Burns (eds.), *Encyclopedia of Leadership*, vol.1, USA: Sage Publication, Inc., 2004, hal. xxxiii.

² Lihat Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, hal. 109-186.

kepada bagaimana praktik kepemimpinan perempuan di arena masing-masing? Bagaimanakah perempuan pemimpin mampu membawa perubahan sosial yang lebih baik bagi perempuan lain khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya?

Dalam pendokumentasian yang dilakukan Kalyanamitra sebelumnya, yaitu tentang “Strategi Pemenangan Perempuan dalam Pemilu 2014” memperlihatkan bahwa tidak semua perempuan yang menjadi anggota DPRRI ataupun DPRD mengerti kebutuhan praktis dan kepentingan strategis³ kaumnya. Pada saat yang sama, mereka harus berbicara dan bertindak atas nama partai politik, padahal budaya patriarkhal di partai-partai politik masih dominan. Hal itu menjadi tantangan besar bagi perempuan yang duduk di parlemen untuk menempatkan prioritas perjuangannya, apakah mendahulukan kepentingan perempuan ataukah kepentingan partainya?

Manusia adalah khalifah yang menerima mandat Tuhan di muka bumi (*homo mundi*) untuk membangun dan melestarikan tatanan kehidupan semesta dan budaya masyarakat yang semakin maju. Adil, setara, saling menghargai, menciptakan perdamaian, menghormati hak-hak asasi manusia, gotong royong, toleransi, dan lainnya, semua itu menjadi tanggungjawab sosial kita yang harus diwujudkan.

Kita mungkin pernah mendengarkan ungkapan “*Leaders are made rather than born*” yang menerangkan bahwa pemimpin atau kepemimpinan bukanlah kodrati (*given*), melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan terus-menerus. Proses belajar itu mulai dari yang paling empiris berupa pengalaman sehari-hari kemudian mereplikasi apa-apa yang baik dan bermanfaat untuk publik.

Bagi kita penting untuk melihat fakta-fakta kepemimpinan yang diselenggarakan kalangan perempuan di Indonesia dalam

³ Kebutuhan praktis mencakup keperluan sehari-hari, misalnya sandang, papan, pangan, pendidikan, dsb. Kepentingan strategis meliputi hak-hak asasi, kebebasan, otonomi, seksualitas, kesetaraan, dan keadilan.

kerangka perbaikan kehidupan sosial di bidang-bidang yang mereka pimpin. Tentu hal itu dapat menjadi pembelajaran yang menarik bagi calon-calon perempuan pemimpin dalam rangka kemajuan perempuan.

2. Makna Pemimpin dan Kepemimpinan

Sebelum lebih jauh kita membicarakan praktik-praktik kepemimpinan perempuan, akan lebih baik dirumuskan terlebih dulu makna pemimpin dan kepemimpinan. Kita menyadari bahwa definisi bukan segala-galanya dalam menjelaskan sesuatu, tetapi tiada sesuatu tanpa definisi. Kita boleh sepakat dengan definisi yang ada ataupun tidak.

Keith Grint⁴ memperlihatkan hasil studinya, bahwa hingga Oktober 2003, sedikitnya ada 14.139 judul buku tentang 'kepemimpinan' (*leadership*) yang dijual di toko buku *online* 'Amazon.com'. Enam tahun kemudian, Oktober 2009, jumlah tersebut mencapai 53.121 judul buku. Semuanya, menurut Keith Grint, bukan kian mendekatkan kita kepada definisi yang 'benar' mengenai kepemimpinan tersebut. Namun, kebutuhan akan definisi mengenai kepemimpinan itu bukanlah sebatas 'permainan bahasa'. Kebutuhan ini tidak semata-mata untuk kita sepakati, tetapi untuk lebih bisa mengerti posisi pihak lain, sehingga argumentasinya dapat kita pahami. Setidaknya, terdapat empat bentuk (tipologi) makna pemimpin atau kepemimpinan secara umum, yakni: a) Kepemimpinan sebagai *posisi*; hal ini mengacu kepada di mana pemimpin beroperasi, b) Kepemimpinan sebagai *person*; hal ini menyangkut subyek pemimpin itu sendiri, c) Kepemimpinan sebagai *hasil*; hal ini menyangkut apa capaian yang diperoleh pemimpin, d) Kepemimpinan sebagai *proses*; hal ini menyangkut bagaimana pemimpin berproses melakukan sesuatu atau bekerja mencapai hasil-hasilnya. Dengan cara itu, jelas Keith Grint, sekurang-kurangnya membuat kita kurang-lebih paham tentang fenomena kepemimpinan yang rumit tersebut, oleh karena

⁴ Keith Grint, *Leadership: A Very Short Introduction*, hal. 17-18.

kepemimpinan maknanya berbeda-beda bagi tiap-tiap orang.

Kepemimpinan dilihat dari perspektif “posisi”⁵ tersangkut dengan ruang-waktu, misalnya suatu organisasi atau lembaga, baik formal maupun informal. Orang-orang yang berada di posisi tersebut dipandang pihak yang memiliki sumberdaya untuk memimpin atau mengarahkan yang lainnya dalam struktur tertentu, misalnya ‘atasan’ atau ‘bawahan’ yang bersifat hirarkhis vertikal. Dengan struktur tersebut, mereka dipandang memiliki kekuasaan, tugas, dan tanggungjawab tertentu. Mereka setidaknya harus dipatuhi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini terutama berlaku untuk para pemimpin yang formal. Dalam kepemimpinan yang formal, misalnya di dunia militer, tak boleh ada tindakan ‘insubordinasi’ oleh anak buah, karena akan membahayakan kekuasaan pemimpinnya. Semua perintah atasan harus dijawab ‘ya’ dan dilaksanakan. Tidak boleh ada kata ‘tidak’, apalagi pembangkangan. Inilah bentuk konsekuensi logis suatu posisi. Dari pendekatan yang horisontal (non hirarkhis vertikal), maka kepemimpinan jauh lebih bersifat cair, karena berbentuk jaringan-kerja.

Dari segi etimologis, *leadership* berasal dari bahasa Jerman Kuna, yaitu ‘*Lidan*’ yang artinya ‘pergi’; dalam bahasa Inggris Kuna, ‘*Lithan*’ yang artinya ‘bepergian’; dalam bahasa Norse, ‘*Leid*’ yang artinya ‘berjalan menuju laut’. Kepemimpinan Hitler yang anti-Semitis diungkapkan pengikut setianya sebagai bentuk legitimasi. Inilah bentuk kepemimpinan yang horisontal. Kepemimpinan yang hirarkhis vertikal memerlukan derajat otoritas dan legitimasi yang besar dibandingkan dengan kepemimpinan yang ‘heterarkhis horisontal’.

Kepemimpinan dilihat dari perspektif “person”⁶ terkait dengan diri pribadi si pemimpin. Secara tradisional, orang melihat bagaimana ciri pribadi atau karakter, perilaku, kompetensi, daya tarik ‘magnetis’ seorang pemimpin, dan kharismanya.

⁵ Keith Grint, *ibid.*, hal. 18-20.

⁶ Keith Grint, *ibid.*, hal. 21-22.

Kepemimpinan yang berdasarkan karakter pemimpin bisa keliru kita pahami, karena sifat-sifat 'residual' orang melekat di dalam dirinya. Nilai-nilai diri yang sesungguhnya bisa tereduksi seiring dengan berjalannya waktu. Kepemimpinan dalam konteks ini bersifat individual dan formal, namun dalam banyak pemahaman umum disadari, bahwa kepemimpinan bersifat kolektif dan informal (memiliki pengikut atau pihak yang dipimpin).

Kepemimpinan dari perspektif "hasil"⁷ terpaut dengan apa yang dicapai oleh si pemimpin. Sulit untuk dikatakan, bahwa seseorang sebagai pemimpin tidak menghasilkan sesuatu atau produk tertentu. Sifat kepemimpinan ini terlihat kehadirannya melalui efek tindakan-tindakan yang membuahkan sesuatu. Selain itu, kepemimpinan ini tidak selalu otoritarian atau bersifat tidak etis. Sebaliknya, pemimpin jenis ini bisa sangat praktis dan tidak kharismatis, tetapi efektif dalam menyelesaikan sesuatu. Kepemimpinan ini mampu menuntaskan persoalan-persoalan yang luar biasa tanpa harus memicu dorongan emosional para pengikutnya atau yang dipimpinnya. Kepemimpinan ini bisa di tataran yang kasat mata bersifat individual kharismatis ataupun yang tak kasat mata, berbentuk rekayasa sosial. Fokus kepemimpinan ini bukan metodenya, tetapi hasilnya.

Kepemimpinan pun dapat dilihat dari perspektif "proses"⁸ yang terkait dengan proses-proses perilaku yang dibedakan antara pemimpin dengan pengikutnya. Akan tetapi, proses-proses itu tidak berlaku universal di segala tempat dan waktu. Oleh karena, ada 'pengikut' yang memiliki perilaku seperti pemimpin, meskipun bukan seorang pemimpin. Secara umum, kebanyakan orang melihat bahwa kepemimpinan ini mendorong pengikutnya menyadari tanggungjawabnya, sehingga memperlihatkan tindakan-tindakan yang 'heroik'. Sebagai proses, kepemimpinan ini menunjukkan fenomena yang relasional, yaitu tindakan-tindakan praktis sehari-hari dalam membangun dan memperkuat modal sosial yang ada.

⁷ Keith Grint, *ibid.*, hal. 22-25.

⁸ Keith Grint, *ibid.*, hal. 25-27.

Kompetensi, keterampilan dan pengetahuan seorang pemimpin tidak selalu harus eksplisit dan formal, namun bisa bersifat implisit (*tacit skills and knowledge*).

Dengan penjelasan ringkas mengenai kepemimpinan tersebut, sekarang kita kembali lagi merumuskan pengertian 'pemimpin' (*leaders*). Bagaimanapun, pengertian pemimpin dan kepemimpinan tidak terpisahkan walaupun dapat dipilah-pilah. Jika demikian, apa pemimpin itu? Pemimpin⁹ ialah orang yang menginspirasi orang lain untuk mengikutinya dan mengarahkan mereka meraih tujuan-tujuan bersama. Pemimpin meletakkan visi masa depan dan membangun strategi menuju ke sana. Pemimpin memadukan beragam orang dan berbeda-beda menuju cita-cita yang telah ditentukan, mengkomunikasikan hal itu, dan membangun komitmen terhadapnya. Pemimpin mendorong orang lain menggapai visi itu berlandaskan kepentingan, nilai-nilai, dan perasaan bersama. Pemimpin mampu mengambil keputusan-keputusan yang tersulit, bahkan yang tidak populer sekalipun. Pemimpin harus melakukan 'hal-hal yang benar' (*doing the right thing*), sedangkan manajer melakukan 'sesuatu dengan benar' (*doing the things right*). Hal-hal yang benar ialah perbuatan-perbuatan yang secara moral (etik) benar. Landasan moral ini bagi suatu perbuatan sangat penting dalam mencermati dimensi perilaku pemimpin.

Bennis dan Nanus¹⁰ menjelaskan ada empat 'strategi' dalam melakukan hal-hal yang benar:

1. Memiliki visi yang jelas, arah mana yang hendak ditempuh, dan senantiasa fokus terhadapnya;
2. Mengkomunikasikan visi tersebut kepada mereka yang dipimpin, sehingga hal itu memiliki makna yang nyata untuk mereka secara pribadi;
3. Membangun kepercayaan yang nyata dalam kepemimpinan

⁹ David Pardey, *Introducing Leadership*, hal. 9-10.

¹⁰ David Pardey, *ibid.*, hal. 11-12.

secara konsisten melalui kerja-kerja yang dilakukan;

4. Memiliki keyakinan yang teguh di diri anda dan yang dapat anda kerjakan, sementara tidak mengabaikan kelemahan-kelemahan yang ada.

Pemimpin¹¹ kadang-kadang bertindak layaknya manajer yang melakukan sesuatu dengan prinsip-prinsip:

1. Perencanaan, sehingga sumberdaya yang dibutuhkan tersedia pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat;
2. Pengorganisasian sumberdaya yang tersedia, sehingga bekerja secara efektif dan efisien;
3. Mengelola orang lain berkinerja optimal dalam peran-perannya, sehingga mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain;
4. Mengkoordinasi sumberdaya yang tersedia, sehingga sesuai dengan rencana guna memperlihatkan kinerja sesuai dengan standar yang diharapkan;
5. Mengendalikan sumberdaya yang tersedia, sehingga produk maupun jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut David Pardey, terdapat dua kategori pemimpin, yaitu pemimpin yang 'transaksional' dan pemimpin yang 'transformatif'. Pemimpin yang transaksional ialah pemimpin yang mempertukarkan kepemimpinannya dengan kemakmuran ekonomi dan kekuasaan bagi pengikutnya agar mereka mau dipimpin (contohnya Hitler, Stalin). Kepemimpinan ini umumnya bisa dilihat dalam dunia bisnis.

Pemimpin yang transformatif ialah pemimpin yang mengajak, mendorong, memadukan orang-orang agar terlibat dalam perubahan yang dilaksanakan dengan saling percaya diri. Hubungan pemimpin dengan pengikutnya dalam kepemimpinan yang transformatif didasari kualitas nilai-nilai dan tujuan-tujuan

¹¹ David Pardey, *ibid.*, hal. 12.

bersama.¹² Dipastikan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ataupun kepentingan pengikutnya terpenuhi, sehingga termotivasi; dengan itu, tugas-tugas dilaksanakan dan paham melakukannya.¹³

Lebih lanjut kita ketahui, bahwa ada “tiga jenis pemimpin”¹⁴ bila dikaitkan dengan tindakan-tindakannya. Yang pertama, pemimpin yang terpusat pada aksi. Pemimpin jenis ini bisa dilihat dalam dunia militer dan industri. Pemimpin di dunia militer dan industri selalu bertindak menyelesaikan persoalan-persoalan yang langsung mereka hadapi (*facing and problems solving*). Dalam tautan ini, terdapat tiga dimensi kepemimpinan yang berperan yang benar-benar harus dipertimbangkan secara efektif:

- a. Tugas-tugas
- b. Diri pribadi
- c. Tim kerja

Tentu pemimpin harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kepemimpinan yang memadai agar mampu mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut. Gagasan-gagasan dan kemampuan-kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah yang langsung dihadapi serta mengambil keputusan dengan efektif dan efisien hendaknya dipunyai oleh pemimpin.

Jenis yang kedua ialah pemimpin yang melayani. Pemimpin jenis ini berupaya memahami orang lain dan bekerja bersama mereka meraih tujuan-tujuan bersama. Pemimpin ini melakukan gerakan atau perubahan dalam organisasi, komunitas, ataupun masyarakat dengan mengantarkan orang menuju motivasi-motivasi yang mereka inginkan, tanpa memaksakan ide-ide si pemimpin. Dia bekerja melalui benih-benih harapan yang tumbuh pada orang-orang yang dipimpinnya dan tak sekadar menuai hasilnya.

¹² David Pardey, *ibid.*, hal. 11-14.

¹³ David Pardey, *ibid.*, hal. 21.

¹⁴ David Pardey, *opcit.*, hal. 16-18.

Jenis pemimpin yang ketiga ialah pemimpin yang cerdas-emosional. Pemimpin ini mampu mengarahkan orang yang dipimpinnya dengan membangkitkan kesadaran emosional, persuasif, dan tidak mengabaikan analisa rasional. Kemampuan dan keterampilan emosional pemimpin ini diperlukan dalam rangka peran-peran kepemimpinannya, karena bisa memberikan sentuhan-sentuhan rasa pada jiwa dan hati pengikutnya. Pemimpin kharismatis seperti Che Guevara, RA Kartini, dan lainnya, mampu mendorong orang lain mengikuti lakon-lakon mereka (cerdas-emosional). Mengapa mereka kharismatik? Karena mereka lahir dalam kepribadian dan kehendak-kehendak yang muncul secara konsisten-alamiah. Inilah orang-orang yang antara hati, pikiran, kata-kata, dan perbuatannya menyatu-padu. Kebanyakan pemimpin yang transformatif ialah mereka yang kharismatis, karena menginspirasi orang lain untuk mengikuti gagasan-gagasan dan perbuatan-perbuatan si pemimpin.

3. Gaya Kepemimpinan

Sebelumnya telah dibahas pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan¹⁵ yang kita pahami itu terkait dengan kemampuan melakukan gerakan atau perubahan-perubahan dalam organisasi, komunitas, dan masyarakat luas (bangsa, rakyat, massa, publik) di tengah situasi yang tak pasti dan penuh resiko dengan mengilhami orang lain menuju visi tertentu. Pemimpin harus mampu berelasi dengan orang-orang yang dipimpinnya di tingkat rasa, hati, dan pikiran. Di samping itu, pemimpin hendaknya bertindak benar secara moral (etis) dalam perbuatan-perbuatannya.

Terdapat gaya kepemimpinan yang umum dikenal kalangan pemimpin di tingkat organisasi, komunitas, maupun masyarakat luas. Hersey dan Blanchard¹⁶ mengembangkan teori empat "D"¹⁷

¹⁵ David Pardey, *ibid.*, hal. 18-19.

¹⁶ David Pardey, *ibid.*, hal. 19-22.

¹⁷ D: development (perkembangan) karakter

yang terpaut dengan karakter orang-orang yang dipimpinnya:

- a. D1: komitmen dan kompetensi yang rendah (tidak melakukan pekerjaannya dan mereka tidak merasa harus melakukan itu);
- b. D2: beberapa kompeten namun tidak berkomitmen (dapat melakukan pekerjaan namun tidak baik, dan tidak bersungguh-sungguh);
- c. D3: cukup kompeten namun tidak sepenuhnya berkomitmen (dapat melakukan pekerjaan tertentu namun tidak memiliki hasrat untuk itu);
- d. D4: sangat kompeten dan berkomitmen untuk melakukan pekerjaan.

Dengan tingkat perkembangan orang-orang yang dipimpin (pengikut), terdapat empat gaya kepemimpinan "S"¹⁸:

- a. S1: mengarahkan (pemimpin mengatakan kepada orang-orang yang dipimpinnya apa yang harus dilakukan, dan mengawasi kegiatan tersebut dari dekat);
- b. S2: melatih/membimbing (pemimpin menentukan keputusan terhadap orang-orang yang dipimpinnya diperbolehkan terlibat untuk melakukan kegiatan);
- c. S3: mendukung (pemimpin mendorong orang-orang untuk memutuskan sendiri apa yang hendak dilakukannya dan bagaimana melakukannya, mengawasi namun memberikan kebebasan kepada mereka);
- d. S4: delegasi (sebagian utusan membuat keputusan, dan menentukan sendiri bantuan apa yang diperlukan dari pemimpin).

Gaya kepemimpinan tidaklah sesederhana uraian yang ada. Persoalannya menyangkut kompetensi, komitmen, dan mencermati dimensi manusia dan tugas yang hendak ditunaikan. Penting untuk menyeimbangkan antara kepemimpinan dan tata kelola (*management*). Di tiap tingkatan manajemen, kepemimpinan yang

¹⁸ S: style (gaya) memimpin

diperlukan berbeda-beda. Hal itu bergantung pada karakter peran yang dipentaskan dan memerlukan keterampilan dan keahlian memimpin.

4. Kepemimpinan Perempuan dan Demokrasi

Kepemimpinan dalam era demokrasi cukup membingungkan (*paradoxal*). Demokrasi yang berakar pada dan wujud tertinggi kedaulatan rakyat--kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi mengasumsikan bahwa rakyat terlibat dalam pemerintahan, meskipun bukti-bukti menunjukkan bahwa rakyat sendiri tidak mampu mengelola dirinya dengan baik. Pemimpin terpancang untuk 'menyelamatkan' masyarakat dari kelemahan-kelemahannya. Tentu, pemimpin di alam demokrasi mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa besar. Kenyataan memperlihatkan bahwa pemimpin terpecah-pecah dalam kepentingan tertentu. Mereka, yang jumlahnya sedikit, harus memimpin banyak orang dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Keyakinan masyarakat atau rakyat terhadap kebijaksanaan dan ketampan pemimpin yang bertindak demi 'kebaikan umum' (*common good*) memiliki genealogi historis yang panjang. Dalam era moderen, demokrasi dan nilai-nilai yang egaliter terpecah-belah mengikuti 'arus ketampan' pemimpinnya. Individualisme dan keberagaman bisa menurunkan makna 'kebaikan umum' tersebut. Kita kesulitan dalam menciptakan dan mengelola demokrasi secara efektif (J. Thomas Wren, 2007: 1).

Seperti diketahui, bahwa kepemimpinan ialah hubungan saling pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin (pengikut), demi mencapai tujuan-tujuan bersama kelompok, komunitas, atau masyarakat. Kepemimpinan ialah hubungan timbal-balik yang menekankan proses. Meskipun tekanan-tekanan sosial dalam demokrasi terus berjalan, namun dengan kepemimpinan, maka hubungan timbal-balik dapat berlangsung dengan baik. Di satu sisi, dilema muncul dalam demokrasi ketika orang percaya kepada kedaulatan rakyat. Di sisi lain, orang tidak yakin terhadap

kemampuan rakyat memimpin dirinya sendiri.

Kepemimpinan adalah konstruksi yang mengatasi persoalan-persoalan melalui tindakan-tindakan para pemimpin dengan proses-proses yang bermanfaat. Kepemimpinan mengantaraikan hasrat yang muncul dalam demokrasi yaitu: antara 'kehendak berkuasa' dengan 'visi' melalui bermacam tingkat keterlibatan, nilai-nilai egaliter, dan keberagaman yang ada. Kepemimpinan sebagai 'konstruksi' dan 'realitas' menghadirkan kunci untuk menyelenggarakan demokrasi agar terus hidup dalam era postmoderen. Inilah peran kepemimpinan di tengah arus demokrasi (J. Thomas Wren, 2007: 1).

Bagaimana kaitan kepemimpinan perempuan dengan demokrasi? Dalam krisis sejarah dunia saat ini, seperti konflik etnis, agama, kehancuran ekologis, penggunaan senjata nuklir, dan lainnya, orang bertanya akan kemungkinan pemimpin atau gaya kepemimpinan perempuan yang bermanfaat untuk memberikan arah dalam demokrasi. Mungkinkah pendekatan-pendekatan kepemimpinan yang memberdayakan dan membangun kerjasama bermanfaat bagi penyelesaian-penyelesaian persoalan perdamaian dan keadilan sosial di dunia?

Gaya kepemimpinan perempuan yang memberdayakan dan membangun kerjasama bukanlah monopoli kaum perempuan. Secara fenomenal, perempuan tampil dengan gaya kepemimpinan yang khas. Peran-peran tradisional mereka sebagai orang yang melahirkan dan merawat generasi masa depan umat manusia telah membentuk sifat-sifat alami untuk berperan 'memberdayakan' dan 'bekerjasama' dalam kepemimpinannya. Oleh karena, perempuan kebanyakan tidak memiliki kekuasaan politik, maka potensi dan gaya kepemimpinan mereka terabaikan dalam sejarah. Keadaan demikian memerlukan perubahan yang drastis terhadap gaya kepemimpinan masa lalu sebagai sisa-sisa perang dingin, mentalitas militer yang hierarkhis dan dominasi imperialis (superioritas etnis, seks, religi, ras, budaya) yang melahirkan kekerasan dalam segala bentuknya (Bruce O. Solheim, 2000: 2-3).

Dalam alam demokrasi, kekuasaan politis kalangan perempuan penting untuk diperjuangkan. Ada tiga alasan mengapa kekuasaan politik itu penting: Pertama, dalam rangka legitimasi sistem demokrasi, maka seluruh warga negara harus terwakilkan. Di Amerika Serikat, walaupun jumlah perempuan mendekati mayoritas penduduk, namun hanya 9 persen yang menjadi pemimpin nasional. Kedua, bila di suatu negeri yang mayoritas penduduknya perempuan dan dipimpin oleh laki-laki, maka bisa dimengerti bahwa banyak kualitas kepemimpinan belum ditemukan. Ketiga, perempuan bisa membawa pengalaman-pengalaman dan keterampilan-keterampilan kepemimpinannya di masyarakat, kantor, dan organisasi, yang tak dimiliki oleh laki-laki. Oleh sebab itu, menarik untuk melihat hubungan kepemimpinan perempuan dengan kekuasaan politik dan keadilan sosial, dalam demokrasi (Bruce O. Solheim, 2000: 3-4).

Selama ini, makna kekuasaan politis secara tradisional tidak terkait langsung dengan perempuan. Hans J. Morgenthau¹⁹ merumuskan kekuasaan sebagai “kendali laki-laki terhadap pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan orang lain”. Dengan ringkas dapat dijelaskan, bahwa kekuasaan politis adalah kesanggupan melakukan, kemampuan bertindak, kekuatan, paksaan, komando, otoritas, dan daya pengaruh. Kekuasaan bersifat netral, ini bukan baik ataupun buruk. Pada umumnya, karakter kekuasaan dimengerti sedemikian maskulin dengan konotasi psikoseksual, yaitu pemaksaan, kekerasan, dan otoriter. Ada yang menyebutnya sebagai ‘cinta diri sendiri yang berlebihan’ (anakhis-masokhis).

Lama dimengerti, bahwa perempuan secara tradisional tak selalu terlibat dengan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan oleh perempuan dipandang bersifat ‘illegal’. Karakter feminin begitu lama dijauhkan dari dunia kekuasaan--masyarakat merumuskan kekuasaan sebagai ‘dunia laki-laki’. Dengan rumusan yang ada,

¹⁹ Bruce O. Solheim, *On Top of the World: Women's Political Leadership in Scandinavia and Beyond*, hal. 4.

perempuan kebanyakan tidak merasa nyaman memakai definisi kekuasaan yang bias laki-laki. Temuan istilah ‘pemberdayaan’ (*empowering*) sebagai konsep kekuasaan, menurut kalangan perempuan, jauh lebih luwes maknanya untuk dieksplorasi sebagai sumberdaya yang diproduksi dan dibagikan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Dengan begitu, kekuasaan menjadi energi yang mengubah baik pemimpinnya maupun yang dipimpin. Pemimpin yang efektif berarti mampu memberdayakan orang lain berdasarkan kepentingan mereka. Konsep kekuasaan semacam ini lahir sebagai kritik feminisme terhadap model kekuasaan yang bias dan dominan laki-laki.²⁰

Faktor-faktor gender sangat mempengaruhi konsepsi dan konstruksi kekuasaan, karena antara perempuan dan laki-laki tidak memiliki akses yang setara dan adil terhadap sumberdaya yang diasosiasikan sebagai kekuasaan dan menggunakannya secara berbeda-beda. Beberapa feminis menyatakan pendapatnya bahwa perempuan merumuskan kekuasaan sebagai ‘pemberdayaan’ atau ‘kuasa-untuk’. Bagi kalangan laki-laki, kekuasaan dirumuskan sebagai ‘kuasa-atas’ (dominasi). Dengan perbedaan pandangan ini, jelas kekuasaan bagi perempuan bukanlah bentuk permainan ‘menang-kalah’ melainkan ‘sama-sama menang’. Dengan pemberdayaan, kekuasaan bagi perempuan tak harus mensubordinasi laki-laki.²¹

Dalam konteks perdamaian, kekuasaan yang memberdayakan memungkinkan tampilnya cara berpikir ‘peng-ibuan’ bahkan di kalangan pemimpin laki-laki. Peran-peran tradisional perempuan dalam merawat anak-anak dan mengasuhnya dalam benih-benih perdamaian memungkinkan lahirnya tokoh-tokoh perdamaian dunia, seperti M Gandhi, Martin Luther King, dsb. Para feminis percaya bahwa bukan aspek anatomis atau biologis perempuan yang menentukan karakter tokoh-tokoh perdamaian itu, melainkan pola asuh, perawatan, dan pendidikanlah yang membentuk

²⁰ Bruce O. Solheim, *ibid.*, hal. 4.

²¹ Bruce O. Solheim, *ibid.*, hal. 5.

karakter 'tanpa kekerasan' (*non violence*) mereka.²²

Kepemimpinan perempuan dapat diamati kaitannya dengan keadilan sosial. Apa keadilan sosial itu, tentu banyak definisinya. Sepanjang sejarah, rumusan mengenai keadilan sosial berubah-ubah bergantung pada keadaan zaman. Terkadang otoritas yang dominan ikut menentukan makna keadilan sosial itu sendiri. Akan tetapi, secara umum keadilan sosial meliputi segi kepatutan, adil, jujur, dan layak, yang berlangsung dalam kehidupan bersama. Untuk meraih keadilan sosial yang optimum, para feminis yakin bahwa kekuasaan yang memberdayakan adalah jalan keluar yang terbaik, karena kekuasaan tak lagi dilihat sebagai aset atau kepemilikan pribadi semata, namun energi yang harus disebarluaskan guna melancarkan perubahan. Perempuan tidak menggeluti kekuasaan selama ini, akibat sosialisasi politik yang bias, faktor-faktor situasional dan struktural, serta diskriminasi. Perbedaannya tidak terletak pada jenis kelamin orang, tetapi pada konstruksi sosial (*gender*) yang ada dalam masyarakat. Dengan lahirnya gerakan-gerakan perempuan sepanjang sejarah di berbagai tempat di dunia tersingkap bahwa kekuasaan politik tidak bersifat 'perbedaan seksual' akan tetapi bersifat 'konstruksi sosial dan individual'²³ di masyarakat.

Kepemimpinan perempuan berhadapan dengan kekuasaan publik yang sejarahnya lebih banyak ada di tangan laki-laki. Laki-laki dengan identitas maskulinnya menciptakan legitimasi melalui dominasi terhadap ke-femininitas-an perempuan, sehingga apabila ada perempuan yang menjadi pemimpin, maka perempuan pun berlaku atau bertindak seperti laki-laki. Dengan demikian, kekuasaan publik (politik) berkembang menjadi identik dengan kekuasaan laki-laki, tiada terkecuali dalam dunia pemerintahan

²² Bruce O. Solheim, *ibid.*, hal. 5-6.

²³ Bruce O. Solheim, *ibid.*, hal. 7-8. Bandingkan pula hal ini dengan pernyataan kalangan feminis gelombang kedua di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa "yang pribadi adalah politis".

ataupun kepemimpinan.²⁴

Apfelbaum dan Hadley²⁵ menjelaskan bahwa ada lima jalur menuju kepemimpinan:

1. Kharisma
2. Pewarisan
3. Pencapaian karya profesional
4. Seleksi
5. Penghargaan

Kelima jalur tersebut berlaku untuk perempuan maupun laki-laki, meskipun terdapat perbedaan *gender* di dalamnya. Untuk kebutuhan analisa, secara teoritis, mungkin kita dapat membedakanya, tetapi dalam praktiknya, itu saling kait-mengait. Bagaimana orang memperoleh manfaat melalui kelima jalur tersebut?

Apakah yang kita maksudkan dengan jalur kharisma? Kharisma adalah kualitas kepribadian seseorang yang melahirkan daya tarik tertentu (*magnetism*) yang bergantung pada penghargaan pengikutnya (orang yang dipimpin) terhadap pemimpinnya, dalam bentuk-bentuk inspirasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Penghargaan itu lahir sebagai hasil ikatan emosional antara pemimpin dengan yang dipimpin (pengikutnya). Namun, dunia moderen memberikan makna kharisma itu jauh lebih luas daripada sekadar citra seseorang, karena sarana-sarana yang tersedia kini makin bertambah, yang mungkin belum ditemukan pada masa lampau.

Dalam struktur masyarakat yang demokratis dan moderen, kharisma yang 'murni' bukan landasan utama untuk meraih kekuasaan politik, walaupun bisa membentuk dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Kharisma, yang menyangkut hubungan-hubungan sosial dan individual, tak terlepas dari pencitraan yang

²⁴ Ludger Helms (ed.), *Comparative Political Leadership*, hal. 208.

²⁵ Ludger Helms (ed.), *ibid.*, hal. 211-216.

fisikal dan bias *gender*, misalnya jenis suara yang berat, perawakan yang tinggi besar, energik dan sebagainya. Tentu kisah-kisah dan latar belakang mereka diciptakan sedemikian rupa bak mitos, yang dianggap memperkuat kharisma. Semua itu menjadi sasaran penafsiran makna yang membalut sosok pemimpin yang dilukiskan. Ikatan sosial dan emosional yang terbangun antara pemimpin dan pengikutnya terkadang mengandung unsur kesetiaan dan kepatuhan yang membabi-butakan. Perempuan pemimpin dalam era moderen, seperti Indira Gandhi, Golda Meir, Margaret Thatcher, RA Kartini, dan lainnya berhasil mencapai kualitas kharismatik dalam kepemimpinan mereka.

Jalur menuju kepemimpinan berikutnya ialah pewarisan. Jalur ini merupakan sarana yang penting yang memungkinkan pemimpin meraih kekuasaannya. Jalur ini menjadi landasan dalam kekuasaan yang monarkhis-aristokratik. Pewarisan sebagian besar diterima oleh kalangan laki-laki, namun di beberapa kerajaan berlaku pula bagi kalangan perempuan (Inggris, Aceh, dll.). Pewarisan kekuasaan di alam demokrasi moderen jauh lebih kompleks daripada zaman kerajaan-kerajaan. Akan tetapi, kita tak menolak bahwa dunia demokrasi moderen juga dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang mewarisi ke-'priyayian'-an dari moyang mereka, misalnya pemimpin negara masyarakat Uni Eropa yang keturunan monarkhis, walaupun kekuasaan mereka sebagian besar bersifat simbolis, namun tetap berperan penting khususnya pada masabencana dan perang.

Dalam pewarisan, kita menemukan apa yang disebut 'dinasti politik'. Dinasti politik adalah perpaduan antara jalur kharismatis dan jalur pewarisan. Banyak pemimpin negara memperoleh kekuasaan politiknya melalui bauran kedua jalur tersebut, contohnya Aung San Suu Kyi, Indira Gandhi, dan lainnya. Pewarisan terjadi karena hubungan keturunan ataupun darah, maupun hasil perkawinan antar keluarga pewaris kekuasaan. Akan tetapi, dampak ketimpangan *gender* bisa terjadi dalam jalur pewarisan ini. Oleh karena, perempuan sebagian besar disingkirkan dari akses

kekuasaan dalam sistem pewarisan. Sekalipun sistem pewarisan dianggap suatu yang 'anakronistik' (melawan arus zaman) dalam dunia demokrasi moderen, namun realitas kekuasaan politik membuktikan adanya kepemimpinan yang demikian.

Jalur kepemimpinan lainnya ialah keahlian profesional. Kepemimpinan ini didasarkan atas kecakapan manajerial, teknis profesional, dan derajat akademis tertentu. Politik bukanlah profesi yang terlalu teknikal, sehingga kalangan perempuan mampu meraih posisi sebagai penasihat senior dalam bidang politik, misalnya. Dampak ketimpangan gender dalam kepemimpinan ini bisa muncul akibat anggapan bahwa perempuan kurang menguasai hal-hal teknis profesional, sedangkan laki-laki dipandang jauh lebih kompeten, sehingga mampu mempengaruhi orang lain.

Jalur kepemimpinan karena seleksi dapat menjadi jalan bagi orang yang akan menduduki posisi pemimpin. Jalur ini bergantung pada banyak faktor struktural dan keputusan institusional yang ada. Alam budaya dan tradisi yang berkembang di suatu daerah atau tempat ikut mempengaruhi jalur kepemimpinan jenis ini, contohnya kaum minoritas akan sulit meraih posisi pemimpin di tengah politik yang dikuasai oleh kaum mayoritas. Hasil studi di Norwegia menunjukkan bahwa jumlah pemimpin (politik) perempuan mencapai 43 persen, yang tak proporsional dengan pemimpin layanan publik yang berjumlah 15 persen, serta pengusaha perempuan sekitar 5 persen. Argumen yang mengemuka menjelaskan bahwa pejabat perempuan menjadi sasaran tekanan birokrasi yang luar biasa dalam memberikan layanan kepada publik dengan setara, sementara politisi perempuan hanya menerima tekanan yang besar dari budaya ideologis yang tak egaliter. Iklim kesetaraan gender di partai politik dan sistem pemerintahan memungkinkan banyak perempuan mencapai posisi tertinggi dalam kekuasaan politik, entah menjadi presiden ataupun perdana menteri, seperti di Australia, Jerman, dan lainnya. Dalam demokrasi moderen, kepemimpinan dengan jalur seleksi akan mempertimbangkan proses, prosedur, dan mekanisme seleksi itu

sendiri. Dengan situasi itu, peran partai politik sangat penting untuk menciptakan proses, prosedur, dan mekanisme yang setara yang memungkinkan perempuan menjadi pemimpin politik. Struktur internal, budaya, dan nilai-nilai dalam organisasi akan membuka kesempatan yang besar atau peluang yang lebar bagi kepemimpinan perempuan. Namun dalam organisasi politik, pola patronase masih sangat dominan berlaku dalam menapaki tangga karir politik. Dampak ketidaksetaraan gender berlangsung, akibat sistem seleksi yang patronasistik.

Jalur kepemimpinan yang terakhir ialah penghargaan. Jalur ini erat kaitannya dengan kepemimpinan berbasis seleksi. Biasanya penghargaan diberikan sebagai bentuk seleksi. Dalam demokrasi yang maju, sistem penilaian atau penghargaan ini kian berkembang. Jalur kepemimpinan melalui penghargaan sangat penting meskipun kurang bermanfaat dalam meraih kekuasaan politik. Penghargaan penting bagi diri si pemimpin maupun orang yang dipimpinnya, dan efektif sebagai 'memoria' atas perannya. Pemimpin politik membutuhkan dukungan yang penuh dan terus-menerus dari kalangan partai politik dan pemilihnya. Oleh karena itu, penilaian kinerja kepemimpinan menjadi hal yang penting. Dampak bias *gender* muncul bila dilakukan evaluasi atas kinerja dan presentasi kepemimpinan perempuan, terutama oleh kalangan media.

5. Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Sejarah Indonesia mencatat bahwa perempuan pemimpin telah berlaku sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Beberapa perempuan kalangan bangsawan pernah menjadi raja atau ratu, misalnya di kerajaan Pase, Aceh. Ratu-ratu yang berkuasa tersebut tidak kalah tangguh daripada raja-raja laki-laki. Reputasi mereka dalam mengelola pemerintahan kerajaannya cukup baik, sehingga mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya.

Pada zaman kolonisasi, beberapa perempuan pemimpin muncul di panggung sejarah Indonesia. Mereka adalah tokoh-tokoh

perempuan yang mengilhami publik atau masyarakat untuk bangkit berjuang meraih kemerdekaannya. Mereka ada yang menggeluti bidang pendidikan, memajukan kaum perempuan, dan lainnya. Kehadiran mereka di panggung perjuangan menyemarakkan arena perlawanan anak negeri dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Di tengah belenggu tradisi dan budaya yang patriarkhis, kakunya tafsir agama dalam melihat posisi perempuan, justru tak menjadi penghalang bagi mereka untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpolitik. Dengan begitu, dalam situasi kolonisasi, mereka bisa berkongres dan menentukan *platform* politik kebangsaan bagi Indonesia.²⁶

Kemajuan politik perempuan Indonesia tersebut diperlihatkan dengan berhasilnya menyelenggarakan beberapa kali kongres yang menyepakati banyak hal, termasuk kemerdekaan Indonesia dan isu-isu di seputar hak-hak perempuan: penghapusan poligami, pendidikan, ekonomi, kewarganegaraan dan sebagainya. Tampilnya perempuan di ruang politik, sekalipun tidak massif, namun mengisyaratkan bahwa kepemimpinan perempuan diterima di masyarakat. Bila ditelusuri asal-usul biografis tokoh-tokoh perempuan yang ada, maka tak bisa disangkal bahwa jalur kepemimpinan mereka berakar pada pewarisan dan jalur kepemimpinan lainnya. Itu bertolak dari latar belakang keluarga mereka yang setidaknya memiliki status sosial yang baik pada masanya sehingga potensi-potensi kepemimpinan itu menurun ke anak-anak mereka. RA Kartini misalnya, lahir dalam keluarga yang 'priyayi' sebab ayahnya adalah wedana (kepala residen) di Rembang. Kartini dan saudara-saudaranya tumbuh dalam iklim kepemimpinan di dalam keluarganya yang inspiratif. Suasana demikian banyak mendorong perkembangan bakat-bakat mereka menjadi pemimpin kelak. Rohana Kudus di Padang, contoh lainnya, lahir dan tumbuh dalam keluarga tokoh masyarakat yang dihormati. Rohana besar dalam suasana kepemimpinan di dalam keluarga yang membuka kesempatan baginya untuk berpikir

²⁶ Lihat Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2004.

merdeka dan kritis, sama seperti Kartini, maka dia dan kawan-kawannya membuat surat kabar (koran) yang mempropagandakan perlawanan terhadap poligami dan perkawinan anak.²⁷

Dari alam kemerdekaan hingga pemerintahan Orde Baru, kemajuan kepemimpinan perempuan dalam politik terlihat dari segi kuantitas yang tiada sebanding dengan jumlah laki-laki yang menjadi pemimpin. Jumlah perempuan di parlemen (DPR RI/DPRD) umpamanya, kala itu sangat kecil dengan orientasi politik dan perjuangan yang belum sepenuhnya memenangkan hak-hak perempuan. Lolosnya kebijakan-kebijakan parlemen yang tak mengakomodir bidang kehidupan perempuan, misalnya UU Perkawinan 1974, UU modal asing, dan lainnya, memperlihatkan bahwa kepentingan perempuan belum menjadi prioritas untuk diperjuangkan, meskipun ada anggota legislatif perempuan di parlemen. Di tingkat eksekutif dan yudikatif, jumlah perempuan yang menempati posisi pemimpin juga sangat terbatas. Dengan UU dan peraturan-peraturan hukum yang bias *gender* dan mendiskriminasi perempuan, maka peluang dan kesempatan mereka meraih kepemimpinan kurang terbuka di Indonesia.

Seiring dengan perubahan demokrasi di Indonesia (sistem pemilu) sejak Reformasi 1998, yaitu dari tidak langsung dan tertutup menjadi sistem langsung dan semi-terbuka sampai terbuka, maka prosedur ataupun mekanisme demokrasi ini telah menciptakan ruang politik yang kian besar bagi kalangan perempuan untuk berkiprah. Perubahan ini merupakan dampak global era demokratisasi dunia, khususnya dorongan demokrasi ala Amerika yang pragmatis, menekankan kebebasan individu, otonomi diri, hak asasi, dan pasar bebas. Tentu bila kita membandingkan pendapat Fatima, maka Indonesia sejak Dekade Perempuan Internasional (1975-1985), Kongres Perempuan di Mexico (1975), Pertemuan Copenhagen (1980), Nairobi (1985), dan Beijing (1995), telah menjadi bagian dari perubahan dunia dalam memposisikan perempuan dalam pembangunan, termasuk bidang

²⁷ Susan Blackburn, *ibid*.

politik. Peningkatan kesadaran gender dalam pembangunan ini mendorong keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan pendidikan, meskipun dalam bidang politik masih jauh tertinggal. Hal itu menjadi gejala yang umum di seluruh dunia. Pencapaian pendidikan, kontribusi ekonomi, dan kemajuan profesional yang dialami kalangan perempuan tidaklah berbanding lurus di sektor publik dan privat.²⁸

Fatima, mengutip studinya Georgia-Duerst-Lahti²⁹ menjelaskan, bahwa setidaknya ada hubungan positif antara capaian pendidikan perempuan yang lebih tinggi dengan kepemimpinan dan posisi pengambil kebijakan, baik di sektor publik maupun privat. Akses yang setara dalam bidang ekonomi dan pendidikan menjadi prakondisi bagi pemajuan status sosio-ekonomis perempuan dan penguatan politiknya.

Dengan nalaran itu, maka peran penting pendidikan dan ekonomi di Indonesia telah membuka ruang lebih lebar bagi kalangan perempuan bisa terlibat dalam politik. Perubahan-perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam produk hukum di Indonesia yang memungkinkan perempuan masuk ke parlemen, seperti perubahan paket UU Pemilu dan Parpol. Banyak perempuan terdidik dengan kesadaran sendiri atau kadang didorong oleh orang lain atau keadaan, masuk ke partai-partai politik dan berkiprah di sana. Selain itu, beberapa partai politik secara pragmatis mencalonkan atau merekrut perempuan dari luar partainya menjadi calon anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah ataupun menjadi kepala daerah (walikota, bupati, gubernur). Berbagai dinamika ini, paling tidak mendorong banyak perempuan tampil di ruang publik³⁰, dan berkompetisi dengan kalangan laki-laki. Persoalannya kesetaraan gender yang

²⁸ Fatima Sbaity Kassem, *Party Politics, Religion, and Women's Leadership: Lebanon in Comparative Perspective*, hal. 1.

²⁹ Fatima Sbaity Kassem, *ibid.*, hal. 1-2.

³⁰ Lihat Kalyanamitra, *It's a Politics: Rekam Jejak Pengalaman Perempuan dalam Pemilu 2014*, Jakarta, 2015.

diprasyarkan guna memungkinkan ruang politik menjadi terbuka, dalam realitasnya, justru ruang politiklah yang menjadi prasyarat bagi terciptanya perubahan dalam kesetaraan gender (?).

6. Praktik Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Dalam era “demokrasi milenium dan situasi global”³¹ di Indonesia, peran-peran politik kelembagaan negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif mutlak diperlukan. Lembaga legislatif dengan tiga fungsinya diharapkan mampu berperan optimal dalam melahirkan produk-produknya. Dengan fungsi legislasi yang dimilikinya, publik menunggu sejauh mana UU atau kebijakan-kebijakan publik yang ditelurkannya mampu berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (rakyat). Fungsi anggaran yang ada memungkinkan parlemen bersama eksekutif bisa mengalokasikan anggaran yang lebih memakmurkan rakyat (termasuk perempuan). Fungsi pengawasan yang dimiliki mewajibkan parlemen mengawasi implementasi kebijakan publik, anggaran, dan program pembangunan oleh lembaga eksekutif, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik, yang berlandaskan konstitusi dan etika publik.

Bagaimana dengan peran lembaga eksekutif? Lembaga ini bekerja untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang sudah dihasilkan bersama-sama dengan pihak parlemen. Pemerintah harus mempergunakan kebijakan-kebijakan publik yang ada guna menghasilkan layanan-layanan publik yang prima dan berkualitas bagi masyarakat dalam rangka terjadinya perubahan-perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan perempuan.

Lembaga yudikatif berperan untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan, melalui tata peradilan yang ada. Ketiga kelembagaan negara itu haruslah bekerjasama senada seirama dalam

³¹ Bandingkan Clare Rigg and Sue Richards (eds.), *Action Learning, Leadership and Organizational Development in Public Services*, New York: Routledge, 2006.

memproduksi kebijakan-kebijakan dan layanan-layanan publik yang berkualitas nomor wahid. Inilah pergeseran paradigma kebijakan-kebijakan dan layanan-layanan lembaga publik saat ini, sejak usainya Perang Dunia. Tema-tema dan pendekatan-pendekatan baru dalam kebijakan dan layanan publik muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan zaman yang ada.

Lebih jauh Clare dan Sue Richards³² melihat ciri utama perubahan paradigma kepemimpinan dalam layanan publik saat ini ialah pencapaian ekonomi melalui belanja publik yang makin efisien dan efektif serta transparan. Untuk mencapai itu, maka diperlukan sistem layanan yang lebih terpilah-pilah dalam rangka menghasilkan produk layanan. Fokus terhadap dampak layanan publik menjadi ciri lain dalam perubahan paradigma kepemimpinan yang kontemporer. Dalam paradigma kebijakan dan layanan publik di negara-negara Eropa Barat, contohnya, negara menciptakan 'negara kesejahteraan' dengan produk kebijakan dan layanan yang mampu memberi 'jaminan sosial' kepada masyarakat mulai dari lahir hingga ke liang kubur. Perlindungan ekonomi dan penyediaan lapangan-lapangan kerja bagi masyarakat didasarkan rasio sumberdaya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang muncul. Perencanaan dan koordinasi antara penguasa di tingkat pusat dan daerah semakin beragam, antara politisi dengan kelompok-kelompok profesional, juga kian tak terelakkan. Perubahan-perubahan dalam hakikat layanan publik memerlukan keputusan bersama di kalangan 'pemain kunci'. Pengambilan keputusan yang terdistribusi akan memastikan bahwa berbagai perspektif yang berbeda ikut berkontribusi di dalamnya. Dengan berbagai dinamika yang ada, maka corak kepemimpinan saat ini diharapkan lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang tengah berlangsung di tingkat lokal, nasional, dan global.

Kepemimpinan dengan paradigma kebijakan dan layanan publik yang baru sekarang memiliki tujuan mencapai 'dinamisme ekonomi' dan 'keadilan sosial' sebagai wujud politik sosial-

³² Clare Rigg and Sue Richards, *ibid.*, hal. 14-16.

demokratis, yang mempertahankan momentum persaingan dan intervensi yang kuat dari sisi ketersediaan (*supply side*), dalam rangka memecahkan berbagai persoalan sosial. Intervensi tersebut dimaksudkan tidak semata-mata kompensasional untuk mengobati derita masyarakat akibat perubahan-perubahan yang berlangsung, tetapi juga dirancang untuk memperluas daya saing yang unggul dengan berfokus kepada pemecahan terhadap 'kelemahan' dan menaruh perhatian terhadap pengembangan keterampilan-keterampilan, kecakapan kerja individual, serta menjawab tantangan kondisi sosial dan komunitas. Kelemahan-kelemahan yang ada bisa menghancurkan daya saing dan kemampuan kerja apabila tidak tertangani.³³

Bagaimana praktik-praktik kepemimpinan perempuan di Indonesia dengan hadirnya paradigma tersebut?

Dalam era keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas saat ini,³⁴ maka perempuan Indonesia memasuki babak baru kepemimpinan abad 21 dengan praktik-praktik dan privelese yang terkait dengan komunitas internasional, masyarakat sipil, dan di kalangan pemimpin sendiri. Ada tiga sektor utama global yang tercakup dalam masalah akuntabilitas saat ini, seperti a) kekerasan politik, b) korupsi politis dan ekonomis, dan c) kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, ada isu layanan publik dan perburuhan.

Untuk konteks Indonesia, pelanggaran ham dan kekerasan terhadap perempuan salah satu isu penting dalam kepemimpinan yang baru. Yang khas dalam praktik-praktik kepemimpinan dan privelese sekarang ialah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik (*abuse of power and trust*) serta kekebalan terhadap hukum (*impunity*). Ranahnya mencakup pelanggaran terhadap moralitas publik (*public morality*) dan etika profesi atau jabatan (*ethics of leadership*).

³³ Clare Rigg dan Sue Richards, *ibid.*, hal. 17-19.

³⁴ Lihat Christopher Williams, *Leadership Accountability in a Globalizing World*, New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Praktik kepemimpinan kini juga berhadapan dengan apa yang disebut “kepemimpinan yang interaktif”³⁵ yaitu bagaimana pemimpin di Indonesia mendorong orang-orang yang dipimpinnya lebih aktif terlibat, mau berbagi kekuasaan dan informasi dalam pengelolaan sumberdaya secara partisipatif. Keterlibatan ini harus dimaknai sebagai kesadaran akan kebermanfaatannya bagi diri pribadi pemimpin bagi orang lain dan bentuk penyemangatan terhadap yang dipimpinnya. Pemimpin seperti ini percaya bahwa rakyat atau masyarakat mampu tampil prima apabila mereka merasa nyaman terhadap diri sendiri dan atas pekerjaannya. Si pemimpin harus berusaha menciptakan iklim yang kondusif mendorong terjadinya keadaan demikian.

Patricia H. Werhane dan Mollie Painter-Morland percaya bahwa ‘inklusi’ adalah inti kepemimpinan yang interaktif (melibatkan sebanyak-banyaknya orang, dan lawannya yaitu eksklusif: menyingkirkan banyak orang). Untuk menciptakan keterlibatan masyarakat atau rakyat secara inklusif, maka perempuan pemimpin wajib membuat masyarakat merasakan perjuangan, visi, dan misi mereka sendiri. Penting bagi perempuan pemimpin membangun berbagai ‘identitas’ yang sanggup mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang dipimpinnya. Dalam rangka ini, maka perlu dibuatkan ‘mekanisme’ siapa orang-orang yang terlibat secara inklusif. Penciptaan situasi, suasana atau momen kebersamaan akan membuka peluang terbentuknya keterlibatan yang lebih luas, contohnya forum-forum sebagai wadah masyarakat untuk bisa berinteraksi secara terbuka dan egaliter, sehingga mereka menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa penting yang tengah berlangsung di dalam hidup mereka³⁶.

Keterlibatan masyarakat secara inklusif bisa mengurangi resiko kekeliruan dan kelemahan dalam memimpin. Gagasan-gagasan yang ditawarkan ke publik dalam rangka melayani jauh

³⁵ Patricia H. Werhane and Mollie Painter-Morland (eds.), *Leadership, Gender, and Organization*, (New York: Springer, 2011), hal. 21.

³⁶ Patricia H. Werhane dan Mollie Painter-Morland (eds.), *ibid.*, hal. 21-22.

lebih mudah diterima, apabila keputusan-keputusan pemimpin diuji-cobakan dulu dan meminta masukan-masukan publik, bahkan kritikan-kritikan tajam yang membangun. Berpikir dengan banyak kepala, merasa dengan banyak hati, dan bekerja dengan banyak tangan, akan jauh lebih efektif dan efisien dampaknya bagi ketersediaan kebijakan-kebijakan dan layanan-layanan publik yang optimal. Membuka diri terhadap pikiran-pikiran dan kritikan-kritikan orang lain yang konstruktif, meskipun bukan tanpa resiko dan konflik kepentingan, akan melapangkan jalan bagi perempuan pemimpin mencapai kepemimpinannya yang interaktif.³⁷

Ciri kepemimpinan yang interaktif ialah berbagi kekuasaan dan informasi. Metode ini dapat menyelesaikan banyak masalah dalam kepemimpinan perempuan. Cara ini menciptakan keakraban (*loyalty*) antara pemimpin dengan yang dipimpin, karena menjadi kawan sekerja yang ide-ide dan masukannya dipertimbangkan bersama. Arus komunikasi jauh lebih mengalir serta bisa mengantisipasi 'ledakan masalah'. Dengan berbagi kekuasaan dan informasi, maka antara pemimpin dengan yang dipimpin bisa mengatasi persoalan bersama-sama serta mencapai kesimpulan dan melihat kemungkinan pembenaran-pembenaran terhadap keputusan-keputusan yang diambil³⁸. Memang, tindakan berbagi kekuasaan dan informasi bisa ditentang, dikritisi, dan dicurigai oleh yang dipimpin, bahkan mereka bisa melawan otoritas si pemimpin. Namun, itulah resiko bagi pemimpin yang mau mencapai kepemimpinan yang interaktif.³⁹

Tantangan kepemimpinan yang interaktif berikutnya ialah bagaimana agar masyarakat yang dipimpinnya merasakan kebermanfaatan diri mereka bagi sesama manusia. Telah menjadi ciri alamiah manusia, bahwa orang memandang dirinya penting. Menempatkan orang sebagai 'subyek yang penting' merupakan tantangan tersendiri dalam kepemimpinan saat ini.

³⁷ Patricia H. Werhane dan Mollie Painter-Morland (eds.), *ibid.*, hal. 22-23.

³⁸ Patricia H. Werhane dan Mollie Painter-Morland (eds.), *ibid.*, hal. 23-24.

³⁹ Patricia H. Werhane dan Mollie Painter-Morland (eds.), *ibid.*, hal. 24.

Bersedia memberikan pujian, menghormati hasil kerja orang lain, umpamanya, adalah tantangan bagi pemimpin dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta berbagi kekuasaan. Perilaku yang mau menghargai orang lain sangat penting dimiliki pemimpin, sehingga yang dipimpin tidak merasa seperti 'tempat parkir' atau 'dapur' bagi kepentingan pemimpin.⁴⁰

Pada gilirannya, kehadiran pemimpin ialah menyemangati orang-orang yang dipimpinnya. Kata yang tepat untuk hal ini ialah 'anthusiasme'. Karakter ini harus bersumber dari dalam diri pribadi si pemimpin, sehingga bisa mengilhami orang lain. Anthusiasme tak bisa dibuat-buat atau pura-pura, karena akhirnya publik akan tahu apabila energi semangat itu hanyalah bentuk kepalsuan atau topeng. Anthusiasme akan tumbuh subur bila 'makna' kepemimpinan yang diemban oleh pemimpin disadarinya sungguh-sungguh sebagai 'amanat' publik yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan paradigma yang baru tersebut, maka tanggungjawab pemimpin ialah melayani publik sebaik-baiknya dan memanusiakan manusia (*homo homini sacre*). Pemimpin yang anthusias bersedia berkorban untuk ditolak dan dikritik oleh publik, karena dianggap 'mencari muka'.⁴¹

Dalam alam kepercayaan publik yang kian krisis terhadap pemimpinnya, apatisme serta sinisme, maka tantangan bagi kalangan perempuan pemimpin di Indonesia akan bertambah sulit. Tak hanya terhadap kalangan pemimpinnya masyarakat kehilangan kepercayaannya, bahkan terhadap lembaga-lembaga negara juga. Menurunnya tingkat kepercayaan publik tersebut adalah indikasi, bahwa 'keterpercayaan' pemimpin sangat vital dalam kepemimpinan. Hasil survei Edelman Barometer⁴² mencatat, bahwa pemerintahan di beberapa negara Eropa (Prancis, Spanyol, Italia) mengalami 'krisis ketidakpercayaan' oleh warga

⁴⁰ Patricia H. Werhane dan Mollie Painter-Morland (eds.), *ibid.*, hal. 24-25.

⁴¹ Patricia H. Werhane and Mollie Painter-Morland (eds.), *ibid.*, hal. 25.

⁴² Aneil K. Mishra and Karen E. Mishra (eds.), *Becoming A Trustworthy Leader: Psychology and Practice*, (New York: Routledge, 2013), hal.3.

negara mereka sendiri. Warga negaranya makin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Di Amerika Serikat, berdasarkan *Indeks Kepemimpinan Nasional* (2011), sekitar $\frac{3}{4}$ dari total penduduknya menyatakan setuju dengan pendapat, bahwa “terjadi krisis kepemimpinan di Amerika Serikat.” Defisit kepercayaan tersebut bisa merusak iklim kepemimpinan dalam alam demokrasi di suatu negara. Tantangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup memerlukan tingkat kepercayaan publik yang tinggi agar bisa mengatasi hal itu.⁴³

Mengapa ketidakpercayaan publik terus berkembang di Amerika Serikat? Menurut Aneil K. Mishra dkk., ada alasan untuk itu. Alasannya ialah tingkat kecurigaan warga negara berkembang terus-menerus setiap waktu, dan sebagian lagi akibat terputusnya relasi pemimpin dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat memproteksi diri mereka dari kenyataan-kenyataan yang tak terprediksi dan mengancam hidup mereka. Kecurigaan ini dipicu oleh faktor melemahnya kelembagaan pemerintahan dan hancurnya sistem keuangan negara secara massif, krisis pendidikan, sistem politik, dan sebagainya. Pemimpin bisnis, politik, dan agama yang mengkhianati kepercayaan warga negara atau publik telah memicu krisis tersebut.⁴⁴

Dengan kondisi itu, perempuan pemimpin di Indonesia hendaknya berusaha menjaga kepercayaan publik atau masyarakat terhadap kepemimpinan mereka, sehingga tak mengalami krisis apalagi defisit. Mereka harus menyadari sungguh-sungguh bahwa kepemimpinan yang diemban adalah amanat masyarakat yang perlu dipertanggungjawabkan secara serius. Praktik-praktik kepemimpinan perempuan yang melanggar moral publik atau etika profesi dapat memicu rasa ketidakpercayaan publik. Amanat kaum perempuan wajib diwujudkan secara sungguh-sungguh melalui produk kebijakan dan layanan publik yang berkualitas.

Atas dasar pandangan-pandangan tersebut, pendokumentasian

⁴³ Aneil K. Mishra and Karen E. Mishra, *ibid.*, hal. 3-4.

⁴⁴ Aneil K. Mishra and Karen E. Mishra, *ibid.*, hal. 4-5.

mengenai praktik kepemimpinan perempuan di komunitas ini menjadi hal yang penting untuk dikerjakan. Pengalaman perempuan pemimpin dalam melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, dalam bidangnya di daerahnya, penting untuk disebarluaskan kepada perempuan lainnya yang mencalonkan diri menjadi pemimpin, bahkan bagi mereka yang sedang memimpin di wilayah atau di posisi kekuasaan tertentu. Dengan belajar dari pengalaman-pengalaman dan kelemahan-kelemahan yang ada, maka diharapkan mereka tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang samadi kemudian hari. ***

BAGIAN DUA

PROFIL PEMIMPIN DAN PRAKTIK KEPEMIMPINAN

"As women, we must stand up for ourselves. We must stand up for each other.

We must stand up for justice for all." – Michelle Obama

"Nothing will work unless you do." – Maya Angelou

"So often people are working hard at the wrong thing. Working on the right thing is probably more important than working hard." – Caterina Fake

"Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world.

Indeed, it is the only thing that ever has." – Margaret Mead

"A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don't necessarily want to go, but ought to be." – Rosalynn Carter

"No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprives itself of the contributions of half of its citizens." – Michelle Obama

I. IRMA SURYANI CHANIAGO

(anggota DPR RI, Jakarta)

Biografi Singkat

Irma Suryani Chaniago lahir di Lampung, 6 Oktober 1965. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Saat ini, ia menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Kehidupan kecil Irmakurang beruntung, sebab ibunya meninggal dunia waktu ia berusia dua tahun. Ayahnya memutuskan untuk tidak menikah lagi dan memilih membesarkan sendiri ketujuh anaknya. Irma adalah anak bungsu. Ayahnya mendidik Irma dan saudara-saudaranya dengan disiplin. Asisten rumah tangga tidak diizinkan melayani Irma bersaudara secara pribadi. Ia dan saudaranya boleh sekolah di mana saja, asalkan tidak membuat malu keluarganya. Kondisi ini turut membentuk perilaku Irma menjadi lebih mandiri, berdisiplin, tangguh, dan menjaga perilakunya terhormat.

Hidup terus berlanjut, hingga Irma menginjak bangku kuliah di Yogyakarta. Ayahnya meninggal dunia ketika ia kuliah di Yogyakarta. Kakaknya yang nomor dua kemudian menggantikan peran ayahnya untuk menguliahkannya. Sebelum tamat kuliah, ia mendapatkan pekerjaan di Batam. Ia bekerja di sana selama dua tahun untuk mengumpulkan uang. Setelah dua tahun, ia memutuskan kembali ke Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan tingginya. Selama berkuliah di Yogyakarta, ia menjadi aktivis dan kerap berdemonstrasi.

Tamat kuliah, Irma mencari pekerjaan di Jakarta. Ia diterima bekerja di sebuah bank, tetapi gajinya lebih kecil daripada gajinya waktu di Batam. Ia tidak mengambil pekerjaan tersebut. Selanjutnya, ia mendapatkan tawaran kerja sebagai *Sales Manager* di sebuah perusahaan kosmetik, tetapi lagi-lagi tidak ia lakoni. Ia hidup hanya berbekal tabungan hasil kerjanya saat di Batam.

Selama menetap di Jakarta, Irma tinggal di rumah seorang temannya. Ia bersama tiga temannya yang dari Yogyakarta menempati sebuah kamar kosong. Sebagai pengganti sewa kamar ini, maka ia dan tiga temannya tersebut selalu menyiapkan makanan bagi pemilik rumah. Suka duka menjadi perantau, sangat ia rasakan. Di kamar tersebut hanya ada sebuah dipan. Mereka berempat tidur secara bergantian dengan memakai dipan tersebut. Bila hari ini ia yang menggunakan dipan, maka esok harinya ia tidur di lantai. Akhirnya, Irma kembali ke keluarganya. Ia disarankan bekerja di pelabuhan dan melamar melalui koperasi pelabuhan. Ia mengikuti tes dan diterima bekerja di sana. Gajinya tidak mencukupi. Ia berusaha mencukupkan diri dengan apa adanya. Enam bulan bekerja, ia pun melihat ada lowongan pekerjaan di Pelindo, dan memutuskan mendaftarkan diri. Ia diterima bekerja di Pelindo. Tak seorang pun tahu, bahwa ia adalah saudara dari Kepala Biro Pelindo. Ia ingin dikenal karena kemampuannya bekerja, bukan karena faktor lain. Meskipun hanya menjadi staf dan sulit memperoleh kenaikan pangkat, namun ia menikmati pekerjaannya dan menjalaninya penuh semangat.

Suatu saat, kantor Unit Peti Kemas tempat Irma bekerja, yaitu anak perusahaan Pelindo II diprivatisasi, maka karyawannya tidak tahu harus bagaimana. Nuraninya terusik dan ingin memberontak. Ia merasa ada yang tidak beres dengan hal itu. Akhirnya, ia dan sembilan temannya membentuk serikat pekerja. Mereka menyebut diri mereka 'Tim Wali Songo'. Tim ini terdiri atas 9 orang, yang posisinya staf dan manajer senior. Ia satu-satunya perempuan dalam tim itu. Mereka tidak menolak privatisasi, tetapi menolak privatisasi yang tak jelas. Mereka ingin privatisasi dilakukan secara transparan. Perusahaan tersebut tak boleh dijual murah, dan karyawannya pun harus jelas posisinya. Peristiwa ini terjadi tahun 1998, ketika krisis ekonomi berlangsung di Indonesia.

Kemudian 1300 orang buruh melakukan demonstrasi. Irma dan teman-temannya di Tim Wali Songo memimpin gerakan tersebut. Mereka menutup pelabuhan. Aksi itu menyebabkan

Irma dan delapan temannya tersebut dipecat dari perusahaan. Ia bersiap dengan segala konsekuensi yang akan dihadapinya, sebagai akibat aksi yang mereka lakukan. Sebelum dipecat, ia dan teman-temannya dipanggil dan diberi iming-iming uang dan jabatan agar menghentikan aksi mereka. Mereka ditawarkan insentif besar asalkan mau pindah daerah kerja di Palembang, Bengkulu, Padang, dan lainnya. Akan tetapi, mereka menolaknya. Begitu menolaknya, mereka pun dipecat. Anehnya, surat pemecatan tak diberikan ke mereka langsung, tetapi dikirim ke rumah masing-masing, dan dimasukkan melalui lubang-lubang di bawah pintu rumah.

Suasana tersebut sangat mencekam. Irma hampir di-'Marsinah'-kan. Ia diteror baik secara halus maupun cara kasar. Ada yang menelpon dirinya dan mengatakan, "Kamu mau jadi Marsinah kedua? Hahaha..." Ketika ia pulang malam dengan naik sepeda motor, tiba-tiba ada orang yang tak dikenalnya membuntutinya.

Irma dan delapan temannya menggunakan strategi tertentu. Mereka berpindah-pindah markas, dari satu hotel ke hotel lain, bukan hotel yang mewah, namun cukup menjadi tempat sementara mereka. Mereka berusaha menjaga diri agar tidak terlacak oleh aparat keamanan.

Irma dan timnya sebetulnya tidak memiliki kepentingan pribadi apapun, sehingga para karyawan mendukung mereka. Ia dan para karyawan kembali melakukan aksi demonstrasi menutup pelabuhan hingga tidak beroperasi. Kapal-kapal asing pun mengeluh. Presiden Gusdur turun tangan. Ia memerintahkan untuk mencabut surat pemecatan dan mengembalikan Irma dan teman-temannya ke posisi semula, sedangkan Presiden Direktur Pelindo diganti. Inilah kemenangan pertama bagi Irma dan timnya. Menurutny, bukan ini yang mereka harapkan, namun transparansi dalam privatisasi dan status para karyawan yang jelas. Termasuk apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Perjuangan Irma dan teman-temannya menolak privatisasi membuat dirinya kerap dipanggil sebagai pembicara tentang privatisasi, baik di radio-radio maupun di televisi.

Pengalaman Berpolitik

Eros Djarot mengundang Irma sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakannya. Ternyata pertemuan dan pembicaraan mereka berlanjut. Ia merasa 'nyambung' berdiskusi dengan Eros Djarot. Belakangan, Eros Djarot menjadi guru politiknya. Hingga suatu waktu, Eros Djarot mengusulkan untuk mendirikan partai politik agar mereka bisa bersuara dari dalam, dan tidak sekadar berkoar-koar dari luar. Kemudian mereka mendirikan PNI 127. Dalam perjalanannya, mereka berdiskusi kembali dan membentuk Partai Nasional Benteng Kedaulatan (PNBK). Ia didaulat menjadi ketua DPD PNBK di DKI. Sebagai Ketua DPD, ia merasa tidak sesuai karena dirinya "orang lapangan". Pada gilirannya, tahun 2004, ia diminta masuk ke DPP sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia disarankan maju menjadi calon anggota legislatif. Ia sudah menduga bahwa dirinya tidak akan berhasil, karena PNBK adalah partai baru. Dana yang dipergunakan berasal dari kantongnya sendiri. PNBK adalah partai yang memiliki visi nasionalisme, semangat, dan kejujuran yang tinggi. Pemilu legislatif 2004, mereka memperoleh jumlah suara sebesar 1,8 persen. Mereka berhasil mendapat kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten.

Karena kinerja Irma dilihat bagus, maka ia diminta menjadi Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Wilayah. Ia diberi tanggungjawab membentuk struktur partai di Sumatera. Berbekal dana Rp. 2 juta, ia berangkat ke Lampung dengan memakai mobil sewa. Ia melanjutkan perjalanan tugasnya membentuk struktur partai di Palembang sampai Padang. Tak jarang, ia menggunakan uang dari kantongnya sendiri.

Pemilu 2009, PNBK hanya mendapat 0,8 persen suara, dan ini mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Mereka memutuskan tidak akan mengikuti pemilu lagi. Waktu pun terus berjalan. Zulfan Lindan, Sekjen PNBK diajak oleh Surya Paloh mendirikan organisasi masyarakat Nasional Demokrat. Zulfan

memenuhi permintaan tersebut dengan syarat, bahwa yang menjadi wakilnya adalah Irma. Ketika itu, Zulfan menjadi Ketua Bidang Kebijakan dan Partisipasi Publik, dan Sekjennya adalah Irma. Irma berada di Cina untuk tugas kantornya waktu ormas Nasdem dideklarasikan. Pada akhirnya, ia mundur dari PNBK dan bergabung di ormas Nasdem.

Dalam perjalannya, ormas Nasdem berubah menjadi partai politik. Irma mendapat kepercayaan menggarap struktur partai di Sumatera Selatan dan Lampung. Ini terjadi tahun 2012. Setelah partai Nasdem terbentuk, ia dipercaya menjadi Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak. Lalu, partai Nasdem membentuk sayap partai bernama Liga Mahasiswa, Garda Pemuda, dan Garda Wanita Malahayati. Ia diberi tanggungjawab dan kepercayaan membentuk sayap partai, yaitu Garda Wanita Malahayati. Terbentuknya Garda Wanita Malahayati di 34 provinsi dan di tingkat kabupaten menjadi bukti kerja keras dirinya. Ia menjabat sebagai Ketua Garda Wanita Malahayati.

Tak berhenti sampai di situ, Irma dipercaya oleh Surya Paloh membentuk sayap buruh. Dalam pemilihan ketua sayap buruh, ia langsung ditunjuk sebagai ketuanya, karena dianggap mengerti dan 'mumpuni' dalam soal buruh. Sayap partai ini terbentuk di 24 provinsi. Sebuah prestasi yang membanggakan ditorehkannya, karena pembentukan sayap partai ini dilaksanakan mendekati Pemilu 2014. Waktunya sangat singkat, sekitar 8 bulan. Masa itu, ia berjuang dan bekerja keras. Selain mengurus pencalonan dirinya sebagai anggota dewan, ia harus mengurus Garda Wanita, Garda Buruh, termasuk perannya sebagai Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak di Partai Nasdem. Aktivitasnya sehari-hari bekerja di kantor hingga jam 17.00 wib, kemudian beraktivitas di Partai DPP Nasdem.

Dukungan Partai Politik Terhadap Perempuan Pemimpin

Peraturan perilaku kader (*code of conduct*) yang berlaku di partai Nasdem ialah, bila posisi suara berimbang antara kader

laki-laki dan perempuan, maka yang lebih diutamakan ialah kader perempuan. Ini untuk menghargai perempuan dan menyemangati mereka agar lebih banyak duduk di parlemen, karena perlu untuk penganggaran yang responsif gender.

Tak ada pemotongan resmi terhadap penghasilan anggota dewan. Kalaupun ada kegiatan partai yang membutuhkan dana, maka anggota dewan akan memberikan sumbangan sukarela.

Kebijakan partai Nasdem yang lain ialah tidak memperbolehkan anggota-anggota partainya melakukan kunjungan kerja yang bersifat studi banding. Kunjungan kerja yang diperbolehkan adalah pengawasan, sesuai dengan fungsi dewan. Ini dilakukan oleh partai Nasdem demi efisiensi dan efektivitas kerja anggota dewan.

Persiapan Menjadi Pemimpin

Irma mencalonkan diri menjadi anggota dewan dari Partai Nasdem tahun 2014. Ia diminta langsung oleh Surya Paloh, sebagai Ketua Umumnya. Ia mewakili daerah Sumatera Selatan dan minta ditempatkan di nomor urut 1, karena meyakini kapasitas dirinya. Meskipun orang Padang, namun keluarga besar ayah Irma ada di Sumatera Selatan. Di samping itu, ia juga dibesarkan di Palembang. Dalam hal ini, ia merasakan perjuangan yang sangat berat mengenai perpolitikan. Ia menghadapi tantangan besar. Ia dizalimi dan difitnah lawan-lawan politiknya, hingga membuatnya menangis. Ia menyadari bahwa perjuangannya sebagai perempuan pemimpin sangat berat.

Sebagai partai baru dan orang baru, ia merasakan tekanan dalam proses pencalonannya. Daerah pemilihannya sendiri cukup luas, terdiri atas 10 kabupaten. Setahun sebelum masa kampanye, ia turun ke Palembang. Itu dalam kapasitasnya sebagai anggota ormas Nasdem, bukan calon anggota dewan. Proses pengenalan dirinya ke konstituen dilalui dengan bersemangat, meskipun demikian melelahkan. Mulai Senin hingga Kamis, ia bekerja, hanya cuti pada Jumat. Kamis malam, ia berangkat ke Palembang memakai mobil

untuk berkampanye dan membina basis massa. Ini dilakukannya efektif selama tujuh bulan. Ia mendirikan posko di antara 10 kabupaten daerah pemilihannya. Ia menyewa dua paviliun, satu untuk tim kampanye yang digaji per bulannya (seorang manajer tim dan dua asistennya). Satu paviliun, ia pakai untuk tempat penyimpanan atribut-atribut kampanye, seperti kaos, bendera, dan lainnya. Dalam berkampanye, ia berusaha menjelaskan mengapa dirinya pantas dipilih. Ia tidak mempergunakan politik uang. Alat kampanyenya tidak banyak, namun efektif. Alih-alih menggunakan kaos sablon yang bergambar orang dan nomor urut calon, ia malah memilih batik atau kaos berkerah yang bisa dipakai untuk pesta.

Saat turun ke lapangan, Irma selalu ikut serta. Ia tidak pernah membiarkan timnya turun sendirian ke lapangan. Terlepas dari jumlah massa, apakah 25 orang, 50 orang, atau 100 orang, ia selalu terlibat. Manajer timnya bertugas mengumpulkan massa kemudian ia sendiri yang memperkenalkan dirinya ke masyarakat. Pengenalan yang dilakukannya berfokus kepada masyarakat. Peristiwa yang lucu pernah ia alami. Ia menyumbang dana untuk mesjid di daerah pemilihannya, sebagai amal. Ia secara tegas menyatakan tak ingin disangkut-pautkan dengan upaya menjaring suara. Beberapa warga mendatanginya dan berkata, “Bu, mengapa menyumbang ke mesjid? Suara kan ada pada kami. Sumbang kami aja!” Mendengar pernyataan itu, ia kaget. Ia menjelaskan, bahwa menyumbang ke mesjid bukan untuk suara, melainkan amal. Ia tidak membeli suara warga, sebab jika terpilih nantinya, ia tak akan datang lagi ke daerah pemilihan, karena telah membeli suara mereka.

Irma memperoleh 69.000 suara. Dari 9 kursi yang tersedia, ia berada di posisi keenam. Secara suara, ia berada di urutan ketiga. Begitu mengetahui dirinya menang, ia tetap memantau formulir C1 guna mengamankan suaranya, sehingga tak dicuri. Ia mengatur strategi pengawasan suara. Ia berada di daerah pemilihan selama 10 hari untuk memantau suaranya. Ia bersyukur perusahaannya memberikan cuti tambahan 6 hari agar fokus terhadap pemantauan suara pasca Pemilu. Perusahaannya memberikan izin karena melihat

kinerjanya yang baik selama ini dan bangga. Mereka melihat adanya karyawan perusahaan yang menjadi anggota DPR RI.

Praktik Kepemimpinan di DPR RI

Irma mengaku bahwa pendapatannya dari perusahaan cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya. Yang membuatnya berjerih lelah dalam membangun bangsa melalui jalur anggota dewan, karena melihat carut-marutnya pemerintahan. Banyak pernyataan sinis dan tak baik muncul dari masyarakat. Kemudian ia berpikir untuk mewarnai pemerintahan dengan tak hanya berkoar-koar dari luar, namun terlibat langsung dalam mengelola negara.

Yang membedakan kepemimpinan perempuan dengan kepemimpinan lainnya, menurut Irma, perempuan yang masuk dalam politik memiliki kapabilitas, transparansi dan akuntabilitas. Tantangan yang dihadapi sebagai perempuan pemimpin ialah ketidakpercayaan kalangan laki-laki. Saat hendak mencalonkan diri, ia kurang diperhitungkan daripada calon yang berjenis kelamin laki-laki serta mantan gubernur. Ia menjawab tantangan itu dengan kerja keras. Akhirnya, ia terpilih sebagai anggota DPR RI, sedangkan calon yang diunggulkan tidak terpilih. Ia bahkan dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI.

Tantangan lain yang Irma hadapi membuatnya lelah secara fisik dan psikologis, bahkan nyaris membuatnya menyerah. Dukungan sahabat-sahabat dan anak-anaknya membangkitkan semangat juangnya kembali guna melayani masyarakat. Sekarang, ia menjabat Ketua Umum Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia. Ia kerap melakukan sidak langsung menyelesaikan perkara PHK buruh yang simpang siur. Untuk perkara demo buruh yang tiada habisnya, ia melakukan pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan-perusahaan untuk mencapai kesepakatan. Setelah ia turun tangan, aksi demo berhenti dan solusi pun tercapai. Ini prestasi yang membanggakan baginya, karena orang yang terancam PHK kemudian bekerja kembali. Orang yang tak memperoleh haknya karena kezaliman, akhirnya mendapatkan haknya. Baginya, inilah kebahagiaan yang tak tergantikan.

Bersama Komisi IX, Irma mendorong agar tenaga kerja Indonesia di Jepang bisa bekerja dalam jangka waktu lima tahun. Terdapat puluhan ribu tenaga kerja Indonesia di Jepang. Sebelumnya, tenaga kerja Indonesia dianggap magang dengan jangka waktu tiga tahun. Ketika kontrak selesai, mereka harus pulang dan diganti dengan tenaga kerja yang baru. Perpanjangan waktu bagi tenaga kerja yang sudah menyelesaikan tiga tahun kerja, tidak terjadi. Perjuangannya bersama Komisi IX, akhirnya disetujui oleh Jepang.

Pada Pileg 2014 lalu, Irma menjadi anggota Tim Sembilan yang memverifikasi calon-calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Sebagai Ketua Garda Buruh dan Garda Wanita Malahayati, ia memperjuangkan buruh dan perempuan untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Ia mendapatkan tentangan dari orang-orang yang menyepelkan buruh dan perempuan, yang menganggapnya tak perlu menjadi calon anggota legislatif. Apalagi, mereka dianggap tak mempunyai uang. Namun, ia tetap memperjuangkan mereka dengan alasan untuk memberikan ruang ekspresi politik kepada buruh dan perempuan. Perjuangannya menempatkan kalangan perempuan di pemilu adalah aksi yang luar biasa berat.

Irma yang berada di Komisi IX memiliki 'Rumah Aspirasi' di Palembang, Sumatera Selatan. Di rumah aspirasi yang ia biayai sendiri inilah, semua program masyarakat dibuat. Setiap reses, sesuai dengan kebijakan Partai Nasdem, harus ada pertanggungjawaban yang jelas tentang program apa yang dibuat, siapa yang hadir, berapa orang yang hadir, foto kegiatan, stempel tempat mengadakan acara, dan lainnya. Laporan ini disampaikan ke Fraksi dan ke Sekjen Partai Nasdem.

Salah satu program yang Irma selenggarakan yaitu pengobatan gratis untuk masyarakat di daerah pemilihan. Ia melakukan kegiatan pemeriksaan dini kanker serviks di 10 kabupaten untuk mengetahui apakah perempuan terkena penyakit ini. Ini salah satu wujud perhatiannya kepada kaum perempuan, khususnya di daerah yang menjadi daerah pilihannya. Program lain yang ia

wujudkan ialah sosialisasi kepada TKI *unprocedural*. Bekerjasama dengan BKKBN di daerah tersebut untuk melakukan sosialisasi tentang penghapusan perkawinan anak, kampung KB, dan sebagainya. Ia pun mengunjungi korban banjir dan membagikan sembako serta bibit tanaman. Di Ogan Komering Ulu Timur, Palembang, ia memberikan dua mesin pompa penyedot air untuk mengalir sawah penduduk. Saat itu musim kemarau, sekitar 100 hektar sawah penduduk tidak mendapatkan air, sedangkan letak sungainya cukup jauh. Akibatnya, penduduk hanya bisa panen sekali setahun, padahal biasanya panen dua kali setahun. Setelah pompa dipergunakan oleh penduduk, maka air mengalir deras membasahi 50 hektar persawahan penduduk.

Pada 13 April 2016 lalu, Irma baru pulang dari Singapura menjadi narasumber dalam acara seminar RUU Pekerja Luar negeri di *Indonesia Family Network*. Dari tiga anggota DPR RI yang diundang, hanya ia yang datang dengan biaya sendiri. Dengan senang hati, ia meluangkan waktu tiga hari mengikuti seminar tersebut. Demi menghadiri seminar itu, ia membatalkan kunjungan kerjanya yang harus dilakukannya waktu itu. Ia berupaya menunjukkan keberpihakannya kepada kaum perempuan. Ia juga menghadiri aksi demo yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kendeng, yang memasung kaki mereka dengan semen, sebagai bentuk protes terhadap pabrik semen yang akan didirikan di daerah mereka. Meskipun tidak menangani langsung isu itu, namun tak menghalangi niatnya menunjukkan kepedulian dan keberpihakan kepada kaum perempuan.

Dalam pekerjaannya, Irma berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Harta kekayaannya ia laporkan. Kegiatan reses selalu terdokumentasi secara baik dan ada laporannya. Pekerjaan yang mengharuskannya ke luar negeri, selalu diimbangi dengan laporan kerja tersebut.

Tanggapan Terhadap Kepemimpinan Irma Suryani Chaniago

Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jala PRT, mengenal Irma sejak beberapa tahun lalu, hingga berlanjut menjadi pertemanan yang lebih akrab sejak Irma menjabat anggota DPR, di Komisi IX. “Saya mengapresiasi Ibu Irma, ya. Dia memimpin serikat buruh, artinya dia punya *concern* pada isu buruh. Untuk RUU PRT-pun, dia ikut memperjuangkannya, meski itu tidak mudah di Komisi IX,” ujar Lita.

Lita lebih jauh menjelaskan, bahwa Irma juga mendorong Fraksi Nasdem untuk mengusulkan RUU PRT sebagai usulan dari Fraksi Nasdem, termasuk bagaimana mengawalinya di Badan Legislatif. Lita menambahkan, bahwa Irma biasanya memantau dan menginformasikan perkembangan terbaru tentang RUU PRT ini, apakah masuk menjadi prioritas Program Legislasi Nasional atau tidak.

“Ibu Irma orang yang mudah diajak komunikasi. Tidak berjarak. Mudah sekali berkomunikasi dengannya. Ia tidak membatasi diri. Kami sendiri juga tidak pernah merasa sungkan. Kalau kami aksi, kadang Bu Irma menawarkan bantuan,” ujar Lita sembari tertawa.

Lita melanjutkan, “Dia juga orang yang tangguh apalagi kalau dia sudah punya *stand point*. Meskipun ada perbedaan juga dengan beliau, namun beliau membuka ruang perbedaan tersebut. Artinya, walaupun ada perbedaan, bukan berarti tidak bisa bertemu. Ini juga hal yang kami apresiasi dari Ibu Irma.”

Dibandingkan dengan beberapa koleganya, termasuk yang perempuan yang duduk di Komisi IX, justru Irma menyuarakan RUU yang menjadi pangkal dari perwujudan ketidakadilan terhadap perempuan, jelas Lita. “Kami berharap Ibu Irma berlanjut sebagai anggota Dewan, sehingga kami tidak kehilangan kawan dan pendukung yang memperjuangkan kawan-kawan pekerja, termasuk perempuan yang bekerja di rumah tangga”, ungkap Lita ketika ditanya apa harapannya terhadap kepemimpinan Irma.





II. MIRYAM S. HARYANI

(anggota DPR RI, Jakarta)

Biografi Singkat

Miryam S. Haryani lahir di Indramayu, Jawa Barat, 1 Desember 1973. Ia mendapat Magister dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan dari STIAM, tahun 2003. Selama dua periode (2009-2014; 2014-2019), ia menjadi anggota DPR RI dari Partai Hanura.

Miryam S. Haryani, akrab dipanggil Yani, perempuan cerdas yang senang berorganisasi. Ia menjadi ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) ketika di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Organisasi kepramukaan pernah ia ikuti. Memasuki kelas 2 SMA, ia aktif di Forum Komunikasi Putera Puteri Indonesia di tingkat Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Yani meneruskan kuliah di Jakarta sembari bekerja. Ia menghabiskan waktunya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Ia memang tidak berkuliah di UI, tetapi menikmati berdiskusi tentang isu-isu pergerakan, ketokohan, termasuk masalah perempuan. Masa-masa itu, ia mengidolakan Siti Aisyah, tokoh politik dari Partai Persatuan Pembangunan. Di matanya, sosok Siti Aisyah adalah perempuan muslim yang cerdas, berbicara lantang, berani, dan moderat.

Pergerakan mahasiswa, ketika Yani kuliah, murni mendobrak kesewenangan pemerintahan dan berpihak kepada masyarakat. Puncaknya tahun 1998, terjadi reformasi besar-besaran, ia dipercaya sebagai Ketua Urusan Logistik mendukung aksi demonstrasi di Senayan. Ia mengakui bahwa bukan dirinya yang berdemonstrasi, namun merasa bangga menjadi bagian dari penumbang rezim otoriter Soeharto, dengan peran yang dipercayakan kepadanya mendistribusikan makanan di Senayan.

Pengalaman Berpolitik

Yani fasih berbahasa Inggris dan melanjutkan kuliahnya meraih Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan. Salah satu teman kuliahnya ialah Abu Bakar, mantan Ketua DPRD DKI, dan Djafar Badjeber. Mereka aktif di PPP dan mengajak Yani terjun ke dunia politik. Bagi Yani, ini menjadi kesempatan emas untuk belajar, apalagi sebelumnya, ia mengidolakan Siti Aisyah, pentolan dari PPP.

Tahun 2000, Djafar Badjeber mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR), yang ketuanya ialah Zainudin MS. Jafar mengajak Yani bergabung. Yani memutuskan untuk masuk ke PBR dan diterima. Waktu itu, ia menjabat sebagai Wakil Sekjen PBR. Mereka memutuskan mempercayakan jabatan tersebut kepada Yani, karena latar belakang pendidikannya sebagai magister dalam ilmu politik dan pemerintahan, termasuk kompetensi kepemimpinannya yang handal dalam menggerakkan massa.

Seiring berjalannya waktu, Zainal Arifin dari PBR terpilih menjadi Wakil Ketua di DPR RI. Melihat potensi Yani, tahun 2004, Zainal Arifin mengajaknya bergabung menjadi staf ahli bidang Kesejahteraan Rakyat. Berbekal minat dan kecintaan terhadap dunia sosial dan pemikiran, ia pun menerima tawaran tersebut. Meskipun tidak permanen, namun ia berkontribusi dalam memberikan ide-ide yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Di sini, ia kian mengenal seluk-beluk dunia parlemen. Sebelumnya, di tahun yang sama, ia mengikuti bursa calon anggota legislatif mewakili PBR, namun tidak terpilih.

Pekerjaan Yani sebagai staf ahli berlangsung 3 bulan. Dalam waktu singkat, ia memahami dunia perpolitikan dan pengalaman di parlemen. Tahun 2004, ia ditarik PBR menjadi Sekjen Suara Perempuan Reformasi, yaitu organisasi sayap PBR. Di sini, ia belajar dan berkarya maksimal. Ia belajar bagaimana membentuk kepengurusan, merekrut anggota yang isinya perempuan semua, mengelola waktu, dan sebagainya.

Tahun 2006, berlangsung pemilihan Ketua Umum Suara Perempuan Reformasi. Yani dicalonkan menjadi Ketua Umum, namun ia kurang berminat. Alasannya, masih ada kerinduannya bergabung dengan partai nasionalis. Ia sempat vakum dari organisasi politik selama setahun. Ia lebih berfokus pada bisnis yang ditekuninya.

Tahun 2007, seorang pentolan dari PBR bergabung ke Partai Hanura, dan mengajak Yani juga. Meskipun ia sempat bimbang, karena ikut menumbangkan tentara pada reformasi 1998, akhirnya ia memutuskan untuk bergabung, karena melihat ide reformasi yang diusung oleh Partai Hanura. Ia mantap mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui Partai Hanura. Ia pun mendaftar ke Partai Hanura, dan saat itu usianya 32 tahun. Ia mengisi formulir, mengikuti rekrutmen, dan serangkaian tes, termasuk wawancara. Dua orang jenderal mewawancarainya bertanya mengenai alasannya bergabung dengan Partai Hanura; tentang visi misi, dan lainnya.

Melihat pengalaman Yani sebelumnya di PBR, ia direkrut dan ditempatkan Partai Hanura sebagai Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu. Ia bertanggung jawab merancang strategi kemenangan Pemilu. Tugas ini cukup berat karena ia harus jeli melihat peta politik di tiap wilayah di Indonesia. Ia juga dipercaya menjadi anggota perumus AD/ART Partai Hanura. Melihat keseriusan Partai Hanura, ia terpacu dan bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya. Akibatnya, bisnisnya sempat ia tinggalkan selama delapan bulan. Ia menghabiskan waktunya hampir setiap hari di Partai Hanura.

Tahun 2009, Yani yang bakat kepemimpinannya menonjol sejak SMP, diminta mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Ia menyanggupi dan minta ditempatkan di daerah pemilihan yang pernah dijajaknya, tahun 2004. Ia ditempatkan di Jabar 8 yang meliputi Indramayu dan Cirebon, dengan nomor urut 1. Hampir semua pesaing dari partai lain yang menempati nomor urut 1 adalah laki-laki. Ini sempat menciutkan nyalinya, mengingat

tahun 2009 masih memakai sistem nomor urut. Namun demikian, ia memutuskan berkompetisi dengan bersemangat. Beberapa waktu menjelang Pemilu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemenang Pemilu berdasarkan suara terbanyak. Keputusan ini menggeliatkan semangatnya bertarung habis-habisan. Ia ingin membuktikan bahwa perempuan mampu. Baginya, sistem suara terbanyak justru mendorong semangat juang berkompetisinya.

Sesuai dengan minatnya sejak kuliah, yaitu tentang perempuan, Yani mengusung tema perempuan dalam kampanyenya. Ia melakukan kampanye *door to door* ke rumah ibu-ibu. Ia membongkar cara pandang ibu-ibu di daerah pemilihannya yang biasanya menyerahkan keputusan memilih kepada suami mereka. Ia menanamkan pandangan bahwa perempuan mampu mengendalikan situasi. Ini tidaklah mudah, karena perjuangannya berada di tataran cara pandang yang sulit diubah.

Berbicara tentang isu perempuan, Yani bertekad mengangkat harkat martabat perempuan Indramayu. Ia ingin memotivasi mereka untuk maju mencapai potensi diri secara optimal dan mengurangi angka perkawinan anak. Melihat pertarungan yang cukup sengit di daerah pemilihannya, di mana politisi kawakan pun berkompetisi, maka ia menggunakan cara di luar kebiasaan berkampanye selama ini. Ia tidak ingin memakai politik uang. Ia membuat kampanye akbar yang “serba perempuan”. Yang memimpin orasi, panitia, juru kampanye, pemain band, tenaga pengamanan dan tenaga kesehatan, semuanya perempuan. Dari target 15.000 orang peserta, yang hadir justru 35.000 orang. Pencapaian ini membuat dirinya sangat bangga dan puas karena mampu mengorganisir acara besar yang memecahkan rekor MURI, sebagai kampanye kaum perempuan terbesar di Indonesia.

Dukungan kalangan perempuan menjadi bagian dari perjuangan Yani, dan mengantarkannya ke Senayan, dengan jumlah 99.698 suara. Melihat masalah Indonesia di bidang

pemerintahan, maka ia putusan masuk di Komisi II, yang membidangi Pemerintahan dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Memasuki tahun 2014, Yani kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan, karena menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang ingin ia selesaikan. Ia sempat kecewa karena ditempatkan di nomor urut 2. Akan tetapi, ia terpilih kembali di pemilu lalu. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa ia memang kompeten dan dipercaya masyarakat menduduki kursi wakil rakyat.

Pada Munas Partai Hanura, Yani ditempatkan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu. Ini membuatnya, sebagai petahana, sedikit ‘memberontak’. Ia merasa memiliki potensi, kompetensi, dan pengalaman. Namun, mengapa posisinya tidak naik? Ia berharap bisa menduduki Posisi Ketua. Akan tetapi, keputusan itu tidak mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Munas Partai Hanura yang lalu di Solo, ia terpilih sebagai Ketua Pemenangan Pemilu.

Praktik Kepemimpinan di DPR RI

Dikenal karena kemimpinannya yang menonjol, Yani menganggap bahwa kepemimpinan perempuan diperlukan di belahan dunia mana pun. Tanpa perempuan, tak lengkap rasanya kepemimpinan itu. Bagai sayur tanpa garam, demikian Yani mengibaratkan, pentingnya kepemimpinan perempuan.

Geliat perempuan di posisi kepemimpinan di Era Jokowi, menurut Yani, pertanda yang baik. Banyak perempuan menjadi menteri di Kabinet Jokowi dan menjadi Panitia Seleksi KPK. Ini harus dimaknai sebagai momentum bagi kiprah perempuan. Perempuan bisa dan mampu berkecimpung dalam berbagai segi.

Yani membuktikan bahwa kualitas perempuan pemimpin telah menorehkan prestasi penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Salah satu prestasi Yani selama menjabat di Komisi II DPR RI yaitu

mendorong dan memastikan terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan dalam Pileg. Ia mengawal kebijakan afirmasi tersebut mulai dari rancangan UU, sidang-sidang paripurna, hingga pengesahannya. Ia betul-betul mencurahkan tenaga dan pikirannya demi mencapai afirmasi tersebut. Ia mengajak anggota legislatif perempuan lainnya yang ada di Senayan, seperti Eva Kusuma Sundari dan lain-lain, untuk sama-sama mendukung terpenuhinya keterwakilan itu. Ini merupakan sejarah yang penting, karena menjadi landasan bagi perempuan Indonesia ke depan berkiprah dalam politik.

Kiprah Yani yang selalu berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, termasuk perempuan, menggugah nurannya memperjuangkan UU Pekerja Rumah Tangga (PRT). Menurutny, proses RUU PRT memakan waktu yang lama. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai UU PRT, maka ia memanggil staf ahli untuk meng-kaji dan mendiskusikan itu. Ia merasa terpanggil untuk mengawal UU PRT, di mana mayoritas PRT adalah perempuan. Mereka memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Banyak kekerasan terus terjadi terhadap PRT. Banyak tindak kekerasan terhadap PRT yang dilaporkan kepadanya. Akhirnya, ia meminta Fraksi Hanura menjadi garda terdepan untuk mengawal RUU itu, meskipun tidak membidangnya (tidak di komisi yang membidangi PRT). Baginya, PRT penting untuk diperjuangkan. Ia akan mengawal RUU PRT. Sering berhubungan dengan perempuan, menyebabkan dirinya berjerih lelah menjadi garda terdepan mengawal dan menggolkan RUU PRT ini.

Yani memanggil anggota Partai Hanura yang ada di Komisi IX yang membidangi masalah itu untuk berdiskusi. Ia memanggil Jala PRT dan Komnas Perempuan berdiskusi dan mendengarkan pendapat mereka serta mengerti duduk perkara yang sebenarnya. "Intinya, PRT ingin prinsip yang berkeadilan", ujarnya bersemangat. Sekarang, RUU PRT yang dikawalnya ada di Badan Legislatif, dalam tahap lobi-lobi fraksi.

Salah satu upaya yang dilakukan Yani untuk menggolkan

RUU PRT bersama dengan Komnas Perempuan ialah melakukan lobi-lobi fraksi. Ia sangat berharap RUU PRT bisa berhasil menjadi UU.

Prestasi Yani lainnya terlihat pada kinerjanya di Partai Hanura. Periode 2009-2014, hanya tiga perempuan dari Partai Hanura di DPR RI, Senayan. Jumlah ini cukup mengecewakan, namun menambah semangatnya maju sebagai perempuan pemimpin. Ia melihat kurangnya geliat perempuan di Partai Hanura. Atas inisiatif sendiri, ia meminta Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura, membuat organisasi sayap perempuan, namun membidik kalangan muda.

Permohonan itu disetujui oleh Wiranto. Ia merancang konsepnya. Fokus organisasi sayap ini ialah perempuan berusia 17-40 tahun. Ia menilai sebetulnya perempuan banyak yang ingin terjun ke dunia politik, tetapi tidak memiliki wadah sehingga mengalami kesulitan. Sementara itu, partai politik memerlukan kaderisasi. Inilah latar belakang berdirinya Srikandi Hanura pada 2011.

Yani merekrut perempuan dari beragam profesi, seperti dosen, artis, model, dan sebagainya. Ia mewadahi mereka berpartisipasi membangun Indonesia ke depan melalui Srikandi Hanura. Terkumpul 32 perempuan dari beragam profesi. Ia pun mendeklarasikan berdirinya Srikandi Hanura. Tanpa membayar massa, ia menghubungi Karang Taruna-Karang Taruna di Jakarta untuk datang di Deklarasi Srikandi Hanura. Dengan kapasitas 1000 orang, ternyata melebihi perkiraan, yang datang 4.000 orang, sehingga banyak yang duduk lesehan. Ia berpidato dan memotivasi perempuan yang hadir untuk maju meraih cita-citanya. Dalam setahun, ia berhasil membentuk kepengurusan Srikandi Hanura di 34 provinsi.

Kerja awal Srikandi Hanura ialah merespon mahalnya harga cabai, tahun 2011. Pernyataan menteri saat itu adalah: "Jangan makan cabe!" Pernyataan ini membuat Yani geram, karena seharusnya menteri memberikan solusi yang lebih tepat. Ia

pun membuat pasar murah cabai di Taman Mini Indonesia. Ia mendatangi petani cabai di Bogor dan memasarkan cabai petani ke masyarakat. Dengan menggandeng Srikandi Hanura, mereka menyediakan paket-paket dengan ukuran 0,5 kilogram. Dalam waktu dua jam, operasi pasar berlangsung, semua cabai terjual habis. Melalui kegiatan ini, petani terbantu dan masyarakat juga.

Prestasi demi prestasi Yani torehkan, tak berarti bahwa praktik kepemimpinannya berjalan mulus tanpa hambatan. Ia menemui sejumlah tantangan, tentu saja. Salah satunya, kuatnya budaya patriarki di Indonesia. Namun, ia tidak pasrah dengan kondisi ini. Ia membuktikan bahwa dirinya setara dengan laki-laki melalui kompetensi dan kepemimpinannya.

Menurutnya, perempuan perlu mendapat kepercayaan menjadi pemimpin di komisi-komisi yang 'lekat' dengan kesan laki-laki, seperti Komisi Pertahanan. "Perempuan jangan hanya ditempatkan di Komisi Kesehatan atau Sosial!" ujarinya. Ia sendiri merasa tertantang semangatnya bila ditempatkan di bidang-bidang yang 'asing' bagi perempuan, seperti pertahanan, politik dalam negeri, keuangan, dan lainnya.

Yani berharap agar perempuan menempati posisi-posisi yang selama ini dipegang oleh laki-laki. Itu akan tercapai apabila perempuan terus meningkatkan kapasitas dirinya. Menurutnya, senantiasa banyak belajar dan berbagi pengalaman adalah penting. Kemampuan hanya akan dimiliki, bila perempuan mau terus belajar. Jangan merasa pintar dan tidak mau belajar dari yang senior. Ia tipe orang yang senang mendengarkan orang lain.

Ia menyukai menghabiskan banyak waktu untuk bergaul dengan orang-orang yang pintar dan cerdas, karena bisa banyak menyerap ilmu. "Kualitas orang terlihat dari cara berpikirnya," ucapnya. Itu sebabnya, ia memperluas cakrawala pemikirannya dengan bertemu banyak orang.

Masyarakat umum perlu mengetahui kiprah perempuan pemimpin agar terinspirasi dan mengikuti jejak mereka. Yani

mengomunikasikan kerjanya setiap hari dengan mempergunakan media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, termasuk media cetak. Kegiatan-kegiatan rapat, temu warga, dan lainnya selalu dikabarkan melalui *Instagram*. Yang ia sampaikan ke publik ialah aktivitas peninjauan ke kantor *Batik Air*. Jika dapat menangannya, maka diselesaikannya sendiri. Jika tidak, maka ia meminta bantuan timnya. Ia menikmati perannya sebagai ibu dan politisi yang berjuang menyejahterakan masyarakat.

Tanggapan Terhadap Kepemimpinan Miryam S. Haryani

Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jala PRT, membenarkan aktivitas keterlibatan Yani dalam advokasi RUU PRT. Menurutnya, Yani merespon dengan baik RUU tersebut dan berinisiatif menyelenggarakan diskusi terbatas untuk membahasnya dalam membangun pemahaman bersama dan merancang aksi ke depan. Lita menambahkan, bahwa Yani berkomitmen dalam mendukung dan memperjuangkan RUU PRT, dengan mengajak satu-satu anggota Komisi IX dari Partai Hanura supaya menaruh perhatian terhadap RUU PRT.

“Dia banyak mendengarkan. Dia tidak menyetrir arah RUU PRT. Ibu Yani banyak bertanya dan mempersilakan peserta diskusi untuk memberi masukan dan mengelaborasi RUU PRT. Ibu Yani ebagai perempuan satu-satunya di Fraksi Hanura memperjuangkan betul bagaimana perempuan berperan dan bisa memimpin Fraksinya. Salah satunya, dia berinisiatif dan meminta agar dilibatkan dalam RUU PRT”, ujar Lita.

Lebih lanjut, Lita menambahkan, “Apa yang dilakukan Ibu Yani adalah contoh yang baik bagaimana perempuan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memperjuangkan isu perempuan, termasuk PRT. Kami mengapresiasi Ibu Yani, karena terlibat dalam memperjuangkan RUU ini, meski tidak di bawah naungan komisinya. Saya tahu RUU ini sulit, tapi Ibu Yani justru mengambil inisiatif dan mendukung RUU PRT yang bias gender”.

Lita, bersama dengan temannya di Jala PRT yang bernama Panca, memiliki kesan positif terhadap Yani. “Orangnya baik dan ramah, rendah hati, tidak mengatur dan banyak mendengar. Ia juga tidak menganggap dirinya penting karena menduduki posisi anggota DPR. Ia tidak berjarak. Ia juga responsif ketika kita mengirim pesan, maka biasanya ia akan langsung membalasnya. Jarang sekali anggota DPR yang seperti itu”, kata mereka.





III. AGUSTIN POLIANA

(anggota DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur)

*“....Namun kekuasaan itu adalah kekuasaan yang harus
menyejahterakan masyarakat.*

*Ini harus disampaikan ke masyarakat, jadi tidak
mempergunakannya untuk memperkaya diri sendiri dan
melupakan rakyat. Merebut kekuasaan, itu sepenuhnya untuk
kemakmuran rakyat!”*

Biografi Singkat

Agustin Poliana lahir di Surabaya, 18 Agustus 1971. Ia menjadi anggota DPRD kota Surabaya periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister Komunikasi dari Universitas DR. Sutomo.

Agustin Poliana menjadi Ketua Badan Anggaran di DPRD Kota Surabaya. Selama empat periode, sejak 1999, ia duduk sebagai anggota dewan. Sebelum terjun ke dunia politik, sehari-harinya ia adalah ibu rumah tangga. Tahun 1996, ia bergabung dengan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Saat itu, PDI sedang melakukan persiapan Kongres Luar Biasa (KLB). Simpatisan PDI tersebut menamakan dirinya pro-Megawati (ProMeg). Kongres PDI yang berlangsung di Surabaya kala itu sangat meriah.

PDI sedang digoyang oleh pemerintahan Orde Baru saat itu. Ia pun terlibat dalam demo melawan pemerintahan Orde Baru yang tidak mengakui, bahwa kongres telah menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDI. Orde Baru tidak menghendaki Megawati menduduki posisi itu. Sebagai simpatisan ProMeg ia bergabung dengan ratusan hingga ribuan massa, yang di antaranya ibu-ibu yang muda usia.

Ketika itu tak banyak perempuan yang berani ikut berdemonstrasi besar-besaran, hanya ia salah satunya. Tahun 1996-

1997, ia turun ke bawah sebagai upaya menghadang PDI kelompok Suryadi agar tidak bekerja di akar rumput. Dalam demo-demo penghadangan itu, lawan Agustin bukan hanya dari internal PDI, melainkan dari tentara juga. Di Gresik, ia malah ditangkap dan dipukuli oleh aparat keamanan. Waktu itu, ia sedang mengandung anaknya yang kedua. Demo itu untuk menolak kehadiran Jimmy Arianto, anggota DPP PDI Jawa Timur yang ingin berkonsolidasi di Gresik. Saat itu, banyak demonstran yang mengalami kekalahan karena tentara membawa senjata.

Menurut Agustin, itulah kehebatan perempuan. Simpatisan ProMeg mendapat dukungan masyarakat luas, karena yang dilakukan adalah menegakkan kebenaran. Ketika turun ke jalan, mereka hanya berbekal tekad karena tak memiliki apa-apa. Kaos ProMeg yang dibeli oleh simpatisan menjadi bentuk dukungan kepada gerakan tersebut. Uang hasil pembelian kaos dipergunakan untuk berdemo, membeli minum, dan makanan. Ia merasa heran karena tanpa dikoordinir masyarakat yang simpati mengirimkan makanan kepada para simpatisan. Pada 1996-1997 tersebut, ia tak meminta apapun dari masyarakat. Masyarakat memberikan yang maksimal kepada perjuangan itu, meskipun tak berbentuk materi. Di Surabaya 'mimbar bebas' dilakukan secara bergiliran setiap malam, waktu itu. Yang mereka lakukan ialah penolakan-penolakan terhadap sistem Orde Baru.

Pemilu 1997, Megawati selaku ketua umum PDI tidak mempergunakan hak pilihnya dan menginstruksikan kepada seluruh simpatisan dan jajarannya sampai ke bawah tidak memilih. Kala itu, semua orang mengembalikan surat suaranya. Dengan Reformasi 1998, Agustin berkomitmen terhadap partai dan berjuang untuk Pemilu 1999. Pasca Reformasi, PDI menjadi PDIP melalui kongres di Bali. Untuk kongres tersebut, dana mengalir tanpa diminta. Semua peserta kongres datang ke Bali. Isu yang berkembang ialah adanya 'ninja'. Di Banyuwangi, saat rombongan simpatisan datang malam hari, bukannya di serang oleh ninja atau santet, malah masyarakat mengantarkan rombongan ke

perbatasan dan menyeberang ke Bali. Agustin ke Bali tanpa bekal apapun, hanya dukungan dari banyak orang. Ada pengusaha yang membantu membuat kaos ProMeg yang 'laris' dijual. Bukan hanya di Blitar, tetapi di mana pun, kaos-kaos yang harganya yang mahal itu laris dijual, dan banyak peminatnya. Masyarakat yang bersimpati berebut membeli kaos-kaos yang ada. Tiba di Bali, hal yang sama pun terjadi, yaitu banyak orang berjualan kaos ProMeg.

Kongres selanjutnya berlangsung tahun 1998, dan kemudian diselenggarakan Pemilu 1999. Pemilu ini, PDIP mengalami 'ledakan' dukungan suara di luar prediksi yang ada. Sistem pemilunya bersifat tertutup. Teman-teman Agustin mendorong agar dirinya masuk dalam kepengurusan partai dan mengonsolidasi partai dengan membentuk kepengurusan partai hingga ranting dan anak ranting. Ia diharapkan menjadi Pengurus Anak Cabang. Anak Cabang adalah kepengurusan partai di tingkat Kecamatan. Kepengurusan ini tepatnya berada di Krembangan, Kota Surabaya. Pemilu 1999, ia mendapat nomor urut antara 16-17. Ia satu-satunya perempuan dari 22 calon anggota legislatif yang berhasil lolos. Dari 22 kursi yang diperoleh PDIP di DPRD Kota Surabaya, ia satu-satunya anggota legislatif perempuan. Posisi ini tak pernah diimpikannya sebelumnya. Selama ini yang ia ketahui hanyalah mengumpulkan masyarakat membentuk kepengurusan ranting dan anak ranting partai. Ia melakukannya mulai pukul 4 sore kemudian pulang pukul 3 dini hari, setiap harinya. Anak-anaknya tak sempat diurusnya.

Setelah ia terpilih, ada kejadian yang di luar prediksinya. Sehari setelah namanya diumumkan menjadi anggota DPRD Kota Surabaya, ketika bangun tidur dan menonton teve, ternyata ia telah didemo masyarakat. Para pendemo menganggap Agustin tak layak menjadi anggota dewan. Demo ini bermula dari internal partainya, tepatnya di Kecamatannya sendiri. Demo ini digerakkan oleh oknum tertentu supaya ia turun, karena dianggap perempuan tidak pantas menduduki kursi legislatif. Kala itu, ia merasa tak siap dan terkejut.

Kaderisasi waktu itu belum terjadi di internal PDIP. Para simpatisan hanya tahu sebatas ‘merapatkan barisan’ kepengurusan PDIP. Dengan demo tersebut, akhirnya partai mengambil tindakan mengkonsolidasi internal PAC. Di luar prediksi Agustin, bahwa pengurus yang awalnya mendukungnya, tiba-tiba berbalik menjatuhkan dirinya. Mereka ingin mendepak dirinya dalam kondisi mereka yang tidak wajar, karena pengaruh minuman keras dan membawa senjata tajam. Ia datang sendirian menghadapi para pendemo. Ia bertanya kepada mereka, apa salahnya sehingga harus mundur? Kemudian ia menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mundur selama partai tidak menghendakinya. Kemudian diambil keputusan, bahwa hal itu akan dibawa ke struktur partai yang lebih tinggi di Surabaya. Ia diminta menghadap ketua DPP PDIP, yaitu Sucipto, di ruang kerjanya. Ia sempat menangis, karena belum pernah diperlakukan seperti itu.

Sucipto mengatakan kepadanya, “...menangislah, selesaikan tangismu!” Agustin bertanya kepada Sucipto, “Apa salah saya pak, saya disuruh mundur seperti ini? Apa sikap saya?” Sucipto menjelaskan, “Seorang kader sejati, apapun resikonya, siap menghadapinya. Jangan pernah menangis. Cukup kamu menangis di depan saya. Dan jangan pernah menyatakan mundur. Apapun itu, kamu harus siap menghadapinya!”

Kata-kata tersebut membuat Agustin dapat bertahan menghadapi segala sesuatu dengan tegar. Oleh karena itu, ia tidak mengundurkan diri hingga dilantik menjadi anggota DPRD Kota Surabaya, periode 1999-2004. Pemilu selanjutnya, 2004-2009, bersifat semi proporsional. Saat itu, Agustin menjabat Ketua PAC dan mendapat nomor urut 1 dengan suara terbanyak kedua, melebihi perolehan suara Nanang, sekretaris DPC. Ia satu-satunya perempuan yang meraih suara terbanyak. Seiring dengan berjalannya waktu, penempatan nomor urut mendapat protes masyarakat.

Dalam menentukan posisi atau nomor urut, terjadi persaingan antara perempuan dan laki-laki. Agustin menjelaskan siapapun boleh tampil, namaun jangan menghalangi perempuan untuk

maju. Di mana pun posisinya, karena ia adalah kader partai, maka ditempatkan di nomor urut berapa pun, ia bersedia. Bila dikehendaki oleh partai untuk membawa amanat itu, meskipun teman-temannya harus mengalah karena ia seorang perempuan, maka ia jelaskan mengapa harus mengalah bila akan berkompetisi dengan baik? Pemilu berikutnya, 2009-2014, dilakukan per daerah pemilihan. Maka, hal itu menjadi strategi pihak-pihak tertentu untuk memecah suara pemilih. Ia kembali melenggang mendapatkan suara terbanyak nomor dua, setelah anggota legislatif dari PKB, di DPRD Kota Surabaya.

Periode 2009-2014, ia tidak ada dalam kepengurusan partai di PAC maupun di DPC. Meskipun tidak duduk dalam kepengurusan tersebut, ia tetap bertanggungjawab sebagai anggota partai. Dengan tidak menjadi pengurus, ia tetap dekat dengan masyarakat (konstituen). Pemilu 2009, ia ada di nomor urut 3, tetapi memperoleh suara terbanyak, sehingga terpilih lagi. Dengan tidak masuk kedalam kepengurusan partai, namun tak membuatnya patah semangat. Di luar partai pun, ia masih dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap PDIP.

Ia tetap mempertahankan eksistensi PDIP, dan bukan eksistensi dirinya sendiri. Ia besar karena partai. Ia merasa, pada 1999, bukan apa-apa, namun berhasil menjadi anggota dewan. Tahun 2010, ia menjadi Wakil Bendahara di DPC PDIP, hingga kini. Pemilu 2014, ia berada di nomor urut 1 dengan perolehan suara terbanyak nomor 2. Dia perempuan satu-satunya dari PDIP di periode itu. Hal ini tidak membuatnya besar kepala dan menyombongkan diri. Justru ia harus berintrospeksi, karena PDIP masih memberikan kepercayaan kepadanya serta berat mengemban hal itu.

Menurut Agustin, untuk mempertahankan eksistensi maka partai harus dipercaya oleh masyarakat. Tugas yang dibebankan ke pundaknya hingga kini harus ia tanggung. PDIP adalah jembatan emas menuju kekuasaan. Namun kekuasaan itu harus menyejahterakan masyarakat. Ini harus disampaikan ke masyarakat. Jadi, tidak mempergunakan kekuasaan untuk memperkaya diri

sendiri dan melupakan rakyat. Merebut kekuasaan adalah untuk kemakmuran rakyat. Itu yang ia perjuangkan hingga kini.

Praktik Kepemimpinan di DPRD

Sebagai Ketua Komisi D di DPRD kota Surabaya, Agustin melihat bahwa perempuan berada di posisi yang sulit berhadapan dengan laki-laki. Menurutnya, sebagai anggota legislatif perempuan, tak ingin ia dipandang sebelah mata oleh anggota dewan laki-laki. Jangan hanya datang, duduk dan diam menunjukkan kemolekan, tetapi tidak memperlihatkan keterampilan dan kemampuan. Ketika perempuan duduk di kekuasaan politik atau lembaga legislatif, maka jangan menjadi hiasan politik memenuhi keterwakilan 30 persen. Perempuan dalam politik harus mewarnai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan-keputusan.

Untuk menghilangkan citra bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan di parlemen, mereka harus mewarnai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan-keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Agustin berkonsultasi dengan partai politiknya, sebelum diputuskan di DPRD. Untuk menunjukan bagaimana kinerja perempuan pemimpin, ia memberikan contoh Walikota Surabaya dari PDIP. Ada 15 anggota legislatif di DPRD kota Surabaya dari PDIP (total anggota DPRD 50 orang). Kebijakan apapun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, ia lakukan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Berhubung ia berada di Badan Anggaran, maka anggaran untuk kesejahteraan masyarakat ia prioritaskan. Bila pendidikan dan kesehatan masyarakat bagus, maka ia berharap masyarakat akan sejahtera.

Yang ia usahakan saat ini adalah pendidikan gratis untuk masyarakat. Pendidikan ini gratis mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Jika kebijakan pemerintah mengenai pendidikan wajib 9 tahun, maka di Surabaya telah mencapai 12 tahun. Anggaran pendidikan ini, ia pastikan tidak tercoret sedikit pun. Anggaran pendidikan di

Surabaya mencapai 31 persen dari APBD. Ia juga memperjuangkan anggaran untuk kesehatan. Tahun lalu, Pemerintah Surabaya akan menghapuskan surat keterangan miskin. Surat keterangan miskin ini dipakai oleh masyarakat untuk berobat secara gratis. Ia berusaha untuk tidak dihapus.

Bahwa ada BPJS dari Pemerintah Pusat dan Pemda Surabaya, tetapi ia anggarkan pula di APBD. Bila perlu hal itu terus bertambah di masa depan. Alasan mengapa tidak menghapuskan surat keterangan miskin ialah agar masyarakat sehat dan sejahtera. Pembangunan harus merata dan kesehatan masyarakat perlu diprioritaskan. Sebab bila pendidikan dan kesehatan bagus, maka masyarakat makin sejahtera. Ia upayakan hal itu semaksimal mungkin, sehingga tidak mengurangi anggaran untuk masyarakat.

Anggaran untuk masyarakat sekarang Rp 161 milyar per tahun. Anggaran ini untuk masyarakat miskin. Di luar itu, mereka mendapat SKTM dan PBI, dalam bentuk relawan masyarakat. Relawan masyarakat misalnya kader lansia, kader posyandu, kader lingkungan, dan kader bunda paud. Agustin berusaha agar relawan ini terekrut dan tidak membayar iuran BPJS. BPJS mereka ditanggung oleh Pemkot Surabaya yang didanai melalui APBD, sebesar Rp. 30 ribu per orang per KK. Targetnya mencapai 100.000 orang, namun baru menyerap 99.000 orang. Di samping itu, ada PBI untuk masyarakat miskin dengan target berjumlah 291.000 orang, tetapi terdata 234.000 orang, karena ada JKN dan KIS dari Pemerintah Pusat.

Bila bantuan belum menyentuh mereka yang mengandalkan SKTM, maka anggaran itu ditarik menjadi PBI. Uang itu akan kembali ke masyarakat. Harus seimbang antara kesehatan mental dan jasmaninya, serta infrastruktur, seperti jalan. Pemenuhan kebutuhan lain, seperti makanan bagi lansia, penyandang cacat, fakir miskin, dan yatim piatu. Ini dilakukan setiap hari selama setahun dengan dana sebesar Rp. 11.000,- sekali makan. Makanan ini diantar ke depan rumah mereka. Makanan terdiri atas nasi, lauk-pauk, buah, dan minuman. Ini langsung diberikan kepada

mereka yang berhak. Total anggaran program ini mencapai Rp. 115 milyar per tahun. Anggaran ini mencukupi kebutuhan lansia berjumlah 91.000 orang. Untuk bantuan beras miskin yang dulu harus dibeli dengan harga Rp. 1.600,- per kg, maka pada 2016 diharapkan diberikan gratis kepada yang berhak menerimanya. Dahulu bukan hanya warga Surabaya yang menerima raskin, tetapi sekarang jumlahnya 6.000 orang penerima, dan diberikan secara gratis.

Bantuan itu harus benar-benar diawasi supaya arahnya tepat sasaran. Ke depannya akan diupayakan menambah anggaran tersebut, sehingga lansia di atas 60 tahun bisa mendapatkan makanan tambahan yang bergizi. Orang yang berhak namun belum mendapatkan bantuan itu, maka perlu didata ulang jumlah mereka. Hal itu tak perlu menunggu orangnya meninggal dunia dulu, baru diperbaharui datanya.

Anggaran yang terkait penanganan isu perempuan mengalir melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapemas KB). Anggaran ini dialokasikan untuk program KB, kegiatan perempuan dan anak, penanganan kekerasan, dan sebagainya. Anggaran ini tak pernah dipotong. Itu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar didukung. Meskipun kegiatan Bapemas KB kurang tepat sasaran, namun harus dibantu. Agustin mengusulkan agar pembinaan keterampilan perempuan dilakukan. Harapannya, perempuan tak lagi bekerja di luar rumah, namun memproduksi di rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan perlu dilakukan, sehingga memanfaatkan waktu luang mereka sebaik-baiknya.

Program visum gratis bagi perempuan dan anak-anak penting dibantu, karena bila ada kebutuhan maka tidak perlu menunggu uang tersedia. Dana itu untuk kejadian-kejadian yang mendadak. Programnya ada, maka dananya juga ada. Ketika ada kejadian, dana itu akan siap dipergunakan. Pendampingan-pendampingan juga diperlukan untuk itu. Praktik yang baik dalam mengalokasikan anggaran perlu dipertahankan. Terkait bagaimana praktik yang

baik itu dapat berlanjut tanpa ada aturan yang sah, menurut Agustin, itu tergantung pada pengawalan dan pendampingan. Pendampingan bukan hanya fisik, tetapi penggunaan anggaran juga. Pendampingan dan program ada, maka anggaran harus berjalan. Menurutnya, semua saling mengikuti. Hal-hal yang tak tersentuh apalagi oleh aparat hukum, itu harus diwaspadai dan diantisipasi untuk dilindungi. Bagaimana melindungi masyarakat melalui anggaran, itu sangatlah penting. Oleh karena banyak kejadian di luar prediksi, maka menurut Agustin, ibarat pepatah “sedia payung sebelum hujan”.

Saat ini, yang sedang ia lakukan ialah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, apalagi bagi kaum perempuan. Perempuan itu rentan terhadap segala jenis penyakit, misalnya kanker yang menjadi momok bagi perempuan.

Agenda yang bertema masyarakat ia sampaikan setiap hari, di luar kampanye partainya. Karena menurut Agustin, “Sepanjang kita masih ingin dipercaya oleh masyarakat, maka komunikasi tidak boleh putus. Saya tidak pernah mematikan *handphone* dan membuka rumah saya untuk siapapun yang mau datang ke tempat saya. Jadi komunikasi itu penting, dalam segala hal. Masyarakat mau menyampaikan apapun tidak harus menunggu saya di dewan, mereka dapat datang ke tempat saya untuk menanyakan sesuatu, atau sekadar telpon menanyakan kabar.” Komunikasi itu sangat efektif dalam memberi banyak masukan, serta *update* kondisi di masyarakat.

Bedah rumah merupakan program lain yang Agustin usulkan melalui Pemkot Surabaya guna merehabilitasi perumahan kumuh. Artinya, masyarakat yang benar-benar kondisi perekonomiannya tidak mampu, tidak punya jamban, lantai yang tidak layak ataupun plafonnya buruk. Merekalah yang menerima manfaat program ini. Untuk program ini, sebelumnya dianggarkan Rp. 4 juta, kemudian Rp. 7 juta dan akhirnya menjadi Rp. 10 juta per rumah. Ia mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp. 30 juta, namun hanya disetujui Rp. 25 juta per rumah.

Tantangan Dalam Praktik Kepemimpinan

Kendala utama ialah penyimpangan penggunaan anggaran program rehabilitasi rumah tersebut. Ia melihat dan mendengar bahwa orang miskin menyewa rumah, tidak memiliki tanah, dan ditarik iuran atau dicicil, sedangkan program itu bersifat hibah. Ia melihat pejabat melakukan itu kepada masyarakat yang hidupnya susah. Apabila program itu tidak benar, menurut Agustin, maka perlu direvisi.

Tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi Agustin. Masalah lainnya ialah kesulitan memperoleh data dari kelurahan. Dengan 'beras gratis' tahun 2016, bila ada yang bermain-main dengan program itu, ia akan menegurnya. Masyarakat diminta membayar kantong plastik. Meskipun harus membayar kantong plastik, namun perlu disepakati bersama. Bila ada keberatan terhadap itu, maka keputusannya harus dihentikan.

Dari internal partainya, menurut Agustin, pasti ada tantangan namun ia dapat mengatasinya. Selama menjadi anggota dewan, empat periode, ia tidak dimintai sepeser pun. Bila menjadi anggota dewan, memang ada kontribusi ke partai, karena hidup partai siapa yang menopangnya? Menurutnya, selama masih dipercaya oleh rakyat, maka akan dapat mengatasi tantangan itu. Tantangan dari masyarakat ialah bagaimana mereka mempercayakan suaranya kepada PDIP. Untuk memastikan agar masyarakat tidak pindah ke lain hati, maka kedekatan emosional harus terus dijaga. Selama ini, ia tidak menjanjikan yang manis-manis kepada masyarakat. Tiap ada program dari dewan, maka itu diusahakan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Agustin, di parlemen harus pandai-pandai membawa diri, karena berada di antara 50 anggota dewan dengan isi kepala yang beragam, bahkan satu partai saja, pasti berbeda. Dengan demikian, perlu pendekatan-pendekatan kedalam partainya lebih dahulu. Misalnya, perlu ada kesepakatan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi isu utama

yang harus disepakati di dalam partai, selanjutnya dibawa ke dewan melalui tugas kedewanan di komisi-komisi. Juga harus dibangun kesamaan visi dan misi dengan partai lainnya, dalam membuat kebijakan-kebijakan yang harus diperjuangkan.

Jumlah perempuan di DPRD Kota Surabaya, ada 17 orang, maka lebih dari 30 persen. Karena itu, banyak orang yang berharap kepada 17 perempuan yang menjadi wakil mereka di dewan. Namun menyamakan persepsi di kalangan anggota legislatif perempuan tidaklah mudah, karena egoisme mereka juga ada. Bila berbicara di dewan, maka itu tergantung pada ego anggota dewan terkait, mau atau tidak. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Seharusnya egoisme masing-masing anggota dewan dilepaskan, karena masyarakat menunggu kebijakan-kebijakan apa yang mampu mewakili kepentingan mereka. Kompetisi dengan kaum laki-laki harus, tetapi dengan sesama perempuan juga. Yang sehat, kalau perempuan dapat menguasai kompetisi itu.

Di antara 17 perempuan itu, tentu ada yang ingin menonjolkan diri. Ini memang sifat alamiah manusia. Oleh karena itu, perempuan di dewan perlu bergandengan tangan bersama agar tidak menjadi persaingan. Bagaimana menyuarakan kepentingan perempuan? Ini kadang menyulitkan, karena masing-masing berbeda partai politik, berbeda komisi, berbeda posisi; ada yang di Banggar, Bamus, dan Perencanaan. Itu harus diperjuangkan meskipun berbeda-beda dalam segala hal, namun bertujuan sama. Agustin berharap agar semua perempuan di dewan membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Koordinasi antar anggota dewan melalui Kaukus Perempuan Parlemen (KPP), dulunya ada, namun sekarang tidak begitu aktif. Menurut Agustin, KPP hanya menunggu. Ia sendiri mengakui bahwa karena kesibukannya di dewan, ia hanya terlibat di KPP apabila ada kesempatan. Koordinasi dengan LSM perempuan, ia jelaskan, apabila tersedia waktu saja. Kini sedang ramai dengan masalah BPJS. Di komisinya, ada enam perempuan anggota legislatif, sedangkan di komisi lain juga ada. Semua sibuk dengan

isu kesehatan dan urusan kedewanan. Bila ada undangan, maka mereka akan datang, kalau bisa.

Harapan Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Agustin berharap agar perempuan yang memimpin baik di legislatif maupun eksekutif, semuanya berperan optimal. Demikian pula kalangan legislatif laki-laki bisa memberikan sumbangan pemikirannya. Perempuan harus menunjukkan jati diri yang tegar dalam menghadapi masalah apapun.

17 perempuan anggota legislatif yang ada di DPRD kota Surabaya saat ini, menurut Agustin, bergantung pada partai politiknya masing-masing. Apakah ingin memanfaatkan peluang yang ada atau tidak? Kalau peluang yang ada tidak dimanfaatkan oleh perempuan pemimpin, maka akan sia-sia. Persoalannya, bagaimana memanfaatkan peluang itu benar-benar demi kesejahteraan masyarakat dan tidak untuk keuntungan pribadi? Penting memberikan kesempatan dan memanfaatkan peluang yang ada oleh perempuan untuk menjadi pemimpin. Menurutnya, bagaimana mempertahankan hal itu adalah soal yang sulit, karena pesaing perempuan adalah laki-laki. Ia menerangkan bahwa kaderisasi di kalangan perempuan adalah hal yang mendesak. Bagaimana mempertahankan keadaan yang lebih baik di masa depan, itulah yang perlu dipikirkan.

Kontribusi partai mendukung kepemimpinan perempuan dengan kebijakan keterwakilan 30 persen harus diwujudkan di semua tingkatan mulai dari anak ranting, ranting, PAC, dan DPC. Maka ia heran, bahwa di partai lainnya perempuan hanya menjadi pajangan. Menurutnya, perempuan anggota legislatif dari partai lainnya banyak yang hanya diam. Ini patut disayangkan, karena harusnya ditunjukkan bahwa perempuan mampu dan terampil.

Agustin menyampaikan, bahwa dengan posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran selama tiga periode, ia merasa lelah apalagi sering dikatakan Banggar tidak memperjuangkan anggaran.

Barangkali, karena banyak perempuan anggota legislatif lainnya yang tak menyadari arti penting Banggar.

Tanggapan Terhadap Kepemimpinan Agustin Poliana

1. Astuti Supraptini

Bagaimana pihak lain mencermati kepemimpinan Agustin Poliana? Tanggapan datang dari Astuti Supraptini. Astuti bekerja di Savi Amira. Tahun 2014, ia menjabat sebagai Direktur Savi Amira. Ia bergabung dengan Savi Amira, awalnya sebagai relawan, tahun 2006. Selain sebagai Direktur Savi Amira, ia juga mengabdikan sebagai dosen tidak tetap di Universitas Airlangga, Surabaya, di Fakultas Ilmu Politik.

Terkait dengan kepemimpinan perempuan, Astuti menyatakan bahwa hal tersebut berperan utama di Surabaya. Itu karena selama dua periode Surabaya dipimpin oleh perempuan, sebagai Walikotanya. Menurutnya, Tri Rismaharini adalah perempuan kuat yang mewakili karakter Surabaya, yang bicaranya lantang. Penelitian yang pernah ada menemukan bahwa peran Tri Rismaharini cukup kuat berpengaruh. Ia mengecek tugas masing-masing SKPD. Memang muncul ketidak-sepakatan pihak-pihak tertentu akibat sikap tegas Tri Rismaharini. Terkesan bahwa kalangan pegawai melakukan pekerjaannya, karena takut terhadapnya. Guna memantau kinerja kalangan pegawai di kota Surabaya, Tri Risma memasang CCTV di Bapeko. Meskipun pemimpinnya mungkin bagus, akan tetapi belum tentu bawahannya bagus, karena kecepatan mereka belum menyamai pemimpinnya. Dengan demikian, beberapa hal yang mungkin substansinya bagus, ternyata implementasinya lemah.

Sekarang di kota Surabaya dirasakan perubahan yang luar biasa. Ini menurut Astuti, terjadi karena PDIP memimpin. Walaupun di Surabaya saat ini kelihatan luar biasa perubahannya, kenyataannya, itu dimulai sejak Bambang DH (PDIP) memimpin. Karena sebelumnya, Surabaya pada era Orde Baru, memiliki

walikota yang melakukan KKN. Perubahan yang dirasakan oleh warga masyarakat kini jauh lebih baik.

Astuti berharap bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin bisa berdampak positif terhadap perempuan lainnya. Dalam penanganan kasus, kini dirasakan cukup baik oleh masyarakat, khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, anak yang mengalami kekerasan, maka yang dilindungi tak hanya anaknya, tetapi orang tuanya juga. Mengapa orang tuanya perlu mendapat perhatian, karena latar belakang ekonomi mereka yang kurang mampu. Pemerintahan kota Surabaya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial melaksanakan program pemberdayaan ekonomi. Di Surabaya, jaminan sosial untuk orang miskin, menurut Astuti, cukup besar. Bila orang tidak ber-KTP Surabaya, maka Dinsos kota bekerjasama dengan Dinsos provinsi membiayai orang tersebut. Bagi Dinas Pendidikan, tak ada aturannya ketika seorang anak perempuan mengalami kekerasan seksual, dikeluarkan dari sekolahnya. Umumnya, mereka keluar sendiri dari sekolahnya, maka harus diadvokasi hak-haknya.

Savi Amira dengan beberapa pihak, seperti KPI, ibu-ibu komunitas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan DPRD, kerap berdialog. Hasil dialognya ialah agar Dinas Kesehatan terkait (rumah sakit) memberikan visum gratis bagi perempuan korban kekerasan. Rumah sakitnya adalah RS Suwandi. Di Polda Jawa Timur ada unit PPT untuk memberikan layanan gratis untuk kasus kekerasan terhadap perempuan.

Anggaran untuk orang miskin sekarang mencapai Rp. 100 milyar per tahun. Orang yang aktif berbicara mengenai jaminan kesehatan ialah Agustin Poliana dari DPRD Kota Surabaya. Ia menyampaikan hal itu pada hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kini di Surabaya ada kebijakan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi kader PKK berupa BPJS gratis, yang iurannya dibayar oleh Pemkot Surabaya. Terkait visum gratis bagi perempuan korban kekerasan, memang tidak tertuang dalam bentuk kebijakan khusus, tetapi

aturan Dinas Kesehatan kota. Visum langsung dianggarkan dalam perencanaan masing-masing SKPD.

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak telah terbentuk, yaitu Perda Kota Surabaya No. 16/2011. Perda ini diusulkan untuk direvisi agar sesuai dengan UUPA 2004. Perda Kota Surabaya No. 8/2012 tentang Perlindungan Perempuan, sedangkan di tingkat provinsi ada Perda Jawa Timur No. 16/2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

Apakah yang dilakukan oleh perempuan pemimpin kini dirasakan jauh lebih baik oleh kalangan LSM perempuan di Surabaya? Astuti menyampaikan bahwa mereka merasakan layanan publik jauh lebih baik, namun sosialisasi dan implementasinya oleh eksekutif belum merata hingga di tingkat bawah. Misalnya P2TP2A di tiap kabupaten dan kota sudah ada, meskipun layanan ini untuk perempuan korban kekerasan, tetapi pengelolaannya lebih banyak untuk anak-anak korban narkoba. Artinya, peruntukan P2TP2A justru untuk semua penyandang masalah kesejahteraan sosial. Savi Amira, jika mengadakan kegiatan mengundang P2TP2A Surabaya, tetapi sulit diminta kesepakatannya. Akhirnya, utusan Savi Amira dan beberapa aktivis perempuan nasional menemui Walikota Tri Rismaharini mengadakan penyimpangan penggunaan fasilitas publik itu. Tri Rismaharini terkejut mendengar bahwa terjadi penyimpangan penggunaan P2TP2A di Surabaya.

Pengalaman Savi Amira dan KPI menangani korban kekerasan yang ditaruh di P2TP2A berharap agar tak hanya menempatkan korban, tetapi harus ada kegiatan rutin dan pemulihannya. Itu tidak dilakukan sama sekali di sana, bahkan penghuninya dicampur, sehingga korban akhirnya keluar dari tempat itu. Untuk isu kekerasan terhadap perempuan, hal ini memerlukan perhatian yang lebih serius dari Pemkot Surabaya. Dan rumah aman bagi perempuan dewasa, sulit diperoleh masyarakat.

Menurut Astuti, meskipun tersedia P2TP2A, namun kurang memadai karena kamar-kamarnya disekat-sekat dan batas waktu

tinggal hanya dua minggu. Untuk perempuan korban kekerasan yang berat, mereka perlu tinggal di rumah aman lebih dari satu bulan untuk pemulihannya. Dengan demikian, advokasi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan tidak hanya terhadap Pemkot, tetapi juga terhadap pemerintah Pemda Jawa Timur.

Upaya yang dilakukan kalangan LSM perempuan ialah berdiskusi dengan Agatha, anggota DPRD I Jawa Timur (dari PDIP). Komunikasi terjalin dengan Agatha, karena sedikit perempuan legislatif yang bisa diajak berdiskusi. Astuti pernah bertanya langsung mengenai apakah ada Kaukus Perempuan di parlemen? Jawabnya: tidak ada. Bagaimana mengajak perempuan legislatif ataupun laki-laki legislatif yang konsen terhadap isu-isu perempuan bisa bertemu? Pemerintah Jawa Timur saat ini sedang merancang Perda mengenai jaminan kesehatan. Agatha bertanya, apakah isu-isu perempuan atau kekerasan terhadap perempuan perlu dituangkan dalam kebijakan? Ini direspon oleh kalangan LSM perempuan dengan menyetujui memasukkan isu-isu tersebut. Kebutuhan sekarang memerlukan keterlibatan Dinas Kesehatan Provinsi. Pembahasan Perda mengenai Jaminan Sosial sedang diadvokasi oleh KPI melalui program Mampu.

Advokasi isu pendidikan oleh Savi Amira, bersama dengan Dinas Pendidikan, menyangkut isu kekerasan terhadap anak. Juga dilakukan pendampingan terhadap komunitas guru Paud untuk menjadi guru TK, di kecamatan Tandes, Surabaya Barat. Kegiatan ini bekerjasama dengan kader PKK yang fokus terhadap penanganan kasus. Kemudian permintaan dari PKK di RW Pasar Keling, dekat UNAIR, untuk berkegiatan di sana. Perspektif masyarakat dan pejabat menjadi tantangan tersendiri, karena di kota Surabaya ada pos 'curhat' yang telah diresmikan oleh Walikota Tri Rismaharini.

Menurut Astuti, pos curhat itu sesungguhnya layanan berbasis komunitas yang ditempelkan di PKK. Orang-orang yang mengalami kekerasan bisa curhat di pos itu. Layanan ini memiliki SK Walikota tahun 2010, yaitu pada masa Bambang DH menjadi walikota. Kelemahannya, setelah SK tersebut kemudian dibentuk

pos-posnya. Ada pertemuan pertama, tetapi tak disertai dengan peningkatan kapasitas petugasnya, seperti keterampilan untuk menangani orang-orang yang mengalami kekerasan.

Kalau dilihat dari segi tekstualnya, maka Perda tersebut tampak bagus. Analisa pejabat atau kepala daerah pun bagus. Selain pos curhat, ada pos Kesehatan Reproduksi Remaja. Namun ini tidak berjalan, karena didirikan oleh remaja di lingkungan setempat dan dibiarkan begitu saja. Bagaimana anak-anak remaja mengelola pos tersebut, tak ada tindak lanjutnya. SK-nya sampai di tingkat kelurahan, karena kelurahan mengirimkan utusan dan juga dari kecamatan.

Pos yang ada di Pasar Keling, dengan kondisi Surabaya yang angka kemiskinannya tinggi, banyak anak perempuan putus sekolah akibat hamil. Selama ini, Savi Amira berusaha masuk di kalangan remaja, tetapi agak sulit, sehingga dilakukan oleh PKK kelurahan. PKK adalah peninggalan Orde Baru, maka ketika ada kasus, mereka tidak mampu menanganinya. Petugas PKK rata-rata berusia di atas 50 tahun, dan cara berpikirnya kuno. Proses membangun kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan berjalan lambat, hingga ada yang mengalaminya sendiri.

Astuti merasa kebutuhan akan rumah aman bagi korban kekerasan masih harus bekerjasama dengan beberapa universitas, karena belum diperhatikan oleh Pemkot Surabaya. Savi Amira memberikan layanan konseling dan bantuan hukum (pengacara) untuk perempuan korban kekerasan. Savi Amira bekerjasama dengan rumah aman milik Universitas Sunan Ampel, melalui program masyarakatnya. Lembaga ini mendampingi kelompok ibu-ibu di Tuban dengan layanan kesehatan reproduksi. Kegiatan ini meminta ibu-ibu bertanya ke tetangga mereka, apa masalah yang dialami. Ibu-ibu dibekali dengan alat analisa sederhana, kemudian dibahas hasil-hasil temuan mereka.

Keberadaan Tri Rismaharini sebagai perempuan pemimpin di kota Surabaya mendapat dukungan dari kelompok perempuan.

Menurut Astuti, masyarakat melihat tata kota Surabaya semakin baik, sejak Tri Rismaharini menjabat di Dinas Pertamanan. Tri Rismaharini memiliki pengalaman di Badan Pembangunan Kota. Kepala PDAM Surabaya juga perempuan, dan cukup bagus kepemimpinannya, awal tahun 2000-an. Namun, ia sudah meninggal dunia. Ia yang membenahi PDAM Surabaya. Ia berhasil membongkar kasus-kasus di PDAM tersebut, namun musuhnya banyak. Dua perempuan tersebut adalah perempuan pemimpin yang cukup bagus. Prestasi mereka terpublikasikan karena peran media massa.

Pilkada kota Surabaya tahun 2015 lalu, memasang calon walikota Tri Rismaharini dan Rasiyo. Rasiyo, pasangan Tri Rismaharini, tak tampak kinerjanya selama ini. Rasiyo didukung oleh Gubernur Jawa Timur dan mantan pejabat di Pemkot dan Pemprov. Pilkada dimenangkan oleh pasangan Tri Rismaharini-Rasiyo.

Menurut Astuti, di dewan masih didominasi oleh laki-laki. Beberapa perempuan yang didukung dalam Pemilu 2014 yang lalu, kebanyakan tidak lolos. Calon anggota legislatif perempuan yang dekat dengan kelompok perempuan, hanya Agatha yang berhasil lolos, sedangkan lainnya gagal.

Untuk mengetahui kinerja perempuan pemimpin yang terpilih, sejauh mana mereka membela kepentingan perempuan selama ini, hal itu bergantung pada bagaimana mendekati mereka. Biasanya harus ditanya dahulu atau mengeluhkan kinerja mereka, kemudian mereka akan merespon dengan gusar. Astuti menyatakan bahwa sejauh ini belum terlihat dan dirasakan hasil kerja perempuan pemimpin di komunitas. Belum jelas ketika mereka melakukan pendekatan ke masyarakat. Selama ini, pola komunikasi perempuan pemimpin dengan komunitas atau masyarakat belum diketahui. Biasanya LSM di Surabaya, bila melakukan kegiatan diskusi, maka yang didekati ialah PDIP dan PKB.

Astuti mengatakan, bahwa berjejaring dengan partai politik dirasa penting oleh LSM perempuan di Surabaya. PDIP dipilih

karena relatif mudah menerima kelompok perempuan dan banyak aktivis perempuan yang bergabung di PDIP.

Kesulitan berkoordinasi dengan anggota legislatif perempuan karena banyak yang telah berganti partai politik. Misalnya dulu di PKB, sekarang di Golkar. Terlebih tak ada Kaukus Perempuan Parlemen di DPRD I dan II, sedangkan menurut Astuti, KPP itu penting menjadi wahana peningkatan kapasitas dan jembatan kalangan politisi yang tidak dapat menyampaikan suaranya. Dengan ketiadaan kaukus itu, akan menyulitkan pengawasan kinerja perempuan pemimpin di legislatif.

Dari segi perspektif dan kualitas, perempuan pemimpin dari partai lain dirasakan belum memadai, kecuali PDIP. Yang cukup memiliki perspektif ialah Agatha, anggota DPRD I Jawa Timur, yang berasal dari PDIP. Ia mengusulkan draf Perda JKN untuk Jawa Timur dan memasukkan perspektif perempuan di dalamnya. Tindakan konkrit Agatha lainnya ialah mengajak kelompok perempuan datang ke DPRD I Jawa Timur, ketika membahas Raperda JKN. Bentuk implementasi kebijakan lainnya belum terlihat. Contoh, Perda Perlindungan PRT tidak jelas pembahasannya. Karena kesulitan itu, Astuti mengumpamakan kerja advokasinya seperti memecah langit-langit kaca. Dengan kata lain, sejauh ini belum kelihatan implementasi janji politik yang membela kepentingan perempuan, bahkan Perda belum mereka sahkan.

Tantangannya ialah memastikan perempuan pemimpin sungguh-sungguh mengimplementasikan janjinya, baik di eksekutif maupun legislatif. Akibat budaya birokrasi yang patriarkhal, meskipun perempuan menjadi pemimpin, mereka banyak menemui kesulitan.

Astuti mencontohkan, meskipun perempuan menjadi pemimpin, namun mereka menerapkan nilai-nilai yang patriarkhal. Ketika ia meneliti kepemimpinan perempuan di dunia pendidikan di Madura dan Nusa Tenggara Barat, tampak bahwa perempuan yang menjadi

pemimpin dituntut tidak meninggalkan sifat 'keperempuanannya' misalnya sifat mengayomi, melindungi, dan lainnya. Beban perempuan pemimpin kian berat daripada laki-laki pemimpin. Untuk hal lain, masih belum terlepas dari budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Perempuan dimanfaatkan atau terjebak dalam situasi itu, misal kolusi dan nepotisme di NTB sangat tinggi.

Di satu kabupaten ditemukan hanya seorang perempuan yang menjadi kepala sekolah. Itu terjadi di Pamekasan. Di daerah ini di tingkat SMA, kepala sekolah yang perempuan hanya satu orang. Untuk tingkat SMP, kepala sekolah yang perempuan ada 10 orang. Itu terjadi karena penerimaan terhadap perempuan pemimpin demikian rendah dibandingkan dengan di Jawa. Di NTB tidak demikian, karena budaya patriarkhal sangat kuat dan sekat-sekat sosialnya juga. Perempuan tak merasa beruntung ketika menjadi pemimpin, karena beban ganda. Selain menjadi pemimpin publik, mereka harus mengurus rumah tangga.

Berbeda dengan apa yang terjadi di Manado yang memiliki sosok pahlawan perempuan, seperti Christina Martha Tiahahu. Ternyata, ia menginspirasi perempuan dan laki-laki di sana, bahwa perempuan bisa memimpin. Oleh karena itu, jumlah kepala sekolah perempuan di Manado cukup banyak. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa budaya dan religi sangat berpengaruh dalam menelurkan perempuan pemimpin.

Menurut Astuti, di Indonesia sulit menembus birokrasi yang homogen yang menjadi peninggalan sistem Order Baru. Bagi Savi Amira, merasa penting mempertemukan kelompok perempuan yang berbeda-beda agar saling menginspirasi. Ini terbukti dengan kasus kader PKK yang selama ini tidak mengakui adanya kekerasan di lingkungannya, kemudian mengaku dirinya sendiri mengalami hal itu.

Terkait dengan perempuan korban kekerasan, itu sudah diatur di SKPD-nya Dinsos, Bapemas PP dan KB, dan Dinkes. Misalnya di Dinkes, ketika perempuan korban kekerasan datang

ke puskesmas, mereka akan dilayani dengan baik. Namun itu belum tersosialisasi secara baik, selain itu, petugas kesehatannya harus dimampukan menangani kasus-kasus itu. Tahun 2009, Savi Amira memiliki *pilot project* bekerjasama dengan Dinkes kota Surabaya, menangani perempuan korban kekerasan. Karena berbeda perspektif, kepala SKPD-nya merespon dengan mengatakan hal itu menambah pekerjaan. Padahal yang Savi Amira inginkan ialah menambah satu atau dua pertanyaan saat memberikan layanan kesehatan, misalnya pertanyaan: apakah ada masalah di rumah? Jika mereka bersedia bercerita lebih banyak, maka ada pihak lain yang bisa menanganinya.

Sekarang, menurut Astuti, ada kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dengan Dinkes Jawa Timur untuk menangani kasus-kasus KDRT, tetapi ia tidak mengetahuinya. Ia tidak pernah melihat buku panduannya. Sosialisasi menjadi masalah yang paling parah, karena tidak diketahui di tingkat atas dan internal mereka. Program untuk kalangan remaja berbentuk penyuluhan-penyuluhan kesehatan reproduksi oleh Dinkes provinsi Jawa Timur. Untuk kaum difabel, program belum tersedia oleh Pemda. Padahal persoalan itu banyak dialami para difabel.

Astuti berharap agar perempuan pemimpin di eksekutif maupun legislatif membuat kebijakan-kebijakan yang berbasis data (*evident base*) yang diperoleh melalui investigasi di basis massa, sehingga informasinya akurat. Jika tidak mendapatkan data, mereka bisa menggunakan data yang dimiliki kalangan LSM.

Selama ini, perempuan pemimpin yang memiliki komunitas hanya berkunjung saat reses. Komunitas hanya diberi proyek, dan itu mengganggu anggaran SKPD yang ada. Agatha selama ini melakukan tugasnya dengan turun ke sekolah-sekolah memberikan pembekalan bagi remaja terkait isu kesehatan reproduksi. Dirasakan pula oleh Astuti, bahwa akan memudahkan perjuangan bila perempuan pemimpin memahami perjuangan kelompoknya untuk isu-isu keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena, mereka memiliki akses dan kewenangan membuat kebijakan-kebijakan,

maka harus ada komunikasi yang regular antara LSM perempuan dengan perempuan pemimpin. Di Jawa Timur, itu tidak ada, karena yang terjadi hanya komunikasi antar individu. Sementara itu, KPP tidak aktif, sehingga yang sekarang dilakukan ketika mengundang tidak melalui KPP, melainkan individunya langsung atau ke komisinya dengan menyebut nama yang diundang.

Harapan Astuti ialah, bahwa mereka bisa bekerjasama ketika membuat anggaran dan kebijakan yang sifatnya mengikat (tertulis) berdasarkan data-data. Untuk tersedianya data-data, maka mereka bisa nbekerjasama. Diperlukan komunikasi yang baik antara kelompok-kelompok perempuan dengan perempuan pemimpin guna membuka akses ke legislatif maupun eksekutif. Dengan terbangunnya jaringan kerja, semua pihak bisa saling menguatkan dan belajar membawa perubahan di eksekutif maupun legislatif.

2. Wiwik Affifah

Wiwik Afifah adalah Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia, Jawa Timur, sejak 2012. Partisipasi perempuan di Surabaya dalam Pilkada 2015 lalu, ada 28 perempuan pemimpin yang meliputi 30 kabupaten kota. Artinya, 40 persen calon peserta perempuan terlibat, bahkan ada pasangan perempuannya. Ini menarik perhatian kita, karena biasanya perempuan ditempatkan menjadi wakil pasangan, namun kini calon pasangannya juga perempuan. Ini terjadi di Kabupaten Malang.

Bupati perempuan yang berhasil terpilih antara lain di Jember, yaitu Faida yang menjadi anggota KPI. Menariknya, Faida bukan orang lama di parpol dan tidak begitu mengakar, tetapi memiliki kemauan keras dan dukungan massa. Ia mempunyai rumah sakit, dan karena kepedulian sosialnya, ia mendapat simpati cukup banyak dari masyarakat. Awalnya, itu bukanlah modal sosial untuk perjuangan politiknya.

Di Surabaya, ada dua kandidat perempuan sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Menurut Wiwik, budaya di

Jawa Timur masih kolot, karena kental dengan nuansa agama. Itu makin memudar dalam kontestasi Pilkada, karena Tri Rismaharini. Kinerja pemimpin perempuanlah yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat untuk memilih mereka. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak kabupaten kota di Indonesia. Surabaya memiliki layanan kesehatan dan akte gratis. Terkait adanya akte berbayar di Surabaya, maka itu melanggar HAM, karena kebijakan Satu Juta Pohon yang memaksa orang tua bayi untuk menyerahkan pohon ke Pemkot. Bila tidak memiliki pohon, maka harus membelinya. Tak semua orang yang istrinya melahirkan mampu membeli tanaman untuk memperoleh akta gratis. Itu dekat dengan praktik korupsi.

Kebijakan itu diprotes oleh masyarakat, karena tidak logis antara kebijakan menanam pohon dengan kelahiran. Ini membawa inspirasi bagi daerah-daerah lainnya. Tri Rismaharini melakukan perubahan dengan dukungan publik. Menurut Wiwik, tantangan besar dihadapi kalangan perempuan untuk maju sebagai pemimpin, baik menjadi kepala daerah maupun anggota legislatif. Daerah lain yang berhasil melahirkan perempuan pemimpin adalah Jember (dr. Faida, MMR), Probolinggo (Puput Tantaran Sari, S.E), dan Kediri (Haryanti Sutrisno). Tak semua perempuan yang terpilih setangguh Tri Rismaharini dalam mengubah birokrasi maupun budaya publik. Wiwik khawatir bahwa banyak perempuan pemimpin dijadikan boneka oleh partai politik atau oleh laki-laki, bila perempuan tidak memiliki perspektif mengapa harus menjadi pemimpin? Hal ini dapat kita temui di tingkat lapangan.

Menurut Wiwik, belum terlihat dan terasa dampak praktik-praktik positif perempuan pemimpin bagi kalangan yang bekerja di isu-isu perempuan. Untuk Tri Rismaharini, terlihat peningkatan yang cukup signifikan. Itu terlihat dengan layanan akte kelahiran melalui *internet*, sehingga tak perlu mengurusnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan mudah orang bisa memproses aktanya, yaitu cukup memasukkan semua data KK dan KTP. Kemudian Dinas akan mengantarkan akta yang diproses

ke rumah orang terkait. Wiwik mempertanyakan mengapa Tri Rismaharini mampu melakukan hal tersebut dalam jangka waktu pendek, padahal yang lainnya tidak? Artinya, ia mengkondisikan birokrasi dengan keras. Wiwik menilai bahwa ada sisi maskulin di dalam diri perempuan pemimpin. Maskulin diartikan sebagai keras, kaku, dan seterusnya. Tri Rismaharini melakukan itu dengan mengombinasikan 'label' yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki.

Dengan melakukan itu sejauh ini, Tri Rismaharini berhasil dan terlihat ketika masa transisi Pemkot Surabaya agak kedodoran. Ia kelihatan luwes dalam memimpin, karena pengalaman birokrasinya. Ia tercatat pernah memimpin di Dinas Pertamanan dan di Bapeda Kota, sehingga mengetahui sistem penganggaran yang ada. Menurut Wiwik, Faida di Jember yang memiliki rumah sakit dan menjadi kepala rumah sakit, karena baru sebagai Bupati, jelas perlu menata birokrasinya. Faida harus mengakomodir semua pihak untuk masuk di gerbong kekuasaannya. Itu menjadi tantangan yang luar biasa berat bagi perempuan pemimpin yang baru berkuasa.

Yang di Kediri juga mengalami kesulitan, karena ia adalah istri mantan Bupati. Seharusnya, ia sudah tahu peta persoalannya, tetapi kerja-kerjanya belum kelihatan. Di Probolinggo yang menjadi pemimpinnya juga istri mantan Bupati. Kedua pemimpin itu berpengalaman memimpin, setidaknya mengelola PKK di wilayahnya selama lima tahun. PKK sebagai organisasi memberi layanan kesehatan. Bagi perempuan pemimpin yang baru dilantik beberapa bulan lalu, maka hasil kerjanya belum tampak.

Dalam pandangan Wiwik, tantangan yang luar biasa berasal dari internal partai politik dan birokrasi. Tekanan juga muncul dari masyarakat. Tantangan dalam birokrasi ialah bagaimana mengubah perspektif dan perilaku birokrat. Ini cukup sulit. Misalnya warga masyarakat yang tinggal di Surabaya yang statusnya *stateless*, seperti orang Madura, Kalimantan, atau Bugis. Perempuan pemimpin bermaksud memberikan identitas

kepada orang-orang tersebut. Tentu perempuan pemimpin akan mendapat tentangan dari birokrasinya sendiri. Respon birokrasi biasanya soal anggaran yang tidak mencukupi. Ada kekhawatiran, bahwa semua orang akan datang ke Surabaya, sehingga susah mengurusnya. Sekarang, di Surabaya hanya mengakomodir satu persen orang yang berasal dari luar daerah yang bisa mengakses pendidikan. Dapat dibayangkan, banyak orang Indonesia ingin pergi keluar negeri untuk belajar tanpa dibatasi, tetapi di Surabaya justru sebaliknya. Ini berlaku pula untuk sekolah-sekolah negeri. Akhirnya, yang terjadi ialah manipulasi identitas. Kemudian muncul konflik-konflik horisontal di kalangan warga masyarakat. Masyarakat Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Madura beramai-ramai sekolah di Mojokerto. Mereka tidak memiliki biaya sekolah. Tri Rismaharini pernah berkata, “Kalau kamu anak orang miskin, tetapi pintar, dapat dibiayai Pemkot bahkan disekolahkan keluar negeri. Kembali ke Surabaya terserah mau menjadi apa, namun intinya kamu mengabdikan.” Semua berlomba-lomba ingin sekolah di sini. Orang Surabaya yang ada di tingkat bawah seakan-akan terpinggirkan. Dengan itu, dibuatlah kebijakan satu persen. Manipulasi data pun terjadi, misalnya dengan memakai KK orang lain.

Terkait kebijakan anggaran, orang mengatakan dapat diakses di situs, tetapi kenyataannya sulit. Apabila kita meminta dianggarkan, mereka cenderung mendengarkan dan mempertimbangkannya. Musrembang tingkat kota ataupun provinsi, masih melibatkan kalangan LSM. KPI diikuti-sertakan secara organisasional, tetapi kecewa akibat harapan kita untuk mengubah musrembang tingkat kota dan provinsi tidak berhasil, sebelum disahkan di DPRD. Intervensi masyarakat hanya di tingkat kecamatan atau SKPD.

Sekarang belum terlihat berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk perempuan (*gender budgeting*), karena banyak anggota dewan yang baru. Akan tetapi, di kota Surabaya, hal itu mulai diurus-utamakan. Misalnya tentang kekerasan terhadap perempuan, pemerintah mendengarkan masukan-masukan

dari kelompok-kelompok perempuan. Pemkot melalui Badan Pemberdayaan Perempuan memfasilitasi pertemuan dengan mengundang Dinkes dan Dinsos. Badan itu menjalankan fungsi koordinasi. Setelah pertemuan, mereka menyepakati bahwa sasarannya ialah sekolah-sekolah. Mereka memberi keputusan kepada Dinas Pendidikan untuk melaksanakannya.

Di sekolah-sekolah, para guru Bimbingan Penyuluhan kini cenderung lebih aktif. Sekolah-sekolah mulai memahami bahwa jika ada masalah maka harus menyembunyikan identitas orang yang mencari bimbingan, karena langsung menyangkut kepentingan nama baik sekolah. Dari segi positifnya, mereka bisa merahasiakan korban.

Di Surabaya ada Perda tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan. Di dalamnya disebutkan peran Dinas Pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat sipil. Perda ini tak hanya berbicara soal pendidikan, tetapi juga mengenai hak-hak anak dan bagaimana menerapkannya. Sebagai turunannya, ada Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meskipun beberapa hal krusial tidak termaktub di Perda tersebut, karena saat membahasnya pihak DPRD mempermainkan kelompok-kelompok perempuan dengan tidak memberitahukan kapan rapatnya, akibatnya mereka tak bisa memberikan masukan-masukan. Di Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sempat diusulkan agar sekolah-sekolah atau penyelenggara pendidikan tidak diperbolehkan mengeluarkan muridnya, sebelum mendapat rekomendasi dari sekolah yang menerimanya. Kalau hendak mengeluarkan muridnya, maka sekolah lain harus mau menerimanya. Poin ini hilang dari Perda itu, tetapi Dinas Pendidikan memiliki kebijakan bahwa murid tidak boleh dikeluarkan. Itu kebijakan Dinas Pendidikan, namun dalam Perdanya tidak termuat. Pemerintahan Jawa Timur menyatakan bahwa tidak ada kebijakan tertulis melarang siswa hamil mengikuti ujian sekolah, tetapi publik menuntut itu. Advokasi kelompok perempuan di Surabaya berhasil memastikan bahwa anak-anak

yang mengalami kehamilan boleh mengikuti ujian sekolah.

Kelompok perempuan di Surabaya merasa ketika ada perempuan pemimpin di kalangan eksekutif dan legislatif yang berpihak, itu akan memudahkan advokasi. Menurut Wiwik, beberapa kepala dinas di kota Surabaya adalah perempuan sehingga mempermudah pendekatan. Namun jauh lebih memudahkan, apabila mereka memiliki perspektif yang baik mengenai isu-isu perempuan. Saat ini, beberapa kepala dinas laki-laki mempunyai perspektif yang lebih baik mengenai perempuan dan anak.

Wiwik berpendapat bahwa tantangan terberat muncul ketika penutupan Dolly berlangsung. Pertentangannya luar biasa, karena diintimidasi. Koalisi Perempuan Indonesia mengadvokasi masalah itu dengan mengirimkan surat audiensi ke pihak-pihak terkait, seperti Bapeda, Dinsos, Bapermas, DPRD, dan Pemkot. Karena mereka mengetahui mendapatkan surat dari KPI, akhirnya audiensi dilakukan. Audiensi KPI dengan eksekutif dan legislatif dijadikan satu. Mereka menyatakan bahwa penutupan itu adalah program Kementerian Sosial. Ini tekanan pemerintahan Pusat terhadap Kabupaten Kota. Bentuk tekanan lainnya yaitu raskin, jamkesmas dan lainnya. Penutupan lokalisasi di Surabaya dijadikan percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Semua pendanaan berasal dari Kemensos. Apabila dilacak lebih jauh, maka tak pernah Gubernur mengeluarkan surat perintah penutupan lokalisasi Dolly. Gubernur hanya mengeluarkan surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang berisi perintah pemulangan dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan. Tak ada tulisan yang menunjukkan perintah penutupan lokalisasi Dolly, hanya pemulangan korban dari tindak perdagangan manusia (*human trafficking*).

Audiensi pertama diterima oleh DPRD dan mereka tidak mengatakan 'ya' atau 'tidak'. Mereka tidak ingin terjebak dalam persoalan menutup lokalisasi Dolly atau tidak. Waktu itu, disampaikan apa masalahnya dan hendak melakukan apa. Karena banyak kiyai, maka pendekatannya melalui jalur itu. Tiba-tiba

kelompok-kelompok fundamentalis yang ada di Surabaya ataupun dari luar, datang ke Surabaya. Contohnya kelompok Madura Bersatu datang ber-bus-bus dan membawa senjata. Penampilan mereka tidak seperti yang dari Jawa Barat (memakai daster putih). Kelompok tersebut memakai sarung dan kaos. KPI waktu itu tengah diterima oleh DPRD, dan berjanji mempertemukan berbagai elemen yang terkait dengan penutupan lokalisasi Dolly.

Tri Rismaharini tidak menemui KPI, tetapi asistennya. Di luar forum, asisten Tri Rismaharini menyatakan setuju dengan KPI untuk langsung memulangkan korban penutupan lokalisasi. Artinya, mereka memahami itu namun karena kebijakan pusat, mereka harus melakukannya. Dari segi kepemimpinan perempuan, alasan Tri Rismaharini menutup lokalisasi, karena perdagangan perempuan dan anak serta narkoba. Bukan rahasia umum, apabila peredaran narkoba di tempat itu sangat tinggi dan massif. Di tiap sekolah ada koordinator pengedar narkoba, bahkan di dalam kelas sekolah. Bila memakai logika perempuan dan anak, para germo atau mucikari harus dipidanakan, namun ini tidak terjadi. Pendekatannya ialah mengajak para germo agar bersedia pulang dan mendapatkan sejumlah uang. Jadi, pendekatannya bersifat transaksional. Itu dilakukan, karena selama ini pendekatan lainnya tak pernah berhasil.

Penghuni Dolly ada yang dipulangkan ke tempat asalnya dan yang sukses juga banyak. Mereka lebih dahulu dilatih di Kediri kemudian dipulangkan ke kampung halamannya dan diberi modal usaha. Kini, faktanya yang menjadi pelacur *online* masih cukup banyak dan ada di taman-taman.

Dalam pemulangan perempuan korban pelacuran tersebut, Kemensos memberikan dana bantuan kepada Gubernur untuk menjembatani antar kota agar memastikan Dinsos menerima dan Dinkes memeriksa kesehatan mereka. Di Surabaya, perempuan korban pelacuran terlebih dulu diberdayakan sebelum dipulangkan. Itu betul-betul didukung oleh Tri Rismaharini. Selain memberdayakan mereka, ia pun memberikan pemahaman kepada

warga masyarakat sekitarnya agar menerima mereka. Wisma terbesar di Dolly dibeli oleh Pemkot untuk dijadikan pabrik agar mampu mempekerjakan mereka. Namun di kabupaten lain, itu belum terjadi karena perempuan korban pelacuran masih dianggap sampah masyarakat, sehingga tak ada yang menjemput mereka ketika kembali dari Surabaya. Hanya di Surabaya yang memiliki kebijakan bila ada warga masyarakat yang diperdagangkan di luar Surabaya, maka mereka harus dijemput. Pemkot Surabaya akan menjemput ke Papua, ke Batam, atau tempat lainnya. Penjemputan ini dilakukan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Kepemimpinan perempuan di Surabaya, menurut Wiwik, relatif berjalan walaupun Tri Rismaharini masih berlaku seperti malaikat. Ia mematenkan itu kedalam banyak aturan, namun tetap bertindak sebagai seorang ibu. Menurut kalangan birokrat, Tri Rismaharini konsen terhadap anak perempuan dan laki-laki, sehingga kerap melakukan razia malam di pos-pos di mana banyak kekerasan seksual terjadi. Meskipun razia yang dilakukannya tidak ada dasar hukumnya, kecuali Perda tentang Ketertiban Umum, namun itu tetap dilakukan. Oleh karena, akan menjadi masalah apabila anak-anak berada di luar rumah hingga larut malam atau dini hari. Anak-anak yang diambil dari jalanan tersebut kemudian dirawat di panti-panti sosial. Bila tujuannya demikian, dari sisi Perda, maka dasarnya adalah persoalan perlindungan. Memang ada peraturan mengenai jam anak-anak, namun harus ada toleransi anak-anak aman di luar rumah. Anak-anak yang diambil dari jalanan bila tak dijemput oleh orang tuanya, mereka tidak dipulangkan. Mereka dicuci otaknya dan itu dilakukan sendiri oleh Tri Rismaharini di kantornya. Tri Rismaharini turun melakukan operasi tersebut dengan didampingi oleh Satpol PP, Dinas PP, Dinkes, Dinas Pendidikan, dan kepolisian.

Terlihat mengapa Tri Rismaharini melakukan hal teknis itu, jelas Wiwik, karena perempuan dicap 'detail'. Hal itu melekat pada perempuan, juga di Tri Rismaharini. Ia mengerjakan itu, kemudian semua pejabatnya turun tangan. Kebijakan Tri Rismaharini yang

berpihak kepada perempuan terkait dengan kebersihan kota Surabaya. Oleh karena, perempuan yang paling dirugikan ketika air bersih untuk kesehatan reproduksi perempuan tidak tersedia. Ia berusaha luar biasa melalui Dinas pertamanan agar Dinas diberi giliran piket membersihkan sungai dan pinggir sungai. Itu melibatkan semua Dinas dan warga setempat. Misalnya hari ini Badan PP dengan warga setempat membersihkan sungai, maka esoknya Dinas Pendidikan melakukan hal yang sama dengan warga di sungai lainnya.

Di Surabaya, Kepala Dinas Kebakarannya perempuan. Di mana-mana hal demikian tidak awam. Itu untuk mematahkan cap bahwa Dinas Kebakaran itu maskulin, karena memadamkan api, membawa mobil besar, dan seterusnya. Menjadi kekhawatiran juga, apabila 'praktik-praktik baik' ini tidak dikunci dalam aturan hukum yang jelas agar bisa memastikan keberlanjutan program dan anggarannya.

Di Surabaya, perempuan pemimpin di lembaga eksekutif jumlahnya cukup banyak, contohnya Dinas PP, humas Pemkot, dan dinas kesehatan. Kemudian, camat perempuan jumlahnya berkisar 10-20 persen, demikian pula di tingkat lurah dan RT. Sekarang, ketua RT perempuan mulai diterima di masyarakat, begitu juga lurah perempuan. Di Semampir, camatnya perempuan. Ditemukan cukup banyak camat yang tak paham tentang gender, umpamanya di Wuyung. Ketika ditanya dalam penjurian yang melibatkan narasumber *Gender Award* tentang anggaran responsif gender, ia menjawab tidak melakukannya karena takut ditangkap oleh KPK, bila anggarannya untuk perempuan. Ia tidak memahami mengenai 'arusutama' anggaran bagi kepentingan perempuan. Camat di Rungkut laki-laki, namun berperspektif gender, maka ia meminta perusahaan-perusahaan mengembangkan ekonomi ibu-ibu miskin. Di Semampir, ibu camat, karena tidak memiliki anggaran pembangunan yang cukup, ia memasang kelambu di bawah tangga yang diberi meja dan kursi. Kemudian ia menulis di tempat itu "Ruang ASI". Ini sebagai upaya perempuan untuk membuat ruang

ASI. Di kecamatan lain, ada camat perempuan yang memiliki ruang merokok yang bagus, namun tidak memiliki ruang ASI. Ditemukan pada periode sebelumnya, ruang ASI di kantor Dinas Perempuan dan Anak ada di lantai bawah, kemudian dipindah lokasinya di lantai dua, karena ruangnya menjadi tempat *display* kegiatan ekonomi bantuan PT. Sampoerna, Tbk. Di Surabaya, ada laki-laki penggerak PKK, program KB untuk laki-laki, dan mereka mempromosikan KB. Inilah program Pemkot Surabaya.

Di Surabaya, 15 persen perempuan duduk di legislatif. Sekarang DPRD ikut dalam penguatan perempuan dan anak-anak dalam isu kesehatan reproduksi, anti narkoba, dan kekerasan terhadap anak. Mereka mulai terlibat dan datang ke sekolah-sekolah, baik anggota legislatif laki-laki maupun perempuan. Di kalangan anggota DPRD perempuan, bila mengusulkan anggaran, mereka malu-malu dan tak cukup kuat menguasai materinya, kecuali yang sudah dua periode berada di DPRD, seperti Agustin Poliana (PDIP) dan Retno (Partai Demokrat). Anggota dewan yang terlihat cukup memperjuangkan anggaran peka gender ialah Agustin Poliana. Ia memasukkan isu kader Posyandu dan lainnya ke penganggaran. Perjuangan ini sulit karena mencakup masalah perlindungan sosial. Usulan tersebut sudah berhasil. Untuk implementasi Perda mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak, persoalannya ialah belum terbentuk pusat layanan terpadu. Aturan walikota Surabaya berjalan cukup baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Advokasi selama ini dilakukan bersama anggota legislatif perempuan dengan pendekatan 'perempuan mendukung perempuan', 'perempuan mendidik perempuan' dan 'mendukung perempuan pemimpin'. Namun demikian, anggota legislatif laki-laki juga harus terlibat. Di DPRD kota Surabaya, apabila yang mengajukan rancangan Perda dari kalangan eksekutif, maka mereka jarang melibatkan masyarakat sipil (LSM).

Anggota legislatif perempuan masih mau turun ke warga ketika sedang reses. Artinya, sejauh ini mereka masih menjaga komunikasi dengan basis massa atau konstituennya. Namun

ada pemahaman yang keliru di kalangan perempuan pemimpin (DPRD), bahwa bila turun ke basis harus membawa 'sesuatu'.

Anggota dewan yang dekat dengan kelompok-kelompok perempuan, menurut Wiwik, misalnya Diah Katarina, Khusnul, Agustin Poliana, Retno, Herlina Harsono Njoto, Dini, Agatha dan Kusanah.

Tantangan Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Tantangan terhadap kepemimpinan perempuan berasal dari partai politik, karena menekan anggota legislatif perempuan untuk membagi kerjanya di DPRD, konstituen, rumah tangga, komunitas, dan partai sendiri. Banyak di antara mereka yang hadir di partai politik sebatas formalitas dan tidak menyumbangkan gagasan atau memeras jiwa raga demi memperbaiki partai politiknya. Menurut Wiwik, partai politik terkesan memanfaatkan perempuan. Perempuan yang pintar justru tidak mendapat porsi di partai politik, karena 'gengsi' melakukan segala hal, seperti menyanyi, mc, dan lainnya. Partai politik lebih menyukai orang yang tidak merasa gengsi. Sementara aktivis perempuan yang mencalonkan diri, karena pintar, mereka gengsi melakukan itu sehingga kurang mendapat 'hati' di partai. Partai politik belum melihat potensi kalangan perempuan secara lebih substantif.

Aktivis perempuan yang maju menjadi pemimpin harus melihat tantangan tersebut, apalagi banyak pengurus partai yang mencalonkan istrinya juga. Kadang kala sebagai aktivis perempuan harus memahami segi lainnya. Tidak sekadar pintar, memiliki konstituen, paham substansi, tetapi harus luwes dalam bertindak dan mengambil peluang. Selama itu tidak merendahkan martabat perempuan dan melanggar aturan hukum, maka melakukan hal-hal teknis, tidak masalah. Buktinya, hal itu sangat efektif. Mereka yang melakukan hal-hal teknis justru mendapat dukungan dari pengurus partai politik dan menjadi anggota dewan, sedangkan yang pintar tidak berhasil. Masih banyak perempuan pemimpin yang tidak mau belajar dari pengalamannya.

Tantangan berat yang mereka hadapi kini ialah eksekutif dan legislatif menjadi mitra kerja yang baik. Kenyataannya mereka menanamkan pandangan yang berbeda, yaitu bukan mitra kerja. Legislatif berfungsi mengawasi eksekutif sehingga harus ditempatkan sebagai mitra kerja, maka kritiknya hendaknya dipahami sebagai saran yang membangun. Dalam hal itu, terkesan ada 'ego sektoral' padahal mereka saling membutuhkan. Dengan pandangan yang terkotak-kotak itu, kerja-kerja mereka menjadi tidak terkolaborasi dengan baik dan sinergis. Akan tetapi, orang setingkat Agustin Poliana cukup bagus, karena menjadi Ketua Komisi dan Badan Anggaran di DPRD kota Surabaya. Anggota DPRD yang bagus lainnya ialah Retno. Ia berani mengingatkan teman-temannya, kalau perempuan jangan takut, apalagi duduk sebagai anggota dewan.

Anggota legislatif perempuan belum banyak menghasilkan Perda yang bermanfaat bagi perempuan. Anggota DPRD yang paling 'vokal' ialah Agustin Poliana dan Retno. Artinya, hanya 5 persen anggota legislatif perempuan yang aktif berjuang menangani isu-isu yang bersinggungan dengan kepentingan perempuan.

Wiwik memaknai kepemimpinan perempuan sebagai kemampuan perempuan memimpin dirinya sendiri, lingkungannya, dan publik. Yang tampak ialah, bahwa kebanyakan mereka belum mampu memimpin dirinya sendiri, tetapi hendak memimpin publik, sehingga terombang-ambing, karena keyakinan dalam dirinya belum selesai. Manakala kepemimpinan perempuan dibenturkan dengan hadis-hadis kitab suci, umpamanya. Mereka belum selesai bila dibenturkan dengan masalah prostitusi, akibatnya mengatakan bahwa itu merusak moral bangsa. Harapannya, perempuan pemimpin selesai dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, kemudian berproduktivitas di ruang publik.

Wiwik ingin agar kota Surabaya memiliki warga masyarakat yang terbuka pemikirannya, termasuk komunikasinya, maka menjadi peluang bagi kalangan perempuan berkiprah di Surabaya. Apalagi saat ini hasil kerja tokoh-tokoh perempuan dapat

dinikmati, maka peluang dan harapannya, perempuan pemimpin bisa menyejahterakan warga masyarakat. Demikian pula, apabila pemimpin laki-lakinya memiliki perspektif perempuan yang baik, sehingga jika tidak ada perempuan pemimpinnya, mereka bisa diharapkan membela kaum perempuan.





IV. FITRI NORA

(anggota DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat)

Biografi Singkat

Fitri Nora, A.Md., lahir di Pariaman, 7 Januari 1970. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di STIE Kerjasama, Yogyakarta, bidang keuangan dan perbankan, dengan gelar diploma (D3). Sekarang Fitri Nora menjadi anggota DPRD kota Pariaman dari Partai Gerindra.

Fitri Nora aktif di pramuka sejak bersekolah. Karena menurutnya, mengikuti kegiatan tersebut membangun rasa kebersamaan, kemandirian, tanggung rasa, dan empati. Sejak berkuliah di Yogyakarta, Fitri Nora terlibat dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Minang. Ia pernah bekerja di perusahaan, namun karena krisis moneter, ia kembali ke Padang. Akhirnya ia bertemu dengan Fitriyanti, aktivis perempuan yang mengajaknya bergabung di LSM, yang bernama Lembaga Pengembangan Pendekatan Partisipasi.

Dalam kurun 2000-2004, Fitri Nora dan Fitriyanti mendirikan LSM perempuan yang bernama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), sekretariat wilayah Sumatra Barat. Tahun 2001, ia menjadi anggota Tim 5 untuk sosialisasi *Gender Budgeting* KPI Sumatra Barat. Sejak 2010 hingga kini, Fitri Nora menjabat sebagai Presidium Wilayah Sektor Informal di KPI Sumatra Barat. Karena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, tahun 2004, Fitri Nora bersama temannya di LBH Padang mendirikan organisasi bernama Perempuan Pariaman Berdiskusi (PADUSI). Sejak 2006, Fitri Nora menjadi Ketua PADUSI. Tahun 2008-2016, Fitri Nora diangkat menjadi Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pariaman. Fitri Nora bersama dengan KPI terlibat dalam proses otonomi Kota Pariaman, tahun 2002. KPI tercatat dalam buku sejarah otonomi

Kota Pariaman, karena berkontribusi dalam pengorganisasian massa.

Pengalaman Berpolitik

Sekarang Fitri Nora adalah anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019 dari Partai Gerindra dan menjadi Ketua Fraksi. Ia menjabat sekretaris Komisi III Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, dan anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Pariaman.

Awalnya Fitri Nora tidak ingin terjun ke dunia politik, tetapi tahun 2003 *Asia Foundation* mengundangnya mewakili Lembaga Pengembangan Pendekatan Partisipasi Padang menghadiri diskusi tentang kepemimpinan perempuan. Dari acara diskusi itu, ia terdorong terjun ke politik. Tahun 2009, ia bergabung di Partai Gerindra dan memberanikan diri menjadi calon anggota DPRD Kota Pariaman. Mulanya, ia yang berlatar belakang aktivis mengira masuk partai politik sama seperti masuk LSM. Ternyata ada perbedaan basis massa antara ‘masyarakat sipil’ (LSM) dengan ‘masyarakat politik’. Basis masyarakat sipil tidak terbentuk sejak awal, akibatnya bisa pindah ke lain pihak. Ia merasa kecewa waktu itu, karena gagal menjadi calon anggota DPRD Kota Pariaman tahun 2009. Sebetulnya, ia memperoleh jumlah suara terbanyak kedua di daerah pemilihannya, tetapi karena berjuang sendirian, tanpa dukungan partai politik, sehingga tidak berhasil. Walaupun tidak berhasil menjadi anggota DPRD kota Pariaman waktu itu, ia tetap menjalankan kegiatan pendampingan, penguatan masyarakat, membuat *talkshow* di radio, dan sosialisasi di masyarakat.

Pemilu legislatif 2014 yang lalu, Fitri Nora mencalonkan diri kembali di DPRD Kota Pariaman, dengan Daerah Pemilihan II, yang meliputi Pariaman Timur dan Pariaman Selatan. Pemilu 2014, ia mengubah pola kerjanya untuk menggalang dukungan suara dari ibu-ibu anggota KPI, yaitu penguatan terhadap 200 perempuan lanjut usia melalui kelompok senam di tempat

tinggalnya. Kelompok senam ini mulai aktif tahun 2013, sebelum ia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD tahun 2014. Hasilnya, tahun 2014, dari 20 anggota DPRD Kota Pariaman, ia meraih suara terbanyak kedua. Daerah pemilihannya meliputi Pariaman Timur dan Pariaman Selatan, yang terdiri atas 2 kecamatan, 32 desa. Di sana, ia memperoleh 1.142 suara.

Pemilih Fitri Nora mayoritas adalah perempuan, yang bertahun-tahun ia dampingi. Di samping itu, melalui peran suaminya di Pegawai Negeri Sipil, ia membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan akses layanan pemerintah, seperti perumahan layak huni dan dana Badan Amil Zakat kota Pariaman, jadi mereka memilih dan memercayai dirinya duduk di DPRD Kota Pariaman.

Fitri Nora berasal dari keluarga aktivis Aisyiah. Ibu mertuanya ialah ketua Aisyiah Kota Pariaman, dan mertua laki-lakinya pendiri Muhammadiyah Kota Pariaman. Ia menyadari banyak persoalan perempuan, karena ibunya seorang bidan. Sejak kecil, ia melihat ibunya membantu persalinan perempuan di desa dan mendapati masalah perempuan seperti jarak kelahiran yang rapat, tidak boleh ber-KB oleh suami, gizi yang buruk selama kehamilan, KDRT, tekanan dari keluarga dan masyarakat yang menuntut perempuan menjadi *super women* sehingga mengalami beban ganda. Almarhum ayah Fitri Nora adalah birokrat yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerjanya. Ia melarang anaknya bersikap sombong dan memanfaatkan posisi orang tuanya, karena tiap orang harus berupaya sendiri.

Tahun 2009, Fitri Nora melakukan penguatan kelompok pengajian (Majelis Taklim), akan tetapi dari 165 anggotanya, ia hanya meraih 2 suara dari mereka. Pada Pileg 2014 yang lalu, ia menggalang dukungan suara dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Ia mencari orang-orang yang perlu dibantu di desa-desa dan memfasilitasi mereka ke dinas sosial. Ia memiliki kader laki-laki dan perempuan di desa-desa yang tugasnya mencari orang-orang dari keluarga yang tidak mampu namun memerlukan

layanan kesehatan, seperti penyakit kronis. Di kota Pariaman ada dana Jaminan Kesehatan Keluarga Sejahtera (JKSS) sebesar Rp. 10 juta sebagai bantuan.

Menurut Fitri Nora, Partai Gerindra tidak memungut iuran ketika merekrut kader partai yang baru. Untuk calon anggota dewan, Partai Gerindra memungut biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- dan anggota legislatif yang terpilih wajib berkontribusi ke Partai Gerindra sebesar 10 persen dari pendapatannya per bulan.

Saat pencalonan, Partai Gerindra memberikan modal awal bagi calon anggota dewan dengan membayar jasa saksi di tiap desa sebesar Rp. 1 juta per desa. Untuk Kota Pariaman terdapat 71 desa. Ia mendapatkan Rp. 66.000.000,- untuk biaya saksi. Untuk biaya pemeriksaan kesehatan, ini ditanggung sendiri oleh calon anggota dewan terkait. Biaya kampanye Partai Gerindra ditanggung oleh semua calon anggota dewan bersama-sama. Calon anggota untuk DPR RI dan DPRD Provinsi bergandeng tangan dengan calon anggota DPRD kabupaten/kota membuat spanduk dan sosialisasinya. Misalkan ada 6 caleg Partai Gerindra untuk DPR RI, maka mereka berbagi membiayai beberapa caleg DPRD kabupaten/kota. Partai Gerindra aktif melakukan kampanye di media sosial di tingkat pusat, sehingga itu membantu caleg Partai Gerindra di daerah. Fitri Nora memilih Partai Gerindra, selain ideologinya menurutnya, karena partai ini baik di mata masyarakat.

Walaupun partai tersebut tidak memiliki kebijakan tertulis di internalnya mengenai keterwakilan 30 persen perempuan, tetapi budaya politiknya mengakomodir kesetaraan gender. Di Sumatra Barat, ketua fraksinya adalah perempuan. Sebagai contoh, ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kota Padang dan DPRD Kota Padang Panjang, adalah perempuan. Di beberapa daerah, perempuan menjadi pimpinan DPRD. Partai Gerindra tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki untuk duduk dalam posisi kepengurusan partai. Partai Gerindra sangat mendukung perempuan duduk dalam kepengurusan, asalkan mau dan mampu. Fitri Nora pernah ditawari

jabatan ketua Partai Gerindra kota Pariaman, namun menolaknya karena kesibukannya yang luar biasa sebagai istri PNS (Dharma Wanita dan PKK).

Partai Gerindra mendukung kemajuan perempuan, karena terbukti dibentuknya sayap organisasi yang khusus dikelola oleh perempuan, yaitu Perempuan Indonesia Raya (PIRA) dan Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA). Fitri Nora adalah ketua PIRA di Kota Pariaman. Menurutnya, tak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis dan agama di Partai Gerindra. Oleh karenanya, ia memilih partai ini karena ideologinya bersifat egaliter, sama dengan ideologi LSM. Yang dikejar oleh partai bukan kekuasaan, tetapi kebahagiaan. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa manusia yang bermanfaat ialah yang berguna bagi orang lain, jangan tergila-gila dengan kekuasaan. Dalam Pilkada 2017 mendatang, Partai Gerindra tidak *jor-joran* mencari kekuasaan, tetapi lebih menekankan bagaimana anggota Partai Gerindra yang terpilih sekarang menjalankan amanat dan membuktikan bahwa masyarakat tidak sia-sia memilihnya.

Walaupun belum ada tindakan khusus partai dalam memberikan kedudukan yang setara antara perempuan dengan laki-laki di dalam AD/ART, tentu militansi kader tidak dinilai dari jenis kelamin, asal-usul dan suku bangsa, melainkan kinerja untuk partai dan masyarakat. Partai Gerindra tidak mengultuskan jenis kelamin tertentu. Banyak calon anggota legislatif perempuan di Partai Gerindra yang modalnya 'kemampuan' dan bukan uang. Ada calon anggota legislatif perempuan yang tidak di posisi nomor satu, namun dikenal masyarakat dan menang pemilu.

Fitri Nora berharap sistem pemilu yang digunakan tidak proporsional tertutup, karena dengan ini akan banyak perempuan yang tidak ingin menjadi anggota dewan.

Untuk pengembangan kapasitas kader partai, ini diserahkan ke Dewan Pimpinan Cabang Gerindra. Dana kontribusi anggota

dewan dari Fraksi Gerindra dikelola DPC untuk pengembangan kader. Pengembangan kapasitas kader biasanya dilakukan melalui pertemuan kader. Temu kader nasional dilakukan dua kali setahun guna pembekalan kader-kader. Sebagai contoh, Partai Gerindra pernah melakukan pertemuan yang dihadiri sekitar 2000-an anggota legislatif dari seluruh Indonesia di Hambalang, Jawa Barat, dengan tujuan ‘membumikan’ anggota legislatif. Untuk meningkatkan militansi kader, partai ini memiliki Pusat Latihan Kader. Kader dididik secara semi militer selama 40 hari. Mereka dibekali pengetahuan mulai dari baris berbaris, wawasan kebangsaan, dan materi lain yang menggugah rasa kebangsaan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas kader, materi pendidikan yang diberikan berbeda-beda, misalnya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Para kader melaporkan apa yang dikeluhkan konstituen di dalam pertemuan-pertemuan kader. Setiap tahun, tiap calon anggota legislatif membiayai seorang kader untuk mengikuti pembekalan.

Guna memberikan kesempatan kepada perempuan bergerak di masyarakat, Partai Gerindra memberikan fasilitas mobil ambulans untuk program KESIRA dalam rangka membantu kegiatan walikota dalam layanan kesehatan. Mobil ambulan itu diberikan oleh DPP Partai Gerindra, sedangkan biaya operasional mobil diperoleh dari kontribusi anggota legislatif, yang di kelola oleh DPC.

Saat pemilihan legislatif, Partai Gerindra menyiapkan ribuan Sarjana Penggerak Desa (SPD) yang sengaja direkrut untuk membantu sosialisasi calon-calon anggota dewan. Mereka diberi alat-alat yang canggih, seperti laptop, HP android terbaru, *OHP slide*, dan *LCD projector* untuk mensosialisasi partai. Partai Gerindra menempatkan satu SPD untuk satu daerah pemilihan di seluruh kecamatan di Indonesia.

Motivasi Fitri Nora menjadi calon anggota legislatif ialah mencari kekuatan membantu LSM melakukan kegiatan-kegiatannya. Ia merasakan sebagai aktivis LSM mengalami

kesulitan manakala berhadapan dengan kebijakan, khususnya dalam pendampingan kasus KDRT dan perkosaan. Posisi LSM akan ditanya sebagai apa, dan paralegal tidak boleh masuk kedalam persidangan. Di Indonesia, lobi dan koneksi sangatlah penting. Setiap tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Ketika bertemu dengan Kapolres misalnya, kami akan ditanya apa itu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Tetapi dengan posisi dirinya sebagai anggota dewan, perlakuan aparat penegak hukum akan berbeda. Mereka akan lebih ramah dan kooperatif dalam membantu penanganan korban kekerasan. Anggota dewan di tingkat provinsi banyak yang menganggap Fitri Nora sebagai orang LSM, bukan politisi partai.

Sebagai satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman, baik di Komisi III maupun di Badan Anggaran (Banggar), Fitri Nora merasa sulit menghadapi retorika dan tembok tinggi birokrasi dewan yang sukar ditembus. Di antara teman sejawat anggota dewan di Banggar misalnya, hanya dua orang laki-laki anggota dewan dari Fraksi Gerindra, maka ia mengalami kesulitan ketika terjadi *voting*. Menurutnya, seharusnya UU Pemilu dapat memaksa KPU tidak melantik anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih, sebelum jumlah anggota legislatif perempuan mencapai 30 persen. Jika ada calon anggota legislatif yang suaranya sama, maka yang diprioritaskan harusnya perempuan.

Fitri Nora mendapat pembekalan tentang fungsi DPRD dari KPI, yaitu apa fungsi legislasi, pengawasan, dan cara membaca anggaran. Dan penentuan daerah pemilihan (dapil), ia mendapatkan wilayah di sekitar tempat tinggalnya. Basis perempuan di LSM berbeda dengan basis perempuan di politik. Hal ini dibuktikan ketika ia memperoleh dukungan masyarakat di wilayah tempat tinggalnya, setelah melakukan sosialisasi dan penguatan selama setahun, melalui kegiatan senam pagi bersama 150 perempuan lanjut usia (lansia). Hingga sekarang, kegiatan senam itu terus berlangsung setiap minggu. Dari 800 pemilih di dapilnya, Fitri Nora hanya mendapat 25 persen jumlah suara dari

pemilih, dan dari 3 lokasi TPS, ia mendapatkan 200 suara.

Praktik Kepemimpinan Di DPRD

Sepanjang menjadi anggota dewan di DPRD Kota Pariaman, capaian-capaian Fitri Nora antara lain:

- a. Pertengahan Juni 2015, Fitri Nora membuat pernyataan politik sebagai anggota DPRD Kota Pariaman yang meminta dinas pendidikan membuat surat edaran pelarangan bagi sekolah untuk mewajibkan pembelian seragam sekolah agar tak membebani orang tua siswa setiap masuk tahun ajaran baru. Bila ada sekolah yang berani memaksa orangtua siswa wajib membayar seragam sekolah, maka sekolah itu tidak akan diberi anggaran tahun 2016 oleh DPRD Kota Pariaman.
- b. Menginisiasi dan mendorong terbitnya aturan larangan merokok dalam setiap rapat di DPRD Kota Pariaman (tercantum dalam Peraturan No.1/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pariaman dan Peraturan DPRD No.2/2014 tentang Kode Etik DPRD Kota Pariaman). Bagi anggota DPRD yang merokok saat sidang berlangsung, maka akan diberi sanksi berupa teguran lisan. Aturan larangan merokok ini mendukung kebijakan Wali Kota Pariaman tentang himbauan untuk tidak merokok di ruangan kerja.
- c. Fitri Nora bekerjasama dengan KPI wilayah Sumatra Barat terlibat dalam advokasi revitalisasi Pasar Nagari Kurai Taji di Kota Pariaman. Selama pasar direvitalisasi, para pedagang disediakan pasar darurat. Persoalan muncul ketika komunikasi antara pemerintah kota dan para pemilik toko di pasar tidak terjalin dengan baik terkait pembagian petakan toko di pasar yang akan direvitalisasi. Pasar Nagari Kurai Taji dibangun di atas tanah ulayat dan kepemilikan petakan toko terdiri atas beberapa

suku atau kaum yang turun-temurun, bukan atas nama sertifikat pribadi. Seharusnya, pemerintah kota tidak memberikan jatah hanya satu petakan kepada pemilik, karena kepemilikan beberapa suku atau kaum pedagang pasar selama ini lebih dari satu petakan. Berbagai upaya advokasi dilakukan oleh Fitri Nora melalui diskusi publik waktu reses, dengan mendatangkan narasumber ahli tanah ulayat dari Universitas Andalas Padang. Diskusi ini melibatkan lembaga adat, kelompok pedagang di Pasar Nagari Kurai Taji, dan dengar pendapat antara kelompok pedagang dengan anggota DPRD Kota Pariaman.

- d. Fitri Nora mengajukan peningkatan anggaran P2TP2A Kota Pariaman tahun 2015/2016 menjadi Rp. 50.000.000,- per tahun. Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000,-. Selama ini, ia tak segan-segan mengeluarkan uang pribadi untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tanggapan Terhadap Kepemimpinan Fitri Nora

Fitriyanti, Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia, Sumatera Barat, menjelaskan bagaimana kepemimpinan Fitri Nora. “Ibu Nonon (nama panggilan Fitri Nora) mudah dihubungi oleh KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sumatra Barat. Sebagai contoh, saat KPI sedang menangani kasus pelecehan seksual dan kesulitan anggaran. KPI langsung menghubungi Ibu Nonon dan beliau langsung mengontak P2TP2A dan Dinas Sosial untuk membantu penanganan kasus. Ibu Nonon membantu kami dengan membuka akses informasi dan jaringan yang beliau miliki. Jika memang diperlukan, Ibu Nonon tak segan-segan datang dan bersama KPI menangani kasus. Ibu Nonon juga tidak sok pintar, kalau beliau tidak tahu tentang suatu isu, beliau minta bantuan KPI memberikan informasi. Kalau beliau perlu bantuan pengawalan advokasi kebijakan, beliau tak segan-segan meminta bantuan KPI untuk pengawalan di DPRD Kota Pariaman. Ibu Nonon merupakan sosok

yang cara berpikirnya terbuka dan mau menerima masukan, karena beliau memiliki latar belakang aktivis NGO. Beliau dekat dengan gerakan perempuan dan P2TP2A. Tantangan berat bagi Ibu Nonon sebagai anggota legislatif adalah karena dia satu-satunya anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Pariaman, maka sulit bagi dia untuk mempengaruhi pengambilan keputusan ketika sudah deadlock atau dilakukan voting untuk membuat keputusan.”



Pertemuan dengan Pedagang Pasar Nagari Kurai Taji.
 Dalam Rangka Advokasi Menolak Penggusuran Pasar Nagari Kurai Taji



Kegiatan Pertemuan Senam Lansia di Wilayah Tempat Tinggal Fitri Nora

V. SAHAT FARIDA BERLIAN

(anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat)

Biografi Singkat

“Menjadi presiden perempuan di Republik Indonesia tidak mudah!” Ini pernyataan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden ke lima RI, dalam acara *Kick Andy Show* yang ditayangkan di stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu.

Bagi Sahat, pernyataan itu diterjemahkan “tidak mudah menjadi pemimpin perempuan di Indonesia”. Berhadapan dengan tradisi patriarkhi, baik dari perempuan maupun laki-laki. Patriarkhi yang menggunakan agama dan budaya sebagai kedoknya.

Sahat Farida Berlian, S.Pd, lahir di Jakarta, 4 September 1983. Sekarang ia menjadi anggota DPRD Kota Depok periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak di PDI Perjuangan Kota Depok.

Pramuka adalah organisasi pertamanya. Di sekolah dasar dan menengah pertama Sahat aktif di kegiatan Pramuka. Pramuka memiliki peran dalam pengembangan dirinya, beberapa keterampilan juga ia pelajari.

Di SMA, ia terlibat dalam OSIS dan memprakarsai majalah dinding di SMA Bhayangkari. Di SMA, ia juga pernah memiliki grup band yang semua personilnya adalah perempuan. Sahat sebagai gitarisnya. Berorganisasi, membaca, menulis, dan musik adalah kesukaanya.

Sahat melanjutkan pendidikan di jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di

kampus, ia terlibat aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika. Pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi, hingga akhirnya Sahat bergeser ke Tabloid Transformasi, Universitas Negeri Jakarta.

Di tabloid ini, ia dipercaya sebagai editor. Di luar kampus, Sahat terlibat di Front Perjuangan Pemuda Indonesia, salah satu organisasi pergerakan pemuda yang ada di Indonesia. Masuk melalui FPPI Jakarta, terakhir Sahat dipercaya di bidang riset dan data Pimpinan Nasional FPPI.

Pengalaman Berpolitik

Akhir tahun 2011, diajak oleh Masinton Pasaribu, Sahat akhirnya bergabung di PDI Perjuangan. Masinton Pasaribu adalah ketua umum Relawan Perjuangan Demokrasi, organisasi sayap pemuda PDI Perjuangan.

Di organisasi inilah Sahat belajar dan beradaptasi sebagai anggota partai. Selain menjabat sebagai Wasekjen, Sahat pun dipercaya mengelola media online *repdemnewsdotcom*.

Sebelum akhirnya bergabung di partai, Sahat bekerja di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ia pernah menjabat manajer kampanye dan advokasi Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Menjadi pengajar dan jurnalis juga pernah dilakoninya.

PDI Perjuangan memiliki jenjang pendidikan yang berbasis ideologis maupun organisasional. Untuk itu, tidak serta merta anggota partai bisa langsung mendaftar dan mengikutinya. Ada mekanisme tersendiri untuk bisa mengikuti kegiatan pendidikan tersebut.

Terkait dengan pelatihan-pelatihan, PDI Perjuangan memiliki komunikasi dengan partai politik di tingkat internasional. Seperti beberapa waktu lalu, delegasi partai politik dari China datang bertukar pengalaman.

Demikian pula dari PDI Perjuangan, ada yang berangkat ke

China untuk bertukar pengetahuan. Sahat ingin menjadi salah satu delegasi yang diberangkatkan untuk belajar ke China.

Prosesnya terbilang cepat, bukan berarti tanpa bekal. Mengikuti kegiatan pendidikan kader pendidik, proses pendidikan kader di internal partai tingkat pusat, selanjutnya ditugaskan dalam pemenangan Pilkada Jakarta, dan Pilkada gubernur Jawa Barat.

Tahun 2013, ia dilamar oleh pengurus partai tingkat kecamatan guna memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di Depok. Sahat maju sebagai calon anggota legislatif pemilu di kota Depok. Ia tidak tertarik dengan politik uang. Ia membedakan antara biaya politik dengan politik uang. Baginya, politik uang sangat merusak tradisi demokrasi pemilu yang ada di Indonesia.

PDI Perjuangan, dalam pandangan Sahat, tidak menerapkan diskriminasi gender. Partai ini aman melenggang ketika keterwakilan 30 persen untuk perempuan ditetapkan. Stok anggota perempuan banyak, baik yang baru memulai ataupun yang sudah lama membaktikan dirinya melalui partai. Ia merasa diuntungkan dengan adanya aturan keterwakilan 30 persen tersebut. Tanpa regulasi ini, tak mungkin ia melaju seperti sekarang.

Ia berpendapat, dengan regulasi itu, ruang berpolitik bagi perempuan bisa direbut. Ke depan tidak hanya PDI Perjuangan, tetapi juga semua partai harus menyiapkan kader-kader perempuan sebagai politisi yang memiliki visi kerakyatan, dan politisi perempuan bukan pajangan.

Sahat menjelaskan, bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai anggota dewan, ada pakta integritas yang wajib disetujuinya. Ini berlaku untuk semua kader partai yang bertarung mendapatkan jabatan publik atau politik. Pakta integritas ini terkait aturan-aturan partai serta kontribusi dana guna pembeayaan partai.

AD/ART sebagai konstitusi partai mengikat semua anggotanya. Anggota partai yang tersebar di jabatan publik atau politik yang melanggar aturan akan menerima sanksi tegas langsung dari

Ketua Umum. Misalnya, penarikan kartu keanggotaan, pemecatan, diserahkan ke KPK, kepolisian, dan ke pengadilan. Semua itu berlaku di PDI Perjuangan.

Praktik Kepemimpinan Di DPRD

Di DPRD Kota Depok, ia ditempatkan partai di komisi D. Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Sosial, Budaya, Agama, Pemuda, Perempuan, Anak, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Riset Teknologi merupakan isu kerja yang ada di komisi D. Menurutnya, semua isu kerja itu berkorelasi satu dengan yang lainnya.

Ia memiliki pemikiran tersendiri soal perempuan dan anak, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, agama dan politik. Dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan, yang membuat aturan atau kebijakan, ia mendorong terbentuknya kebijakan mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Isu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan bukanlah isu yang menarik di Depok. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan merupakan salah satu janji kampanye Sahat, yang juga program pertamanya.

Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Sahat berupaya sebaik mungkin menjalankan perannya sebagai wakil rakyat di dewan. Perda yang menjadi janji kampanyenya diusulkan, namun sayang Raperda tersebut belum dibahas dan disahkan. Di DPRD senantiasa terjadi dinamika, tarik menarik, dan pertarungan gagasan.

Jika awalnya diusulkan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Ketika masuk dan dikaji di Badan Legislasi, usulan itu berubah menjadi Perda Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan ditunda pembahasannya untuk sementara waktu.

Ditunda, bukan berarti dibatalkan. Ia berencana mengusulkan kembali Raperda ini untuk tahun sidang 2017. Ia berbagi tantangan yang dihadapinya ketika mengusulkan dan mengupayakan Perda tersebut. “Punya anak aja elo kagak!” demikian sinisme yang dilontarkan kepadanya ketika memperjuangkan Perda itu.

Serangan terhadapnya bukan lagi di tataran ide atau gagasan, namun sudah personal. Serangan datang bukan hanya dari fraksi partai lain, tetapi juga dari fraksinya sendiri. Ia menyaksikan betapa bias cara pandang beberapa anggota dewan dalam menyikapi kasus kekerasan.

Jika ada anak-anak yang menjadi korban, maka ibunya yang harus disalahkan, begitulah kira-kira tanggapan rekannya, yang juga perempuan. “Tak perlu menunggu bertambahnya korban untuk membuat regulasi ini,” ujar Sahat.

Dukungan Berbagai Pihak

Sebagai politisi muda, Sahat tentu membutuhkan banyak dukungan. Dukungan penuh ia dapatkan dari keluarganya. Sejak masa pencalegan hingga kini, keluarganya mengetahui dan mendukung apa-apa yang dilakukannya dengan terkait kegiatan politiknya.

Pada acara PDI Perjuangan yang dilaksanakan pada 24 April 2016, lokakarya politik tentang “Kemajuan Perempuan sama dengan Kemajuan Peradaban Bangsa”, inisiatif memperingati Hari Kartini, pewawancara bertemu dengan kedua orang tua Sahat. Mereka mengikuti rangkaian acara dengan serius. Ini menunjukkan perhatian dan dukungan keluarganya.

Selain keluarga, Sahat pun mendapat banyak dukungan dari kawan-kawannya yang memiliki ‘keresahan’ yang sama. Mereka membantu ketika ia mencalonkan diri menjadi anggota dewan, menitipkan harapan, memberikan suara mereka, bahkan uang. Inilah modal sosial yang sangat besar, dan ia menyadari itu.

Modal uang dan sarana kampanye, waktu itu, ia tak

memilikinya. Pileg 2014 yang lalu, ia tidak memiliki *billboard*, tidak membagi-bagikan mukena, sembako, uang; tidak men-cor jalan, dan lainnya. Modal uang yang dikeluarkannya kurang dari Rp. 100 juta. Ini pun sumbangan dari teman-temannya (ada yang memberikan Rp. 10 ribu, Rp. 20 ribu, Rp. 100 ribu, Rp. 1 juta).

Hingga jabatan diembannya, teman-temannya masih senantiasa mendukungnya. Memberikan kritik dan saran terkait apa-apa yang menjadi persoalan di Kota Depok memang terletak tugas pengawasan di dalam jabatannya.

Kinerja Sahat selama ini tidak dipublikasikan secara serius dan sistematis. Ada *website* milik pribadi, namun belum maksimal dipergunakan, karena tidak ada orang dan dana untuk mengelolanya. Publikasi melalui media sosial juga belum serius dikerjakan, hanya sambil lalu. Ia *mem-posting* informasi tentang kegiatannya di parlemen, bila kebetulan perlu.

Laporan-laporan yang ia terima dari teman-teman ataupun warga Depok secara umum tentang layanan publik selalu disampaikannya ke dinas-dinas terkait. Sms, *facebook*, *twitter* menjadi media interaksinya dengan masyarakat.

Ada kasus di mana warga melaporkan kepadanya, melalui *facebook*, terjadi pungli untuk membuat KTP dan akta kelahiran. Ia meresponnya dengan meneruskan laporan itu ke dinas yang bersangkutan. Itulah strategi untuk memperhadapkan warga masyarakat dengan pihak eksekutif yang bertugas melayani warga.

Selain memperjuangkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan, Sahat pun terlibat dalam ajuan dan pembahasan Raperda Sistem Kesehatan Daerah, yang menjadi usulan fraksi PDI Perjuangan. Ia berharap agar layanan kesehatan memihak kepada kaum marjinal.

Melalui Perda ini, diharapkan seluruh masyarakat Depok, baik yang memiliki BPJS maupun tidak, dapat mengakses layanan kesehatan. Di Depok, dalam periode jabatannya, PDI Perjuangan memimpin di DPRD, dan memaksakan betul percepatan perbaikan

layanan kesehatan masyarakat.

Di antaranya adalah dengan mengawasi secara ketat penambahan pembangunan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah. Beberapa tahun belakang, anggaran pembangunan RSUD menjadi silpa.

Sahat memiliki perhatian tinggi terhadap persoalan pendidikan di kota Depok. Masih kurangnya bangunan sekolah, ruang kelas belajar, tenaga pendidik, bahkan transaksi jual beli kursi di sekolah negeri merupakan beberapa persoalan pendidikan di kota ini.

Seperti yang disampaikan Ibu Megawati, Sahat menghikmat, tidak mudah menjadi perempuan pemimpin di negeri ini, dalam level wilayah apapun baik di nasional, propinsi, kota/kabupaten, bahkan organisasi-organisasi.

Sebagai perempuan lajang (belum menikah) ia kerap mendapatkan pertanyaan bahkan terkesan cemoohan karena statusnya. Meskipun hal itu disampaikan secara bercanda, namun bila diulang-ulang, tentunya menimbulkan ketidaknyamanan. Menurutnya, persoalan menikah adalah ranah pribadi yang tak perlu diumbar di publik.

Ia melanjutkan, bukannya ia tak memikirkan persoalan itu, namun ia berprinsip, semua ada waktunya. Untuk mengatasi persepsi masyarakat demikian, ia memilih melakukan apa yang bisa dilakukannya. Ia berusaha melakukan perubahan sekecil apapun. Perubahan yang lebih baik.

Hal lain yang dihadapi Sahat yaitu respon negatif orang-orang terhadap keberaniannya menyampaikan kebenaran. Dalam rapat-rapat di DPRD, ia menyatakan pendapat apa adanya. Ia menyampaikan apa yang menurutnya perlu disampaikan, namun tak jarang membuat orang lain merasa geram. Bagi sekitarnya, tak baik perempuan banyak bicara, apalagi yang menimbulkan kontra.

Meskipun perempuan menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan peran dan fungsi kepemimpinan, namun Sahat meyakini bahwa perempuan tak boleh menyerah terhadap keadaan. Perempuan pemimpin tetap penting dan berbeda dengan kepemimpinan umumnya.

Salah satu keunggulan pentingnya perempuan pemimpin ialah sensitivitas, khususnya terhadap mereka yang rentan, seperti perempuan. Contoh, salah satu kebijakan yang dilahirkan pada masa Megawati.

Masa itulah lahir UU PKDRT, tahun 2004. UU ini adalah UU yang pro-rakyat, khususnya bagi kaum perempuan. Sensitivitas ini belum tentu ada pada kepemimpinan umumnya. Bisa saja perempuan memiliki sensitivitas dalam kepemimpinan, bukan berarti laki-laki tidak memiliki itu, namun jarang laki-laki yang seperti itu.

Selain sensitivitas, keunggulan kepemimpinan perempuan menurut Sahat ialah perhatian terhadap detail. Dalam pengalaman Sahat, dalam sidang paripurna yang lalu, pertarungan yang menguras energinya ialah kenaikan tarif di puskesmas-puskesmas di Depok.

Ada kelompok yang ingin menaikkan tarif di puskesmas, sedangkan dirinya di posisi kontra (tidak ingin menaikkan tarif). Walaupun harus dinaikkan, alasannya harus jelas. Mengapa harus dinaikkan? Menurutnya, sebelum memutuskan sesuatu, perlu mengecek anggaran 10 persen untuk kesehatan dan dana kapitasi operasional puskesmas.

Dalam hal ini--sesuatu yang bersifat detail--perempuan jauh lebih unggul. Ia melanjutkan, sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan, perlu mengetahui hal-hal detail. Namun, perempuan sepertinya memiliki keunggulan tersendiri mengenai itu.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan janji pertama dan kedua semasa pencalegannya. Meskipun tidak tergabung di Badan Anggaran (Banggar), Sahat termasuk salah

satu yang memaksa bahwa pembahasan anggaran harus dibahas di komisi sebelum masuk ke Banggar dan kemudian disahkan di sidang paripurna.

Penting sekali, menurutnya, melakukan pengecekan penganggaran. Dalam pembahasan seperti inilah terlihat keberpihakan anggaran terhadap masyarakat. Pada awal jabatannya, ia mempelajari anggaran periode sebelumnya, dan ia menemukan program yang bertajuk 'responsif gender' namun aktivitas yang dilakukan adalah membuat lapangan bola voli.

Menurutnya, ini tidaklah tepat. Mengapa dananya tidak dipakai untuk pembelian alat-alat kontrasepsi bagi ibu-ibu muda yang tidak mampu, misalnya? Tentu akan jauh lebih bermanfaat.

Sahat pernah mempertanyakan dana Rp. 35 juta per tahun bagi tiap sanggar oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas ini tidak dapat menjawab sanggar mana yang akan diberikan dana itu. Sementara di Depok sendiri, ada beberapa sanggar. Pertanyaan tersebut tak terjawab hingga saat ini.

Sekarang, yang dipertaruhkan Sahat untuk perempuan ialah bagaimana peningkatan insentif bagi kader PKK dan Posyandu di Depok. Dalam kenyataannya, insentif bagi kader PKK sebesar Rp. 25 ribu per bulan, dibayarkan setahun sekali. Ternyata peruntukannya bukan kader, melainkan operasional Posyandu. Ini yang sedang ia perjuangkan dan semoga disahkan tahun 2017.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap pendapatan, Sahat melakukan audit dan melaporkan kekayaannya secara berkala. Termasuk kegiatan yang ia lakukan yang bertajuk "Kemajuan Perempuan adalah Kemajuan Peradaban Bangsa" waktu lalu turut ia laporkan pula. Meskipun kegiatan ini menggunakan uang pribadi, namun ia tetap membuat laporan uang masuk-keluar serta dikirim ke pengurus PDIP tingkat kecamatan. Selain mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, ia ingin menunjukkan pentingnya 'bayar harga' (berkorban).

Mendengarkan, itulah yang Sahat nikmati dalam jabatannya sebagai anggota dewan saat ini. Baginya, mendengarkan bukanlah persoalan mudah, ia pun masih belajar. Dari mendengarkan, ia bisa mengetahui mana yang sok tahu, berpura-pura, sekadar mencari muka, dan orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Meskipun dengan mendengarkan, kerap ia sedih ataupun marah. Sedih dan marah yang hanya menjadi konsumsi pribadi.

Sebagai pemimpin, ia memiliki tim kerja. Kepada timnya, ia lebih memilih mengambil waktu dan berjarak, ketika marah. Barulah ketika marah mereda, ia akan sampaikan. Meskipun lebih sering Sahat memberikan semangat dan apresiasi kepada tim kerjanya.

“Wah, keren banget nih. Kalau gak ada elo, gak jalan nih!” pujian disampaikan kepada timnya. Ia tidak menerapkan hierarki ‘pimpinan-bawahan’. Ia menerapkan relasi kerja yang egaliter. “Siapa juga gue jadi pimpinan mereka?” ujarnya tertawa.

Dari sekian kerja-kerja yang dilakukan Sahat, dengan rendah hati ia menuturkan bahwa yang dilakukannya selama ini masih kurang, khususnya memenuhi kebutuhan perempuan. Kinerjanya belum menjawab kebutuhan masyarakat apalagi kaum perempuan. Sebab pekerjaannya masih dalam tahap awal, baru berjalan 1,5 tahun. Saat ini, ia tertarik dengan program pengembangan ekonomi, baik perempuan maupun lelaki.

Ia tergabung di Koperasi Perempuan Tanah Baru sebagai anggota. Dari sini ia belajar mengenai koperasi dan pengembangan ekonomi perempuan, untuk selanjutnya dipraktekkan di kota Depok. Anggota partai dan anggota PKK menjadi kelompok belajar bersama.

Ia berharap PKK di kota Depok bisa menjadi lebih maju dengan program-program yang juga merangkul para perempuan lintas agama. Ia berharap ekonomi bukan lagi sekadar uang dan konsumsi.

Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, Sahat memacu dirinya untuk terus belajar. Ia berkomitmen pada dirinya sendiri untuk membaca minimal sejam setiap hari. Ia mengikuti kursus-kursus, seperti Bahasa Inggris. Ia menonton film yang meningkatkan wawasan dan keterampilannya berbahasa Inggris. Ia mengaku, kemampuan bahasa Inggrisnya buruk, karena itulah ia perlu keras belajar.

Sahat tentu tidak sepi dari kritikan. Ia sering menerima kritik dari rekan anggota partai ataupun masyarakat, namun meresponnya dengan sederhana, yaitu memberikan senyum dan ucapkan terima kasih, seraya bertekad memperbaiki diri.

Tanggapan Terhadap Kepemimpinan Sahat Farida Berlian

Windra, Ketua Ranting PDIP, Beji, Depok, mengenal Sahat sekitar 5 tahun. Menurut Windra, Sahat adalah sosok yang peduli, kooperatif, mau turun ke bawah, dan aktif. “Nggak sekadar kata-kata, tapi tindakan. Nggak hanya omongan, tapi benar-benar dibutuhkan warga, mau membantu dan menindaklanjutinya,” jelas Windra.

Menurut Windra, Sahat bekerja untuk partai dan untuk warga masyarakat. Ia memperjuangkan dan merealisasikan BPJS untuk teman-teman yang belum mempunyai BPJS. Ketika Windra atau temannya yang lain melaporkan adanya warga yang sakit, ataupun warga yang mengalami tindak kekerasan, maka Sahat langsung menindaklanjutinya.

Terhadap kekerasan yang menimpa anak-anak, ia sangat peduli. Ia mengajak warga agar tidak takut melaporkannya. Sahat menindaklanjutinya, bahkan terlibat dalam menjembatannya ke LBH. Dia sosok anggota dewan yang selalu menggunakan momen reses sebagai kesempatan untuk dekat dengan warganya. Perempuan selalu menjadi targetnya.

Menurut Windra, ia pernah menemani Sahat melakukan

reses ke Kelurahan Tanah Baru. Di sana, Sahat mendekati ibu-ibu dan mendengar aspirasi mereka. Mereka didorong untuk percaya diri dan tidak takut untuk menyampaikan keluhan.





VI. SUSIANA S

(anggota DPRD Kota Bengkulu Tengah, Bengkulu)

Biografi singkat

Susiana S. lahir di Kembang Seri, Bengkulu, 29 April 1973. Ia menyelesaikan sarjana hukumnya di Universitas Bengkulu, tahun 1998. Saat ini, ia menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu Tengah, periode 2014-2019, dari Partai Hanura.

Sejak kecil, Susiana mengaku senang berteman dan bersosialisasi. Ia suka tampil di publik untuk menyanyi ataupun menjadi pembawa acara. Ia tidak bisa diam, selalu terlibat dalam kepanitiaan acara adat di tempat tinggalnya. Ia aktif di pramuka sejak duduk di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Kegiatan pramuka yang ia ikuti berperan besar dalam mengasah mentalnya menjadi pribadi yang pantang menyerah. Selain pramuka, ia aktif di Karang Taruna. Organisasi kepemudaan ini ia ikuti hingga memasuki dunia kampus. Di kampus, ia ikut dalam organisasi pecinta alam.

Tahun 1993, ketika Susiana menikah, ia aktif di organisasi Bayangkari. Organisasi ini digelutinya selama 17 tahun, hingga 2010. Sempat vakum beberapa waktu, ia kembali berorganisasi di Gerakan Organisasi Wanita tahun 2014 hingga kini, dan menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia (tahun 2010-sekarang). Di KPI, ia menjabat sebagai Sekretaris Cabang, sejak 2011-2014. Beberapa organisasi yang ia geluti sebelum menjadi anggota dewan, misalnya GOW dan KPI, serta berkiprah dalam isu-isu perempuan.

Pengalaman berpolitik

Keterlibatan Susiana dalam partai sebetulnya masih baru, yaitu tahun 2013, setahun sebelum pencalonannya. “Seandainya

bisa maju secara perorangan, maka saya akan maju”, ujanya berseloroh. Ia yakin mendapat dukungan dari masyarakat akar rumput. Keaktifannya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan membuatnya dikenal luas di masyarakat. Itu telah berlangsung lama dan alamiah.

Susiana tidak mendaftarkan diri ke partai politik. Justru beberapa partai politik “meminang” dirinya. Menurutnya, itu terjadi karena selain untuk memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif, perempuan yang terjun dalam bidang politik di Bengkulu Tengah pun, belum terlalu banyak. Dari beberapa partai yang meminangnya, ia menjatuhkan pilihannya ke Partai Hanura. Masuk partai tersebut tahun 2013, dengan menjadi anggota terlebih dulu. Kemudian, ia ditarik menjadi PAC se-kecamatan Talang Empat, hingga sekarang. Meskipun ia baru di organisasi kepartaian, namun tak menghalangi langkahnya untuk belajar. Ia mengikuti setiap kegiatan partainya dan berusaha belajar dari kegiatan itu. Masuk ke partai itu, menurutnya, tak ada pungutan uang. Untuk membesarkan partai, memang dibutuhkan dana. Misalnya membentuk ranting, mengumpulkan massa, dan lainnya. Dana pribadi yang ia keluarkan lebih banyak untuk berkampanye, dan tidak ada kewajiban memberikan uang ke partainya.

Dalam hal kebijakan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, Partai Hanura telah menerapkannya, sehingga tidak ada diskriminasi gender. Menurutnya, Partai Hanura memberikan ruang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk maju menjadi anggota dewan. Yang diperlukan kini ialah semangat perempuan untuk melibatkan diri dalam politik.

Untuk menjadi pemimpin, Susiana mendapat dukungan dari partainya. Awal pencalonannya, ia mendapat bimbingan teknis dari Partai Hanura. Kemudian ketika berkampanye, partainya juga mendukung penyediaan alat-alat kampanye, seperti bendera, walaupun jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, ia menambah jumlah alat kampanye. Apalagi saat pencalonannya, ia masih

menjabat di PAC dan membesarkan ranting-ranting. Ia memegang tugas di dua ranting yang terdiri atas 33 desa. Jumlah kader di 33 desa tersebut cukup banyak, sehingga diperlukan alat kampanye yang banyak, selain yang disediakan oleh partainya.

Dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia di partai, menurut Susiana, Partai Hanura selalu melakukannya. Setiap enam bulan sekali ada lokakarya nasional yang diadakan di Jakarta. Selain pengembangan diri para kader partai, pertemuan itu juga untuk menguatkan pengetahuan kader mengenai aturan-aturan partai agar mereka tidak melenceng dari jalur-jalur kepartaian, ketentuan, dan aturan yang digariskan. Beberapa materi lokakarya tersebut pernah diterimanya, seperti membuat kebijakan, keterlibatan dalam masyarakat, meningkatkan suara partai, dan kepemimpinan. Apalagi setelah menjadi anggota dewan, maka dirinya telah menjadi 'milik' masyarakat. Selain di Jakarta, penguatan itu juga dilakukan di Bengkulu. Ia menambahkan bahwa persiapan Pilkada 2017 yang akan dilaksanakan nanti, perlu pembinaan bagi kader-kader tentang Pemilu. Selalu ada pembinaan rutin oleh Partai Hanura.

Menjadi anggota dewan di Bengkulu Tengah, menurut Susiana, memang sulit. Periode sebelumnya, hanya ada seorang perempuan anggota legislatif. Di tengah perjalanannya, menjadi dua anggota perempuan. Perempuan tersebut menggantikan anggota dewan yang terpilih menjadi bupati.

Tak pernah terpikir oleh Susiana untuk menjadi anggota dewan. Ia hanya aktif di organisasi dan ingin bermanfaat bagi organisasi yang ia geluti, berbaur dengan banyak orang, mengajak ibu-ibu bergabung dalam organisasi, dan menambah keterampilannya. Akhirnya, ketika dilamar oleh Partai Hanura, ia berpikir, "Mengapa saya tidak menjadi bagian dari anggota dewan untuk memperjuangkan hak warga? Menjadi perwakilan mereka?" Ia menambahkan, "Saya lihat di sini perempuan masih sedikit yang memberanikan diri bersama kaum bapak berada di kursi legislatif!" Setelah terpilih dan menjalani peran sebagai anggota

dewan, kian ia sadari bahwa dibutuhkan mental yang tangguh untuk itu. Pileg 2014 yang lalu, ia mewakili daerah pemilihan 1 Bengkulu Tengah yang terdiri atas Kecamatan Talang Empat. Ia berada di nomor urut 1, atas permintaannya sendiri.

Meskipun masyarakat mengenalnya, namun Susiana selalu turun ke masyarakat memperkenalkan dirinya. Ia masuk ke pengajian-pengajian dan menyelenggarakan temu warga masyarakat secara khusus. Kampanye dilakukan secara efektif sekitar setahun. Sebelum menjadi anggota dewan, ia menjadi Tenaga Kerja Sukarela di Dinas Sosial sebagai pekerja sosial. Meskipun tak digaji, ia mengaku senang melakukannya. Ia senang turun ke lapangan. Bersama TKS lainnya, ia berpikir bagaimana mengembangkan dan memajukan daerah melalui peningkatan keterampilan. Hal itu berperan menolong dirinya sendiri untuk mengenal wilayahnya.

Persaingan menjadi anggota dewan memang berat. Dari partainya untuk daerah pemilihan 1, ada 3 perempuan dan 3 laki-laki calon anggota legislatif. Belum lagi dengan partai lainnya. Susiana mengaku pernah tebersit rasa pesimis di dirinya, namun ia kembali membangun kekuatan dan berupaya optimis. Ia mendapat dukungan penuh dari keluarganya.

Di Bengkulu Tengah, berdasarkan pengalaman Susiana, partai politik tak terlalu menentukan dalam keterpilihan seseorang. Ia menjelaskan bahwa yang lebih berperan adalah 'ketokohan' orang. Peran orang selama ini di masyarakat lebih penting. Dalam pengalamannya ketika memenangkan Pileg 2014 yang lalu, soal perempuan sebagai pemimpin tidak mendapat tentangan dari keluarga maupun agama. Dalam kampanye, ia menjelaskan bahwa perempuan dapat menyalurkan aspirasinya.

Soal politik uang, Susiana tidak sepakat dengan hal itu, tetapi menyadari bahwa ada biaya politik untuk kampanye-kampanye. Total dana yang dikeluarkan pada Pileg 2014 lalu, menurutnya, tidak terlalu besar. Ia tidak menargetkan jumlah dana yang harus

dikeluarkan. Kuncinya adalah harus dekat dengan masyarakat. Sumber dana yang digunakannya ialah dana pribadi.

Praktik kepemimpinan di DPRD

Perempuan sebagai pemimpin berbeda dengan kepemimpinan lainnya, menurut Susiana. Perempuan pemimpin itu sangat unik. Ia berperan menetralkan keadaan. Perempuan pemimpin penting karena mereka yang mengerti kebutuhan dan aspirasi kaumnya dan anak-anak, yang kadang sulit dimengerti oleh laki-laki. Misalnya, ketika perempuan mendapatkan menstruasi, maka hari pertama ia perlu beristirahat. Laki-laki tentu tidak tahu hal ini.

Tantangan yang Susiana hadapi sebagai perempuan pemimpin ialah bagaimana menjalin kesehatan dengan sesama perempuan lain di dewan. Selain itu, rapat-rapat dewan sering dilaksanakan pada malam hari. Ini menjadi tantangan tersendiri baginya yang merupakan *single parents* agar tetap memperhatikan anaknya. Sejauh ini, ia dapat mengatur waktunya dengan baik. Masalah lainnya ialah menjangkau daerah-daerah yang sulit. Mobil biasa tidak dapat melaluinya, seperti daerah Margomulyo di perbatasan Seluma. Bila hujan, maka kondisi jalan akan rusak parah. Meskipun demikian, itu tak menghalangi niatnya 'blusukan' ke daerah tersebut.

Itu yang menyebabkan Susiana, meskipun tidak di Komisi III, berupaya mengusulkan pentingnya pembangunan jalan. Akses jalan akan berdampak terhadap masalah kesehatan. Ada perempuan yang melahirkan di jalan, akibat sulitnya perjalanan menuju rumah sakit. Ia memperjuangkan pentingnya akses jalan di Padang Bulak Tanjung, daerah yang berbatasan dengan Seluma. Jalan di Seluma sudah bagus. Karena jalan di Padang Bulak Tanjung rusak, maka untuk keluar kampung, masyarakat merasa kesulitan. Anak-anak yang akan sekolah, saat berangkat dari rumah, tidak memakai sepatu. Ketika telah melewati jembatan, anak-anak mencuci kaki di sungai, baru memakai sepatu sekolah.

Perbaikan jalan di Padang Bulak Tanjung diusulkan sejak 2014, namun tak disetujui. Susi dan rekan-rekannya melakukan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Perjuangannya mempertanyakan dana APBD untuk infrastruktur jalan di Padang Bulak Tanjung diliput oleh media massa. Tahun 2016, akhirnya dananya dianggarkan. “Jika tidak dikejar, bisa saja dananya tidak cair. Kalau sekadar ngobrol, belum tentu didengarkan. Sewaktu masuk di koran dan dibaca oleh kalangan eksekutif, anggaran untuk jalan pun direalisir,” ujar Susiana.

Hambatan lain yang Susiana hadapi ialah penolakan oleh fraksinya sendiri. Pernah terjadi fraksinya menolak Raperda Lansia (terjaminnya kesehatan lansia), tetapi sebagai ketua Komisi, ia memilih menyetujuinya. Meskipun Raperda ini ditunda sementara waktu, karena tak memperoleh persetujuan fraksi-fraksi lainnya (2 fraksi menyetujui Raperda Lansia), namun dirinya mempergunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Tak hanya pergulatan di internal dewan, tetapi orang juga memandang sebelah mata kiprah Susiana. Akan tetapi, ia bersikap sabar, tangguh, positif, dan menunjukkan kerjanya. “Ah, menghabiskan uang negara saja mereka itu,” demikian pandangan umum warga masyarakat. Di sini, ia menyadarkan masyarakat tentang perannya dalam membuat peraturan, penganggaran dan pengawasan.

Periode ini, Susiana bertugas di Komisi 1 (Pemerintahan, Hukum, Pendidikan dan Kesehatan). Ia sendiri yang minta ditempatkan di komisi ini, karena melihat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait isu perempuan dan anak. Di samping itu, ia bertugas di Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Anggaran (Banggar).

Dari empat perempuan yang ada di dewan, hanya ia yang di komisi, badan legislasi sekaligus anggaran. Ia senang karena dapat berkiprah optimal. Di Baleg, ia memperjuangkan Perda agar

lolos dan diterima rekan-rekannya dan disetujui oleh tiap fraksi. Kemudian di Banggar, ia memperjuangkan anggaran yang tepat untuk rakyat.

Selama menjadi anggota dewan, dua setengah tahun pertama Susiana berencana ada di Komisi Pemerintahan, Hukum, pendidikan dan Kesehatan. Kemudian dua setengah tahun terakhir, ia ada di Komisi III (infrastruktur). Ia melihat bahwa perbaikan infrastruktur jalan perlu segera dilakukan. Ia menyadari bahwa sebagai anggota dewan, ia merasakan beban moral tersendiri untuk menyelesaikan masalah masyarakat.

Pintu rumahnya senantiasa terbuka bagi warga masyarakat. Selalu ada warga masyarakat yang datang ke rumahnya menyampaikan bermacam hal, seperti soal di-PHK dari perusahaan, biaya rumah sakit, hingga Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Bahkan ada warga yang menemuinya menanyakan cara bertemu Camat, karena mereka takut bertemu Camat. Ia menjelaskan, bahwa mau tidak mau, perlu siap dengan segala konsekuensinya sebagai anggota dewan.

Meskipun terbilang baru sebagai anggota dewan, namun Susiana tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, ia menorehkan capaian-capaian yang berarti. Salah satunya penganggaran honor guru PAUD.

Honor guru PAUD tahun 2015 di Bengkulu Tengah tidak dianggarkan, karena dialihkan untuk kebutuhan operasional PAUD. Ia berjuang meminta anggota dewan lainnya agar honor guru PAUD disediakan. Akhirnya, saat terjadi perubahan anggaran, maka honor guru PAUD dianggarkan. Di samping itu, ia mendorong diselesaikan dan disahkannya Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak. Tahun 2014, waktu ia belum menjadi anggota dewan (dilantik 9 September 2014), Raperda itu pernah diajukan, namun ditunda hingga Raperda diusulkan kembali pada 2015, saat dirinya menjadi anggota dewan.

Tujuan Susiana masuk di Baleg agar Perda tersebut disahkan. Akhirnya, Raperda itu masuk di Prolegda, meskipun menghadapi tantangan-tantangan. Salah satu alasannya, bahwa Perda ini tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah. Ia terus berjuang memberi pengertian tentang pentingnya Perda itu apalagi dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah Bengkulu Tengah.

Menurutnya, meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun dibuktikan dengan data yang mereka tanyakan ke Polsek. Topografi Bengkulu Tengah yang banyak perkebunan, di mana warganya tinggal di pondok-pondok tanpa kamar, merupakan keadaan yang rawan kekerasan seksual. Sebelum Perda ini disahkan, banyak kasus pernikahan anak.

Beberapa bulan sebelumnya, kejadian menimpa anak yang masih SD, berusia 13 tahun. Susiana bersama Badan Pemberdayaan Perempuan, Camat, dan Kepala Desa menyelesaikan kasus ini. Kasus yang menimpa anak ini terjadi bukan karena keinginan anak tersebut. Mereka “menceraikan” anak itu dari suaminya, dan sekarang si anak kembali bersekolah.

Untuk memperjuangkan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penghapusan Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Susiana mengalami penolakan dari fraksi-fraksi. Ada yang menganggap bahwa Perda ini tidak penting, karena tidak menghasilkan PAD dan ketakutan mereka akan kaitannya dengan soal poligami. Dalam memperjuangkan Perda ini, menurutnya, apabila tidak melobi fraksi-fraksi lainnya, maka hanya 3 dari 7 fraksi yang mendukung Perda ini. Bahkan, satu fraksi sulit memberikan dukungannya. Susiana menemui fraksi satu per satu memberikan pengertian pentingnya Perda ini.

Ia melakukan lobi-lobi personal untuk mendapatkan dukungan, bahkan menghubungi istri-istri anggota dewan melalui telepon atau BBM agar mempengaruhi suami mereka, sehingga mendukung terbitnya Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penghapusan

Kekerasan pada Perempuan dan Anak.

Dalam fungsinya di Banggar, Susiana biasa langsung mengecek anggaran yang berhubungan dengan perempuan, pendidikan, dan PAUD. Ia memastikan kalau sudah ada anggaran, maka melihat prospek apakah betul berjalan sesuai dengan anggaran. Jika tidak ada, ia akan memperjuangkan anggaran tersebut. Ia berusaha agar anggaran-anggaran yang ada berpihak kepada perempuan. Hasil kerja ataupun capaiannya belum ia komunikasikan ke masyarakat atau publik. Ia tidak mempergunakan media sosial dalam mengomunikasikan itu. Ia menjelaskan, meskipun secara pribadi terus berjuang, namun keberhasilannya tak lepas dari dukungan anggota dewan lainnya atau kerja sama dengan fraksi lainnya.

Walapun telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam kepemimpinannya yang masih singkat, namun Susiana tak sepi dari kritikan. Ia menerima kritikan dari masyarakat dan berupaya mengelolanya dengan baik. Hal itu tidak dimasukkan kedalam hati sampai berlarut-larut mempengaruhi kesehatan, tetapi berusaha memperbaiki dirinya. Di dalam politik, menurutnya, antara teori dan praktik di lapangan itu berbeda. Ia harus banyak belajar menambah wawasan, belajar dari senior-seniornya, termasuk terjun di masyarakat. Inilah yang akan meningkatkan kapasitas kepemimpinannya.

Sebelum menjadi anggota dewan, Susiana telah melaporkan harta kekayaannya. Untuk audit keuangannya, belum ia lakukan. Meskipun demikian, ia menjelaskan dana-dana yang dimilikinya kepada masyarakat. Uang reses yang diperoleh dijelaskan kepada publik, secara rinci peruntukannya. Misalnya untuk temu warga, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Desa yang telah membantunya.

Tanggapan Terhadap Kepemimpinan Susiana S

Irna Riza Yuliasuty, Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Bengkulu, mengenal Susiana, sejak tahun 2012. Saat

Dalam APBN 2016, melalui anggaran pendidikan dan kebudayaan ia lokasikan honor guru PAUD, sekalipun tidak semua guru PAUD mendapatkannya. Dari lima guru per PAUD misalnya, hanya dua guru yang memperoleh honor tersebut. Dan yang tiga orang lagi, honorinya biasanya berasal dari APBD masing-masing provinsi. Tahun 2015, honor untuk guru PAUD tidak ianggarkan oleh Pemerintahan Bengkulu Tengah. Inilah yang Susiana dan rekan-rekannya perjuangkan di Banggar, sehingga pada perubahan anggaran tahun 2015 telah ianggarkan honor guru PAUD, termasuk tahun 2016 juga ianggarkan kembali.

Susiana berargumen di hadapan rekan-rekannya, “Coba bapak-bapak pikir. Dari honor yang hanya Rp. 200 ribu atau Rp. 250 ribu setiap bulan, apabila dibandingkan dengan pengeluaran bapak-bapak setiap harinya untuk bensin dan makanan, memang jumlahnya tidak seberapa. Tetapi honor itu sangat besar bagi guru PAUD yang dedikasinya sangat besar. Berhadapan dengan anak-anak kecil, mengajar mereka, tak jarang harus membersihkan anak-anak setelah buang air besar. Jadi, di mana nurani bapak-bapak seandainya honor guru PAUD tidak ianggarkan?”

Dalam pertimbangan tersebut, Susiana dan rekan-rekannya memanggil Dinas untuk dengar-pendapat agar mereka mau menganggarkan honor guru PAUD. Proses ini memakan waktu sembilan bulan. Inilah inisiatif pribadi Susiana. Namun dengan

rendah hati ia mengakui, bahwa perjuangannya itu dilakukan bersama rekan-rekannya yang lain. Ia berpendapat, bahwa pembangunan fisik perlu diimbangi dengan pembangunan manusia, sehingga perlu menganggarkan honor guru PAUD.

itu, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) hendak membuat cabang di Bengkulu Tengah, dan seseorang mengusulkan kepada Irna agar mengajak Susiana menjadi pengurus, karena dinilai cukup potensial. Akhirnya, melalui perundingan di forum, Susiana terpilih sebagai Sekretaris Pertama KPI Cabang Bengkulu Tengah.

“Saya melihatnya sebagai orang yang mau belajar. Potensinya juga bagus. Dia bisa memimpin kelompok perempuan di balai perempuan di desa-desa di Bengkulu Tengah,” demikian pendapat Irna. Meskipun akhirnya Susi memutuskan menjadi calon anggota legislatif dan berhenti dari kepengurusan KPI (persyaratan pengurus KPI adalah tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu), namun ia tetap mendukung dan berkontribusi kepada KPI.

“Dalam mengambil keputusan, ia banyak mendengar pendapat dari organisasi perempuan untuk memperkuat argumen-argumennya,” ujar Irna menguatkan sikap positif Susi yang selalu mau belajar.

“Saya senang atas keterlibatannya dalam mengawal Perda Perlindungan Anak, tentang lansia, dan difabel juga. Ini banyak dipengaruhi oleh keterlibatan Susi sebelumnya di Koalisi Perempuan Indonesia,” jelas Irna dengan rasa senang melihat adanya wakil rakyat yang turut memperhatikan dan mendukung perjuangan kelompok masyarakat.

“Kami melihat, kehadiran Susi di kursi wakil rakyat bukan semata-mata karena ingin kekuasaan. Tetapi ia punya visi dan misi di situ,” ungkap Irna menambahkan. Irna menjelaskan ia belum bisa melakukan penilaian yang utuh karena kepemimpinan Susi masih setahun lebih. Namun setidaknya, Susi telah membuktikannya melalui beberapa upaya perjuangan, termasuk berkoordinasi dengan KPI untuk isu-isu perlindungan anak.





VII. NINING S. SARANANI

(anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara)

“Zaman sekarang barangkali mungkin kebanyakan pakai uang, tapi kalau saya pikir uang juga bukan segalanya untuk mencapai tujuan itu. Karena buktinya saya juga tidak banyak-banyak pakai uang. Makanya, saya bilang sama mereka setelah pemilihan kemarin, ke depannya ketika memilih kepala daerah uang tidak segalanya, tapi kebaikan segalanya. Kebaikan adalah yang utama!”

Biografi Singkat

Nining S. Sarani lahir di Kendari, 15 Juli 1965. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Haluleo. Sekarang, ia menjadi anggota DPRD Kota Kendari periode 2014-2019 dari Partai Gerindra.

Sebelum menjadi anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Nining berwirausaha dengan membuka salon di rumahnya. Salon yang ia rintis sejak tahun 90-an tersebut diberi nama “Salon Nining”. Salon Nining terletak di Jl. Mayjen S. Parman No. 92, Kemaraya, Kendari. Salon tersebut melayani jasa potong rambut, *make up*, sanggul dan pasang jilbab, *rebonding*, *smoothing*, serta merias pengantin. Selain melayani pelanggan di salonnya, Nining kerap menerima order merias untuk pesta atau pentas seni budaya masyarakat. Pekerjaan itu membuatnya banyak mendapat kenalan.

Seiring berjalannya waktu, Salon Nining dikenal luas di masyarakat. Begitu pun dengan pemiliknya. Usahanya maju dan berkembang. Ia melebarkan sayap usahanya dengan membuka agen perjalanan (*travel agent*), lembaga pelatihan kerja (LPK), dan rumah makan. Ia selalu mencantumkan nama Nining di tiap unit usahanya.

Ada alasan tersendiri mengapa Nining selalu menamai usahanya dengan namanya sendiri. Salah satunya keinginan kuat mengangkat namanya terlebih dulu sebelum berbuat yang lebih besar, sehingga namanya menjadi merek dagang (*brand*) agar mudah dikenal dan diingat masyarakat Kendari.

“Memang saya sebelum berbuat itu sudah ada di pikiran bahwa saya akan membuat sesuatu untuk mengangkat nama saya dulu. Sebelum saya buat apa-apa, nama saya dulu saya harus angkat. Karena kalau nama saya sudah ada, enak tidak enaknya pasti akan enak karena saya sudah punya *brand*. Itu dulu yang saya buat,” ujarnya.

Sembari menjalankan usahanya, Nining aktif di berbagai organisasi yang ada di Kendari dan menempati posisi ketua atau wakil ketua. Organisasi yang pertama kali diikuti misalnya Tiara Kusuma (organisasi Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia). Di Tiara Kusuma, ia menjabat Ketua sejak 1997 hingga sekarang. Anggota organisasi tersebut mencapai 200 salon yang ada di Kota Kendari.

Di samping itu, Nining juga menjabat Wakil Ketua di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) kota Kendari, yang terdiri atas pengusaha dari berbagai profesi. Ia terlibat di Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) sebagai Wakil Ketua, organisasi perancang busana (KARTINI), serta asesor untuk menilai salon-salon kecantikan di seluruh Indonesia.

Nining kerap mengikuti berbagai acara keagamaan yang diselenggarakan di kelurahannya, seperti acara khatam Al-Qur'an. Sejak awal, ia memiliki keinginan membantu sesama, terutama perempuan. Melalui lembaga pendidikan non-formal untuk kecantikan yang dimilikinya, ia memberikan pelatihan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga dan yang tidak memiliki penghasilan ia latih agar mandiri.

“Saya harapkan mereka bisa mandiri, jangan kerja ke orang. Harus mandiri! Paling tidak kalau mereka mau kerja, ya kerja sama saya, tapi habis itu mereka harus mandiri. Itu harapan saya, supaya nanti mereka bisa pekerjakan orang lagi,” ujar Nining. Aktif di organisasi adalah cara yang digunakan untuk menyalurkan tenaga kerja. Mengetahui teman-teman di organisasinya tengah membutuhkan karyawan yang terampil, maka digunakan kesempatan tersebut untuk menempatkan ibu-ibu yang sudah dilatihnya.

Pengalaman Berpolitik

Karena keaktifan Nining di berbagai organisasi, membuat namanya dikenal luas, maka lamaran dari partai politik pun datang. Pada 2004, ia dilamar Partai Amanat Nasional. Mulanya ia tidak mau karena belum memahami apa itu politik. Dan setelah diajari pun, ia masih belum mengerti hal itu. Walaupun pemula, namun karena telah memiliki nama, maka ia memperoleh suara yang banyak. Hanya saja, ia berada di urutan keempat, sehingga tidak terpilih sebagai anggota dewan, waktu itu.

Pemilu legislatif 2009-2014, Nining kembali dilamar oleh partai politik. Kali ini lamaran datang dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK). Pada pencalonan yang kedua kali ini, ia masih belum percaya diri dan niat untuk maju, belum tahu nantinya akan berbuat apa, dan takut di-'dzolimi' laki-laki. Tanpa ia ketahui, tiba-tiba namanya ada di KPU. Ia menjalani hal itu, berbekal pengalaman sebelumnya, menyusun strategi untuk meraih dukungan. Oleh karena partainya sedikit pendukungnya di Kendari, dan tidak ada perhitungan yang matang, maka ia kembali gagal.

Pemilu legislatif 2014 yang lalu, Nining dilamar oleh Partai Gerindra. Kali ini, ia telah memiliki niat, keyakinan, dan mengetahui apa yang akan dilakukannya bila terpilih nantinya. Ia merasa telah berpengalaman, dan pemikirannya telah matang, sehingga cukup siap menjadi wakil rakyat, dengan partai pendukungnya yang bagus. Sembari aktif berorganisasi, ia menyusun strategi. Masa kampanye, walaupun sudah dikenal masyarakat luas, namun setiap hari ia datang ke rumah-rumah di dua kecamatan di daerah pilihannya, yaitu Kecamatan Kendari dan Kendari Barat.

Nining mengemukakan, bahwa saat datang ke rumah-rumah warga, ia tidak memosisikan dirinya sebagai tamu. Ketika datang, ia berlaku seperti di rumahnya sendiri. Ia duduk lesehan, membuat minum sendiri, dan lainnya. Dan menurutnya, dengan cara itu orang akan lebih bangga dan bahagia ketika ia datang. Hal itu ia lakukan setiap hari, dari rumah ke rumah. Walaupun tidak semua

rumah ia datangi, karena telah disusun strategi dan membuat hitung-hitungan suara.

“Saya sudah pilih bahwa saya cuma mencari 1000 suara. Jadi, tidak mungkin 1000 rumah saya datangi. Paling hanya 200-300, karena satu rumah sudah berapa penghuninya? Itu yang saya jalani. Saya pikir, dua minggu cukup untuk jalan ke 200 rumah. Itu dari rumah satu ke rumah lainnya, dan balik lagi. Paginya saya datang, dari rumah ke rumah, berjalan kaki!” ungkapnya.

Nining memahami persoalan pokok yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya yaitu banyaknya pengangguran, sehingga waktu datang ke rumah-rumah sekaligus memberikan pelatihan-pelatihan seperti menjahit, memotong rambut, dan merias. Warga yang ia datangi merasa senang dan mereka memberikan dukungannya. Akhirnya, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Kendari, periode 2014-2019. Ia terpilih bersama 13 perempuan lainnya, dari total 35 anggota DPRD Kota Kendari. Dengan biayakampanye yang kecil dan tanpa tim sukses, ia terpilih menjadi anggota dewan.

“Zaman sekarang mungkin kebanyakan pakai uang, tapi kalau saya pikir, uang bukan segalanya untuk mencapai tujuan itu. Karena buktinya, saya tidak banyak-banyak pakai uang. Maka, saya bilang ke mereka setelah pemilihan kemarin, ke depannya saat memilih kepala daerah, uang bukan segalanya, namun kebaikan segalanya. Kebaikan adalah yang utama!”

Keterwakilan Perempuan Dan Tantangannya

Menurut Nining, butuh perjuangan yang tak mudah bagi kalangan perempuan terjun ke dunia politik. Dari pengalamannya terlibat di tiga partai politik, perempuan harus menyiapkan mental dan fisik mereka. Misalnya, untuk rapat-rapat di partai politik umumnya berlangsung hingga jam 2 dini hari. Dengan demikian, hal itu mempersulit mereka mau berpolitik, ditambah lagi ‘stigma’ yang membebani dari masyarakat dan keluarga, apabila perempuan pulang malam-malam atau dini hari.

Hambatan lain, menurutnya, keberanian perempuan aktif di organisasi-organisasi atau partai politik, masih kurang. Masih ada ketakutan dalam diri kalangan perempuan terhadap watak laki-laki yang terkenal keras dan dominan.

“Perempuan masih takut, karena laki-laki bersifat keras (semua yang menjadi anggota dewan), takut dizolimi, takut begini-begitu, sehingga kita harus kuat-kuat jantungnya,” jelas Nining mengenai rintangan perempuan di Kendari dalam berpolitik. Untungnya, Nining terbiasa kerja merias hingga pagi hari di tempat pesta, sehingga memudahkannya menghadiri rapat-rapat sampai larut malam atau dini hari. Pengalaman berorganisasi membuatnya tahan banting menghadapi laki-laki yang sifatnya keras.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kendari lebih dari 30 persen. Akan tetapi, laki-lakinya masih dominan karena jumlahnya lebih banyak. Sehingga menurut Nining, ia dan perempuan anggota legislatif lainnya harus kuat dan kompak. Karena jika sesama anggota legislatif perempuan tak satu suara, tentu sulit menyuarakan kepentingan perempuan kalangan bawah. Tak jarang, ia mendapat tentangan dari sesama anggota dewan ketika mengajukan usulannya, misalnya pelatihan menjahit dan penyediaan mesinnya untuk perempuan.

“Misalnya, di instansi ini mengadakan pelatihan menjahit, terus di instansi lain juga pelatihan menjahit. Saya bilang tidak usah semua menjahit. Satu diberi pelatihan menjahit, yang lain diberi alatnya. Apa gunanya pelatihan bila tidak punya mesin? Bagusnya, instansi yang satu memberi pelatihan, yang lain memberikan mesinnya, sehingga mereka bisa bekerja. Begitulah ketika kami membahas anggaran!” jelas Nining. Betapa alot pembahasan anggaran di DPRD.

Oleh karena itu, menghadapi tantangan dari dalam dan agar suaranya tetap didengarkan oleh anggota dewan lainnya, Nining membuat strategi tertentu.

“Saya memiliki strategi, yaitu ketika duduk di DPRD, saya

harus memiliki jabatan. Di DPRD, ketika hanya menjadi anggota biasa, kita diremehkan. Syukur, pertama kali duduk saya langsung menjadi Ketua Badan Kehormatan. Saya harus mempunyai posisi yang bagus. Sekarang saya menjadi Sekretaris Komisi II. Jadi, saya tidak mau menjadi anggota biasa, karena kalau anggota biasa, kita diremehkan oleh laki-laki, bahwa kita tidak bisa berbuat!"

Di tingkat komunitas, menurut Nining, perempuan masih menghadapi tantangan ketika ingin menjadi pemimpin. Terutama saat ingin menjadi pemimpin daerah, seperti bupati atau gubernur. Ia menjelaskan, bahwa suku Tolaki yang ada di Kota Kendari juga memosisikan perempuan sebagai pihak yang harus menerima, sehingga susah menjadi pemimpin. Begitu pun dalam tafsir agama. Namun, saat ini kondisinya mulai bergeser, karena perempuan banyak yang menjadi anggota dewan sehingga cukup dipercaya menduduki posisi yang penting.

Praktik Kepemimpinan Di DPRD

Di Kota Kendari terdapat pasar tradisional yang besar, namanya Pasar Sentral Kota Kendari. Pada 2011, terjadi kebakaran di pasar tersebut dan membuat para pedagang kehilangan mata pencahariannya. Kemudian, pasar dibangun kembali oleh pemerintahan kota dengan gaya bangunan yang moderen dan bertingkat.

Para pedagang terdahulu yang sebagian besar perempuan ditempatkan di lantai dua. Akan tetapi, mereka memprotes ingin diturunkan dari lantai dua dan berdagang di lantai bawah, di luar gedung. Mereka ingin dipindahkan kembali, karena telah jatuh korban meninggal dunia akibat kelelahan naik-turun gedung dengan beban yang dipikulnya. Korban tersebut sebagian besar pedagang perempuan. Selain itu, juga sepi pembeli, karena malas naik-turun tangga ke lantai dua membawa barang belanjaan mereka.

Nining melakukan sidak ke pasar, meninjau lokasi, melakukan observasi dan berdialog dengan 2-3 pedagang perempuan

menanyakan kebutuhan mereka. Saat itu, ia melihat jika ibu-ibu pedagang dipindahkan ke bawah, kemungkinan besar mereka akan berdagang di tanah, karena tidak mempunyai lapak-lapak. Sehingga saat musim hujan, dagangan mereka akan basah dan keadaannya menjadi tidak rapih.

Setelah melihat sendiri kondisi dan situasinya, Nining memperjuangkan agar para pedagang menempati lokasi di bawah dan anggaran pembuatan lapak-lapak. Awalnya, pemerintahan kota menolak karena telah mengeluarkan anggaran yang besar membangun gedung pasar. Para pedagang harusnya menempati bangunan tersebut, namun Nining bersikeras. Akhirnya berkat kegigihannya, para pedagang perempuan kembali dipindahkan dan pengadaan 200 lapak besi disetujui oleh DPRD.

Sekarang bangunan pasar di lantai dua kosong, karena semua pedagang pindah ke bawah. Ibu-ibu pedagang merasa aman ketika musim hujan sebab memiliki lapak yang kokoh dan tinggi. Kondisi pasar relatif aman bagi para pedagang untuk meninggalkan dagangannya, saat pulang ke rumah.

Program untuk Perempuan

Selain Pasar Sentral kota Kendari, tak jauh dari rumah Nining terdapat pasar tradisional. Aktifitas di pasar ini sangat ramai pagi hari dan selesai pukul 11-an siang. Para pedagang di pasar ini sebagian besar perempuan paruh baya. Pasar ini ada sejak dahulu dan dilestarikan keberadaannya, meskipun jumlah pedagangnya telah menyusut.

Nining kerap berbelanja di pasar tersebut. Ia senang berbincang-bincang dengan nenek-nenek pedagang dan mendengarkan keluh kesah mereka. Dari mereka, Nining mengetahui permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi. Sebagai orang yang berada di posisi pengambil keputusan, ia berinisiatif mengatasi masalah yang muncul dari pengaduan masyarakat, misalnya bedah rumah, tanggul, dan sumur bor.

“Ketika saya turun, saya bilang ke mereka kalau ada rumah yang mau longsor, lapor ke saya. Beritahu RT dan RW berapa, kelurahan mana, nanti saya programkan. Jadi, alhamdulillah sekarang telah terlaksana bedah rumah dan akan ada lagi. Hal itu saya programkan,” ujar Nining.

Nining memanfaatkan waktu reses untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang ia cari ketika reses yaitu perempuan-perempuan yang potensial dan memiliki kemauan melakukan kegiatan, dan kemudian dididik agar mandiri. Setelah itu, ia membuat program untuk perempuan dan diajukan agar direalisasikan.

“Itu terutama untuk pelatihan. Pelatihan saya dahulukan karena menyangkut keterampilan. Kalau diberi uang, nanti dibelikan kursi baru atau selimut di rumahnya. Yang seperti itu, jelas tidak tertib dan efektif.”

Alasan Nining mengutamakan peningkatan penghasilan bagi perempuan karena banyak perempuan yang susah hidupnya. Menurutnya, walaupun perempuan memiliki suami yang bekerja, namun kondisi perempuan masih miskin.

“Jadi saya pikir perempuan-perempuan harus bekerja dan terampil. Nah, itu yang ada dipikiran saya. Kenapa program harus untuk perempuan, karena perempuan harus lebih maju. Karena laki-laki tidak mau tahu, misalnya gajinya Rp. 2 juta, ia ambil Rp. 500 ribu lalu diberi ke istrinya Rp. 1,5 juta. Perempuan mesti kelola uang itu untuk 30 hari. Suami mereka tidak mau tahu anaknya harus sekolah, minum susu, makan, dan jajan. Suami tidak tahu itu. Perempuan menjadi lebih parah daripada laki-laki. Jadi, perempuan suka diremehkan, maka saya mendorong mereka supaya terampil. Maka saya suka bilang ke perempuan-perempuan jika kita terampil, kalau kita punya pekerjaan, maka laki-laki biar kita maki-maki pun, ia tetap mau sama kita,” ungkap Nining mengemukakan mengapa prioritas programnya untuk kalangan perempuan.

Nining kerap membantu warga yang ingin mengurus BPJS

atau terkait dengan pendidikan. Biasanya, ia akan membantu mengarahkan bagaimana mengurus BPJS dan harus ke mana. Ia sering memberikan surat pengantar bagi ibu-ibu supaya dapat menyekolahkan anak mereka di sekolah yang dituju. Biasanya banyak yang tidak mampu menyekolahkan anak mereka, karena biaya.

Sebagai perempuan pemimpin, Nining tidak berhenti belajar. Ia meminta masukan dari organisasi perempuan yang ada di Kendari, seperti Koalisi Perempuan Indonesia cabang Sulawesi Tenggara. Ia memperoleh informasi terkait kondisi perempuan terkini di wilayahnya, terutama yang miskin dan tak berpenghasilan. Masukan masyarakat ia akomodir, kemudian disusun program-programnya.

Figur Yang Tidak Berubah

Walaupun menjadi anggota DPRD, Nining menyatakan bahwa kehidupannya masih sama seperti dulu, bahkan hingga kini ia senang mengajar dan melatih orang lain. Perilakunya tak ada yang beda, penampilan, maupun gaya hidup setelah menjadi wakil rakyat. Ia masih senang berbelanja di pasar tradisional, membeli sayur atau buah, dan mendengarkan keluh kesah warga.

“Ya, sebenarnya sama sebelum saya menjadi anggota DPRD. Karena pada dasarnya saya suka mengajar dan melatih, maka tetap melatih sampai sekarang. Agar masyarakat bisa mandiri, bisa bekerja dan menghasilkan uang, itu saja yang saya pikirkan. Kalau mendapatkan program jadi lebih cepat, karena saya duduk di dalamnya (menjadi anggota dewan). Itu saja bedanya!”

Dalam urusan bisnis, Nining sudah membatasinya. Saat ini, bisnisnya adalah nomor dua. Karena dengan posisinya sebagai Sekretaris Komisi II, secara otomatis makin banyak kesibukannya. Ia memprioritaskan tugasnya sebagai anggota dewan. Baginya, perempuan pemimpin sangat dibutuhkan saat ini. Yang ia lihat selama ini, perempuan pemimpin itu tegas, santun, dan susah korupsi, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki mudah berbelok

dari apa yang iamanatkan rakyat, ketika memiliki kedudukan. Perempuan ketika sudah terpilih biasanya akan mementingkan kebutuhan sesama perempuan.

Penolakan Terhadap Perda Etika Berbusana

Tahun 2014 yang lalu, DPRD Kota Kendari mengesahkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana. Peraturan ini memunculkan penolakan dari berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Tenggara, seperti Aliansi Perempuan Sultra (Alpen) dan KPI Sultra.

Nining juga menolak dan menentang Perda tersebut. Menurutnya, peraturan itu diusulkan oleh anggota dewan periode sebelumnya, tetapi disahkan pada periode sekarang. Ia tidak masuk di Badan Legislasi saat itu. Suara perempuan tidak kompak menolak perda itu, sehingga harus melakukan lobi-lobi dengan anggota legislatif lainnya.

“Saya tidak setuju. Jadi, saya katakan kepada perempuan anggota dewan yang lain, semua yang ada, agar tidak usah memberi suara setuju. Kenapa kita harus setuju? Ibu-ibu anggota dewan yang lama tidak mengerti bahwa ketika disahkan apa dampak yang bakal terjadi? Mereka tahunya jangan pakai yang mini-mini, tapi tidak tahu dampaknya. Bagaimana kalau mereka ditangkap? Bagaimana dalihnya di polisi?”

Saat itu, terjadi pro dan kontra mengenai Perda itu, bahkan Nining sempat disudutkan karena ketidak-setujuannya. Mereka menganggap, karena latar belakang pekerjaannya yang usaha salon, maka senang memakai baju yang mini. Namun ia bersikukuh dan menjelaskan bagaimana Perda itu akan berdampak terhadap perempuan di kalangan bawah. Karena cara berpikir menyalahkan perempuan, ketika terjadi perkosaan, akan tetap berkembang. Oleh karena itu, pengesahan Perda dilakukan dengan *voting*. Mayoritas anggota dewan menyetujuinya dan Perda pun disahkan. Sampai kini, keberadaan Perda tersebut tidak jelas.



Salon Nining. Usaha ini didirikan Nining S. Saranani sejak tahun 90-an dan membuatnya dikenal luas di Kendari.



Berbincang-bincang dengan para perempuan pedagang di Pasar Sentral Kota Kendari, penerima manfaat program yang ia realisasikan



Ibu-ibu pedagang di pasar Sentral Kota Kendari kini tidak lagi berjualan di tanah dan becek saat hujan. Perbaikan lapak ini salah satu program yang diperjuangkan dan direalisasikan oleh Nining S. Saranani



Nining Saranani tengah belanja buah di pasar tradisional. Sampai sekarang, ia masih senang berbelanja di pasar dan berbaur dengan masyarakat biasa



Pasar Tradisional di Kelurahan Kemaraya, tepat berada di belakang rumah Nining S. Saranani. Sampai saat ini, keberadaan pasar tradisional tersebut tetap dipertahankan dan dilestarikan, karena semua pedagang di pasar ini adalah perempuan.

VIII. BADINGAH

(Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta)

"Saya sebagai kepala daerah itu tidak hanya kerja sendiri, tetapi dibantu oleh teman-teman SKPD. Selanjutnya dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, SKPD selalu saya dorong untuk responsif gender."

Biografi singkat

Badingah lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, 17 September 1949. Ia memperoleh gelar sarjana sosial dari STISIPOL Kartika Bangsa, Yogyakarta, pada 2003. Motto hidupnya: "Hidup adalah pengabdian dan bermanfaat untuk sesama."

Badingah saat ini menjabat sebagai Bupati Gunung Kidul periode 2015-2020. Pada 2010-2015, ia menjabat sebagai wakil bupati ketika Sumpeno Putro menjadi bupati. Namun Bupati Sumpeno Putro meninggal dunia pada November 2010, maka Badingah meneruskan pemerintahan sebagai bupati, dan resmi dilantik awal tahun 2011. Sebelumnya, masa bakti 2005-2010, Badingah juga menjabat sebagai wakil bupati mendampingi Bupati Suharto. Kini, ia menjadi pemimpin daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan wakilnya yang baru, yaitu Immawan Wahyudi.

Badingah berlatar belakang pengusaha atau pedagang. Sejak kecil, ia ikut orang tuanya berdagang dan menjaga toko. Ia sama sekali tidak memiliki bekal masuk ke dunia pemerintahan. Pun ia bukan orang birokrasi, namun karena pengalaman-pengalamannya berorganisasi membuatnya mudah beradaptasi dengan situasi yang baru.

Ia berorganisasi sejak belia. Ketika duduk di Sekolah Dasar, ia senang dan aktif mengajak teman-temannya berkumpul dan membuat kegiatan. Begitu pun saat di SMP dan SMA, ia terlibat

di banyak organisasi sekolah. Waktu di perguruan tinggi, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

Sampai kini, Badingah aktif di 29 organisasi masyarakat di Gunung Kidul. Karena latar belakangnya sebagai pedagang, sebagian besar dulu ia ditempatkan sebagai bendahara di organisasi-organisasi yang ia ikuti. Karena keaktifannya, ia pun ditunjuk sebagai wakil ketua bahkan menjabat sebagai ketua, di beberapa organisasi tersebut.

Di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Gunung Kidul, ia menjabat ketua hingga empat periode. Ia juga telah menjabat sebagai ketua selama empat periode di Gabungan Organisasi Wanita (GOW) seluruh Gunung Kidul, hingga kini. Ia juga pernah menjadi ketua di Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) cabang Gunung Kidul, Gunung Kidul *Cycling Club* (GeKa), dan ORARI. Saat suaminya menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Gunung Kidul, otomatis ia pun menjabat Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK), periode 1999-2004.

Ia pernah menjadi pengurus di Biro Pemberdayaan Wanita, Remaja, dan Keluarga, Majelis Ulama Indonesia (MUI), PD Aisiyah Gunung Kidul, Palang Merah Indonesia (PMI) Gunung Kidul, Persatuan Donor Darah Seluruh Indonesia cabang Gunung Kidul, Asosiasi Pengusaha Jasa Indonesia (APJI), Gabungan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (GPHRI), dan masih banyak organisasi yang ia ikuti hingga kini, yang terkait dengan kesehatan, olah raga, keagamaan, profesi, keterampilan, dan lainnya.

Menurutnya, melalui berbagai organisasi itulah, ia mulai memahami berbagai persoalan perempuan, terutama di kalangan bawah.

“Dan saya tidak mengira kalau saya masuk dalam satu organisasi yang sekian banyaknya di Kabupaten Gunung Kidul itu ternyata organisasi itu bisa kami gerakkan. Dari situlah ternyata saya juga menjadi lebih mengetahui permasalahan-permasalahan perempuan yang ada di bawah. Juga permasalahan masyarakat

yang ada di bawah itu sebetulnya apa? Kan sering kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial.”

Kabupaten Gunung Kidul Dulu dan Kini

Kondisi Gunung Kidul dulu dan sekarang sangat berbeda. Badingah mengemukakan bahwa saat ini kondisi Kabupaten Gunung Kidul cukup maju. Jauh berbeda dengan kondisi di tahun 80-an, saat itu Gunung Kidul dikenal sangat kering dan gersang, miskin, dan tertinggal. Bahkan di era 1960-1980, banyak kasus busung lapar terjadi di Gunung Kidul karena kebanyakan penduduk makan ‘gaplek’ sehingga banyak yang meninggal di jalan-jalan. Itu terjadi karena Gunung Kidul tidak menghasilkan pangan akibat kekurangan air.

“Jadi masyarakat banyak sekali yang kena busung lapar. Kalau saya pergi ke pasar, di muka toko saya menemui banyak orang meninggal. Sampai kadang-kadang saya tidak tahu kalau yang saya tendang itu orang yang sudah meninggal, karena saya kira tidur. Karena (waktu itu) masyarakat makannya cuma Gaber. Gaber itu gaplek yang sudah keluar bubuknya; lah itu dimakan.”

Badingah menjelaskan bagaimana kehidupan masa kecilnya kala itu. Ketika itu, ia masih duduk di Sekolah Dasar. Waktu itu sangat sulit memperoleh pangan, ditambah dengan habisnya tanaman-tanaman karena ditebangi oleh penduduk, sehingga menambah buruk keadaan tanah dan makin kering kerontang. Banyak penduduk, terutama perempuan, menjual peralatan rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apapun dijual sehingga kehidupan mereka sungguh memprihatinkan. Ia sendiri mengikuti ibunya berjualan di pasar. Banyak perempuan bekerja di pasar untuk mendapatkan makanan. Itulah tragedi yang luar biasa di Gunung Kidul yang ia alami sendiri.

Kini Gunung Kidul jauh lebih baik keadaannya. Dengan citra Gunung Kidul yang mulai dikenal sebagai tujuan wisata, membuat Badingah yakin bahwa keadaan penduduknya juga akan

berkembang. Ia menyatakan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-lakinya, terpaut sekitar 22 ribu orang. Dan ia menambahkan, masyarakat Gunung Kidul umumnya dan kalangan perempuan khususnya, masih memerlukan pendampingan, sehingga membuat kehidupan masyarakatnya lebih baik lagi (slogan dan semboyan Badingah: “Untuk Gunungkidul yang lebih maju tata, titi, tentrem”).

Awal Mula Terjun Ke Dunia Politik

Badingah menjelaskan bahwa awalnya ia tak berkeinginan sedikit pun mencalonkan diri menjadi wakil bupati pada Pilkada 2005 silam. Namun, tujuh calon bupati waktu itu menghubungi dan melamar Badingah agar mau menjadi wakil bupati. Ia menolak semua tawaran tersebut karena merasa tak memiliki kemampuan untuk itu.

“Karena saya merasa tidak mempunyai kemampuan. Karena kemampuan saya cuma pedagang. Saya kan cuma menjual barang apa yang bisa saya jual, bagaimana caranya saya bisa memberikan kontribusi kepada karyawan saya, kepada keluarga agar keluarga tetap bisa makan. Saya semula cuma seperti itu. Sama sekali saya tidak ada rencana,” ujarnya.

Tetapi, lima dari tujuh calon bupati terus menghubungi dan mengajaknya menjadi wakil mereka. Hampir setiap hari rumahnya didatangi calon-calon bupati tersebut, hingga ia mulai mempertimbangkannya. Dalam pertimbangannya, ia merasa sebetulnya sedikit banyak tahu dan memahami persoalan perempuan di tingkat bawah, misalnya masalah pendidikan, kesehatan, air, sosial ekonomi, dan banyak lagi. Akhirnya, ia tidak bisa menolak lagi tawaran menjadi wakil bupati. Ia pun mencalonkan diri menjadi wakil bupati mendampingi Suharto, sebagai calon bupati. Kemudian ia terpilih.

Praktik Kepemimpinan di Pemda: Mengoptimalkan Program Sesuai Visi Misi

Di masa kepemimpinannya kini, salah satu program yang ia kerjakan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurutnya, ketika memimpin masyarakat, maka yang harus dibenahi adalah internal pemerintahan terlebih dahulu. Sehingga, ia pun harus membenahi kalangan birokrat terutama soal kedisiplinan, kejujuran, kinerja, dan sebagainya.

Di samping itu, ia membenahi masalah pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Gunung Kidul, baik bagi jajaran pemerintahannya maupun warga masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia yang ia canangkan melalui pendidikan yang dimulai sejak anak usia dini (PAUD). Menurutnya, pendidikan anak usia dini sangat penting untuk membangun fondasi mental dan moral yang baik. Dengan fondasi yang baik itu diharapkan kelak dewasa akan menjadi anak-anak yang akhlaknya baik. PAUD di Gunung Kidul sendiri saat ini telah berkembang, bahkan Badingah pernah menerima anugerah sebagai “Bunda PAUD” terbaik se-Indonesia untuk kategori Angka Partisipasi Kasar (APK).

Untuk menangani masalah pendidikan, selain PAUD, Badingah juga mengembangkan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Kelompok difabel di Kabupaten Gunung Kidul mencapai 12 ribu jiwa. Baik anak-anak maupun orang tua, baginya perlu diperhatikan dan dikelola potensinya sebaik mungkin dengan cara diberikan keterampilan. Oleh karena itu, ia pun menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini, tersedia 240 sekolah di Gunung Kidul yang menerima anak berkebutuhan khusus.

Masalah lainnya adalah angka anak yang putus sekolah juga tinggi, karena membantu orang tua mencari nafkah. Bagi anak yang putus sekolah ini, ia dorong mengambil kelas Paket A dan B, sehingga tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA. Di sisi lain, kualitas pendidikan di Gunung Kidul terus ditingkatkan, termasuk guru dan fasilitas-fasilitasnya.

Selain itu, program peningkatan kapasitas di masyarakat perlu terus ditingkatkan. Dengan program-program pemberdayaan, pendampingan, dan penguatan, harapannya masyarakat lebih terampil dan pandai.

Dalam bidang kesehatan, program yang ia kerjakan adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mengoptimalkan peran Puskesmas. Semua Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dimintanya untuk dioptimalkan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Ia juga tengah berupaya untuk meningkatkan status badan layanan tersebut dari C menjadi B. Menurutnya jika statusnya sudah menjadi B maka tidak akan ada lagi kesulitan untuk melayani masyarakat yang terkena penyakit berat.

“Kita berupaya untuk bisa meningkatkan status, karena sekarang baru statusnya C, besok kalau bisa itu B, nanti kalau B kan tentu kita sudah tidak kesulitan. Karena sekarang kalau ada penyakit yang agak berat itu harus bawa ke Yogya padahal jarak sini sampai Sarjito itu mencapai antara 45-50 kilo; lebih 1,5 jam, kalau macet 2 jam lebih. Kan jauh dari sini. Itu nanti upaya kita untuk menjadikan rumah sakit itu jadi tipe B,” ujarnya.

Selain itu, di Gunung Kidul ada jalur jalan lintas selatan yang daerah-daerah wisatanya banyak. Namun, tidak ada rumah sakit yang tersedia. Potensi di wilayah itu luar biasa dengan kondisi laut yang masih bagus. Setiap Sabtu dan Minggu, biasanya jalur tersebut macet karena banyak masyarakat yang berlibur. Sehingga, jika ada yang sakit akan susah dan lama di bawa ke rumah sakit. Perlu disediakan rumah sakit dengan fasilitas yang baik untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

Visi Misi Dan Pemberdayaan Perempuan

Visi yang diusung Badingah saat mencalonkan diri menjadi bupati adalah mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2020.

Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut yang ia lakukan adalah mendorong perempuan-perempuan di Gunung Kidul mempunyai niat dan tekad memperkuat diri dengan belajar dan mengembangkan diri, meningkatkan wawasan, sehingga memiliki daya saing yang kuat.

Misi yang dikembangkan Badingah di Gunung Kidul antara lain:

- a. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- b. Mewujudkan pemantapan system dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Mewujudkan pemantapan system dan kelembagaan perekonomian.
- d. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- e. Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai.
- f. Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Salah satu program yang dikembangkan adalah optimalisasi usaha mikro masyarakat. Di tingkat desa, di mana sebagian besar masyarakat bertumpu pada sektor pertanian, akan didorong agar hasil pertanian tidak hanya langsung dijual oleh petani, tetapi juga diolah. Misalnya kacang, jagung, kakao, dan singkong tidak dijual mentah, namun diolah menjadi aneka produk. Hal ini ia lakukan karena melihat peningkatan wisatawan yang signifikan di Kabupaten Gunung Kidul.

“Jadi kita akan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Makanya sekarang kita adakan pelatihan-pelatihan di desa-desa, terus nanti kita jadikan satu industri-industri rumah tangga, yang ada kelompok-kelompoknya. Harapan kita nanti bisa *men-supply* oleh-oleh khas Kabupaten Gunung Kidul.”

Selanjutnya, pengembangan usaha ekonomi mikro ini tak hanya makanan olahan, tetapi juga industri kerajinan masyarakat

yang akan dioptimalkan untuk bisa dijual. Hal lain, masyarakat didorong membangun tempat-tempat penginapan bagi wisatawan, yang daerahnya masuk desa wisata. Misalnya di desa Ngagrek, ada Goa Pindul, dilokasi ini terdapat tempat-tempat penginapan. Guna kebutuhan itu, ia pun membuat program pelatihan bagi masyarakat di wilayah tersebut, terkait keterampilan dalam melayani wisatawan.

Pada 2014 yang lalu, Badingah mendapat penghargaan sebagai kepala daerah terbaik dalam mendorong iklim pariwisata yang beretika dan berkelanjutan. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga *Ombudsman* Swasta (LOS) Yogyakarta, dalam rangka *LOS awards*.

Guna memajukan kehidupan perempuan di Gunung Kidul, Badingah menjelaskan bahwa perlu kerja sama semua pihak yang terkait. Ia tidak sendirian melakukan tugas-tugasnya melayani masyarakat. Di tiap kecamatan, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melalui mereka, didorong agar sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan, baik anggaran maupun kegiatannya. Dan itu, tertera dalam aturan-aturan daerah. Ia pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk keperluan itu.

Badingah meminta semua badan atau dinas di Gunung Kidul memperhatikan pemberdayaan perempuan di bidang masing-masing, misalnya kesehatan reproduksi, HIV/AIDs, ekonomi, dan lainnya. Umpamanya, Dinas Perindustrian didorong untuk melakukan pelatihan seperti pelatihan membuat mie *mocaf* jagung sebagai pengganti nasi. Juga untuk menggalakan kerja sama dengan kelompok tani perempuan dengan dinas-dinas terkait, terutama Dinas Pertanian, terus dilakukan pendampingan mulai dari tanam sampai pengolahan, dan lainnya.

Badingah bersama jajarannya rutin melakukan pengawasan. Ia mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk melaporkan semua yang dikerjakan dalam membangun Gunung Kidul. Sebulan sekali ada forum kepala SKPD, dan ia didampingi

oleh asistennya turun ke lapangan memastikan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh SKPD terkait. Ia kerap melakukan sidak ke masyarakat untuk memastikan apakah jajarannya melaksanakan program-programnya atau tidak.

Mendukung Inisiatif Warga Menghapuskan Perkawinan Anak

Angka perkawinan anak di Gunung Kidul cukup tinggi. Badingah menjelaskan bahwa persoalan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan menjadi masalah pokok yang dihadapi perempuan di Gunung Kidul. Sehingga, hal itu sedikit banyak menyumbang pada tingginya angka perkawinan anak.

Desember 2015, Badingah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Regulasi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menurunkan angka perkawinan anak. Ia menjelaskan bahwa munculnya regulasi tersebut bermula dari inisiatif warganya.

Bermula di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, terdapat komunitas-komunitas yang didampingi oleh Rifka Annisa, sebuah organisasi perempuan di Yogyakarta. Di desa tersebut terbentuk komunitas remaja, ibu-ibu, dan laki-laki peduli. Karena keprihatinan akan tingginya kasus perkawinan anak di Gedangsari, maka masyarakat pun berinisiatif membuat deklarasi 'Stop Perkawinan Dini' dengan berbagai pihak di kecamatan, seperti Polsek, Koramil, KUA, dan MUSPIKA. Deklarasi ini diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan dukuh se-Kecamatan Gedangsari, Polsek, Koramil, KUA, dan MUSPIKA. Badingah hadir dan menyaksikannya saat deklarasi.

Tak lama setelah deklarasi, masyarakat mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten supaya dibuatkan regulasi untuk mencegah perkawinan anak. Hasil beberapa kali pertemuan dan diskusi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang semakin tinggi;
 - c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologi anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak
 - d. bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. (Sumber: <https://bpmpkbGunungKidul.wordpress.com>)

Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunung Kidul untuk menyusun draft regulasi, maka Juli 2015 regulasi pencegahan perkawinan anak pun disahkan.

Badingah sangat mendukung upaya-upaya warganya dalam mencegah perkawinan anak dan mengajak masyarakat turut mengawasi implementasinya. Menurutnya, kini deklarasi “Stop Perkawinan Dini” terjadi di beberapa kecamatan selain Gedangsari, seperti di Saptosari, Wonosari, dan Tanjungsari. Ia mencontohkan,

bahwa kini ada istilah *Polokromojati*, di mana tiap pasangan yang akan menikah harus menanam sepuluh pohon jati. Demikian pula setiap ada kelahiran, mereka berkewajiban menanam sepuluh pohon jati.

Tantangan Perempuan Dalam Politik

Dalam bidang politik, menurut Badingah, perempuan masih memiliki kesulitan untuk terlibat. Walaupun keterwakilan 30 persen perempuan telah digaungkan di Gunung Kidul, namun dalam praktiknya masih sulit diraih. Menurutnya, keberhasilan keterwakilan 30 persen perempuan di politik bergantung pada perempuan itu sendiri, berani atau tidak.

Menurutnya, saat perempuan berkarir di politik, mereka tetap memikirkan situasi dan kondisi keluarga. Padahal, ia menjelaskan, jika ingin masuk di dunia politik, baik menjadi anggota DPR, bupati, wakil bupati, dan lainnya, maka saat sosialisasi tak lepas dari biaya politik.

“Biaya politik itu bukannya kita bagi-bagi uang kepada masyarakat, tetapi kita mensosialisasikan program-program kita. Itu kan mengumpulkan masyarakat, paling tidak, harus ada minum dan *snack*. Coba kalau kita mengumpulkan 500 orang kali 7000 rupiah, sudah berapa? Itu satu kali kita ketemu dengan masyarakat. Umpamanya masyarakat Kabupaten Gunung Kidul pilihnya kira-kira 500 ribu pemilih? Coba? Seandainya saya berpikir seperti itu, terus nanti keluarga saya mau bagaimana, anak saya bagaimana, besok butuh makan, besok butuh sekolah, itu kalau perempuan. Maka pertimbangan-pertimbangan itu masih dipegang oleh perempuan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul,” ujarnya.

Badingah menjelaskan bahwa biaya politik bagi calon yang lama dan baru dikenal akan berbeda. Yang belum dikenal akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk sosialisasi. Inilah yang menjadi kendala perempuan berpartisipasi dalam dunia politik.

Saat pencalonan, Badingah tidak mengeluarkan biaya

operasional yang besar karena dukungan berbagai pihak. Untuk pertemuan-pertemuan, kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh masyarakat yang menyediakan tempat, makan dan minum, sehingga tidak mengeluarkan uang. Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat merupakan hal penting yang tetap harus dipertahankan.

“Terus kenapa saya kemarin kemarin itu mengajukan diri sampai dua kali sebagai wakil bupati, dari wakil bupati naik menjadi bupati, sekarang bupati lagi? Yang pertama, jaringan. Kita sudah mempunyai jaringan yang luas. Yang kedua, kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada kita, bagaimana dan apa yang kita perbuat, masyarakat sudah bisa menilai. Kalau masyarakat sudah menilai, kalau terjun ke masyarakat saya tidak begitu banyak mengeluarkan uang. Karena masyarakat sudah percaya,” jelas Badingah.

Saat ini, jumlah perempuan yang duduk di posisi strategis di Gunung Kidul masih sedikit. Misalnya di DPRD, dari 45 orang anggota dewan hanya ada tujuh perempuan anggota legislatif; di Eselon II, hanya ada satu perempuan, dan dari 144 desa, hanya sembilan kepala desa perempuan, sedangkan untuk camat, belum ada camat perempuan.

Menurutnya, peluang perempuan berpartisipasi dalam politik terbuka lebar dengan adanya kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan. Yang harus dilakukan, perempuan harus memperkuat diri, sehingga memiliki kekuatan tawar-menawar, terutama dengan kalangan laki-laki.

“Perempuan pokoknya harus belajar, jangan pernah perempuan tidak mau belajar sampai kapan pun. Dan perempuan, harapan saya, jangan menjadi beban orang lain. Harus produktif. Dan sebagai tokoh, harus menjadi tauladan. Kalau kita menjadi tauladan bagi perempuan, mengarahkan perempuan yang lain, akan mudah,” ungkap Badingah. Ia ingin hidupnya senantiasa bermanfaat bagi orang lain.

Tanggapan Terhadap Kepemimpinan Badingah

Tanggapan terhadap kepemimpinan Badingah disampaikan oleh Siswanto, kepala dusun Ngalang, Gedangsari, Gunung Kidul. Sebagai kepala dusun, Siswanto menjelaskan kaitan program kerjanya dengan isu pernikahan anak di Desa Ngalang. Siswanto mendapat bimbingan dari lembaga Rifka Annisa dalam membentuk komunitas. Ada komunitas remaja, ibu-ibu, dan laki-laki. Di komunitas laki-laki, Siswanto masuk menjadi anggotanya. Bersama dengan komunitas Laki-Laki Peduli dan kepala dukuh se-Kecamatan Gedangsari membuat kesepakatan bersama dan mendeklarasikan 'stop perkawinan anak'. Mereka melakukan kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak di dukuh masing-masing.

Sebelum program pencegahan perkawinan anak dilancarkan di Gunung Kidul hingga ke desa-desa, maka tingkat perceraian usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga, sangat tinggi di daerah ini. Warga masyarakat, menurut Siswanto, belum melek pengetahuan bahwa hubungan perempuan dan laki-laki di dalam keluarga adalah setara dan sebagai mitra. Melalui pendampingan oleh Rifka Annisa disadarkan, bahwa suami dan istri harus saling menghargai, setara, dan mitra. Apabila dahulu banyak perempuan dibatasi ruang geraknya untuk berkarir, maka sekarang lebih bebas memilih aktivitasnya. Laki-laki kini menyadari bahwa mereka harus pula membantu istrinya di dalam kegiatan kerumahtanggaan masing-masing.

Siswanto menjelaskan, bahwa seluruh kepala dukuh se-Kecamatan Gedangsari ikut prihatin dengan maraknya kasus perkawinan anak, perceraian dini, dan kekerasan dalam rumah tangga. Semua lembaga tertinggi di kecamatan (Polsek, Koramil, KUA, MUSPIKA) bersepakat mendeklarasikan stop perkawinan anak. Semua pihak melihat bahwa perkawinan dini belumlah matang secara psikologis dan lainnya.

Kata Siswanto, ketika kesepakatan tersebut dideklarasikan

di Gedangsari, maka Bupati Badingsari hadir dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, dukuh-dukuh se-Kecamatan Gedangsari mensosialisasikan kesepakatan itu melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT/RW, Karang Taruna, ataupun melalui rembug dusun, untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat.

Siswanto menyatakan agar kesepakatan itu menjadi program desa, maka harus dimasukkan kedalam RPJMdes sehingga memperoleh anggaran desa untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selain sosialisasi, maka dilakukan pula pendampingan korban kekerasan di dalam rumah tangga ataupun penanganan kasus perceraian. Jadi, usulannya berasal dari warga masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan masyarakat, disampaikan pencegahan perkawinan anak tersebut.

Siswanto juga menerangkan bahwa di tingkatan desa sekarang sudah menerima tunjangan sesuai dengan UMR yang berlaku di Gunung Kidul. Besarannya sekitar Rp. 1.260.000,- Sementara itu, menurutnya, program-program seperti pendidikan yang pernah dilakukan Bupati, kini masih terus berjalan. Dia melihat bahwa perempuan desa sekarang lebih mendapat kesempatan untuk mengikuti rapat-rapat, bahkan harus terwakilkan sekira 30 persen. Dahulu hal seperti ini kebanyakan dilakukan oleh laki-laki semua. Peningkatan permodalan dan pelatihan-pelatihan saat ini banyak ditujukan kepada perempuan, dalam rangka peningkatan usaha kecil.

Dengan adanya peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan anak, maka angka perkawinan anak di Kantor Urusan Agama (KUA) makin menurun setiap tahunnya. Biasanya setiap tahun 8-9 kasus perkawinan anak, maka sekarang menurun menjadi 1-2 kasus perkawinan anak yang terjadi. Itupun terjadi karena pergaulan tak terkendali, sehingga menimbulkan kehamilan dini atau kehamilan tak diinginkan, sehingga dilakukan perkawinan dini.

Dalam bidang kesehatan, dulu program jaminan kesehatan masyarakat, sekarang diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS),

meskipun masih ada warga masyarakat miskin yang belum memperoleh kartu tersebut. Menurut Siswanto, masih ada sekitar 60 keluarga miskin yang belum menerima kartu sehat itu di pedukuhannya. Di samping program itu, ia melihat ada pengembangan desa-desa wisata sebagai program utama Badingah saat kampanye menjadi bupati waktu itu. Juga ada pengembangan industri rumahan. Program desa-desa wisata realisasinya berjalan, meskipun belum 100 persen. Pelatihan-pelatihan untuk usaha rumahan sudah diselenggarakan. Akses jalan ke desa-desa sudah mulai dibangun dan ditata.

Dalam rangka mencegah perkawinan anak, maka di Gedangsari diadakan 'Gedangsari Awards'. Bagi desa-desa yang 2-3 tahun berturut-turut tidak ada perkawinan anaknya, maka akan mendapatkan hadiah. Datanya akan disampaikan oleh KUA. Hal ini telah disetujui di dalam kesepakatan bersama, dan bahkan yang hendak menikah disarankan untuk menanam pisang, demikian ungkap Siswanto.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Kristika, ketua *Youth Forum*, dan Yani (bidang media di lembaga yang sama. Menurut Kristika, *Youth Forum* adalah organisasi remaja (remaja-remaja sekolah) di Gunung Kidul. Sekarang baru sekitar 12 sekolah yang terlibat di sekitar Wonosari. Kegiatannya lebih menasar ke kebutuhan remaja-remaja, misalnya pendidikan untuk anak-anak yang terkena kasus kehamilan dini (kehamilan tak diinginkan), tentang HIV/AIDs, dan lainnya. Diseminasi informasi dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada remaja-remaja, di samping adanya kegiatan menari bersama (*Dance4Life*).

Biasanya ada pertemuan rutin di *Youth Forum* dan ada satu atau dua anak sebagai koordinatornya. Koordinator inilah yang menyebarkan informasinya ke sekolah masing-masing. Pertemuan rutin itu dilaksanakan dua kali sebulan, pada minggu pertama dan ketiga. Dan kegiatan *Dance4Life* dipakai sebagai media kampanye.

Di *Youth Forum* ada susunan pengurusnya juga, seperti ketua, sekretaris, dan bidang-bidang kerjanya. Tentang advokasi perkawinan anak di Gunung Kidul, menurut Kristika, waktu yang lalu *Youth Forum*

dan ibu-ibu komunitas juga turut terlibat. Dia dan kawan-kawannya berharap agar pemerintahan Gunung Kidul dapat memfasilitasi pendidikan mengenai isu perkawinan dini bagi remaja-remaja. Kristika menjelaskan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi adalah penting untuk mengurangi angka perkawinan anak, karena bersangkut paut dengan masalah kehamilan yang tak diinginkan. Bagi remaja-remaja, teman dekat mereka ialah keluarga, sekolah, dan teman kelasnya. Pendidikan tersebut biasanya diselenggarakan di sekolah-sekolah sehingga murid-murid mengetahui masalah perkawinan dini, kehamilan tak diinginkan, pergaulan, dan sebagainya.

Dalam pandangan Kristika dan Yani, perempuan juga berhak dan mampu menjadi pemimpin. Laki-laki dan perempuan hendaknya setara. Meskipun pembangunan telah semakin merata di Gunung Kidul, namun kasus perkawinan anak masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau informasi, pendidikan, dan sebagainya. Bupati Badingah memang membuat peraturan bupati, akan tetapi untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, kebijakan tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik. Di daerah Panggang dan Rongkop bahkan sudah tersedia Puskesmas Ramah Remaja (PRR), meskipun jam operasionalnya masih terbatas pada jam-jam sekolah.





Siswanta, Kepala Dusun Ngalang, Gedangsari, Gunung Kidul.

Ia mengemukakan bahwa dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Anak, angka perkawinan anak di KUA makin menurun setiap tahunnya. Biasanya setiap tahun ada 8-9 kasus perkawinan anak, sekarang menjadi 1-2 kasus.

Selain itu, program-program pendidikan yang dilakukan Badingah, masih berjalan. Ia melihat bahwa perempuan desa kini lebih mendapat kesempatan mengikuti rapat-rapat karena harus terwakilkan 30 persen.

Peningkatan modal dan pelatihan-pelatihan banyak ditujukan kepada perempuan dalam rangka usaha kecil. Di tingkat kesejahteraan perangkat desa pun sekarang lebih baik.

IX. NI PUTU EKA WIRYASTUTI (Bupati Tabanan, Bali)

Biografi Singkat

Ni Putu Eka Wiryastuti, lahir di Tabanan, Bali, 21 Desember 1975. Ia menyelesaikan pendidikan D2 *fashion* di lembaga Susan Budihardjo, Jakarta. Ia senang belajar dari masyarakat, keluarga, dan lingkungannya. Sejak kecil hingga kini, ia selalu mau belajar. Awalnya ia tidak fasih berbahasa Bali, namun ia memaksa diri mempelajari bahasa tersebut dan akhirnya mampu berbahasa Bali, sehingga mempermudah interaksinya dengan masyarakat Tabanan, Bali, ketika menjadi bupati sekarang.

Ni Putu Eka Wiryastuti mengaku masa kecilnya biasa-biasa saja. Ia sering bermain dengan tetangganya karena kedua orangtuanya sibuk. Ia terbiasa mandiri dan melakukan segala sesuatu serba sendiri. Pada suatu titik, saat menyelesaikan Sekolah Menengah Atas, terbersit kesadaran dalam hatinya, bahwa ia tak akan maju bila hidupnya begitu-begitu saja.

Ketika lulus SMA, ayahnya mengajaknya perjalanan bisnis ke Jepang selama 6 hari. Dengan hanya bekal untuk enam hari, tiba-tiba Eka memutuskan menetap di Jepang. Ini suatu keputusan yang membuat ayahnya menangis, karena Eka adalah satu-satunya anak perempuannya. Eka memutuskan tidak kembali ke Indonesia bersama ayahnya, karena terinspirasi dengan budaya penduduk Jepang yang berdisiplin dan pekerja keras. Ini suatu keputusan yang nekad, karena sama sekali ia tak bisa berbahasa Jepang. Ia memutuskan akan balik ke Indonesia setelah menjadi orang sukses.

Singkat cerita, ia ditiptkan pada seorang teman bisnis garmen ayahnya. Di sana, Eka belajar bahasa Jepang bersama anak teman bisnis ayahnya. Dalam waktu 3 bulan, ia berhasil menguasai bahasa Jepang. Ia pun membantu pekerjaan rumah tangga di mana ia tinggal, sehingga orang sayang padanya. Ia memilih bekerja paruh

waktu di perusahaan teman ayahnya. Ia belajar menjalankan mesin jahit yang canggih, yang baru pertama kali dilihat dan dipegangnya. Ia bekerja 2-4 jam lebih dari orang Jepang. Ia merasa bangga karena mendapatkan makna hidup dan penghasilan dari hasil pekerjaannya. Eka bekerja di tempat itu untuk menjahit, selama 3 tahun.

Setelah 3 bulan, ia memutuskan pindah apartemen. Meski apartemennya kecil dan murah, namun ia bahagia karena bisa membayar sendiri. Ia pun mendaftarkan diri masuk sekolah fashion, namun tak bisa melanjutkannya karena peristiwa gempa Kobe dengan skala 7,8 R, membuatnya harus pulang ke Indonesia. Di Indonesia, ia melanjutkan pendidikannya yang tertunda itu, dengan mengambil D2 di bidang *fashion* di lembaga Susan Budihardjo. Perjuangannya sebagai anak kos yang serba sulit dan keras ialaminya dalam kurun waktu tersebut. Sambil sekolah, ia mengerjakan pesanan baju teman-temannya, akhirnya mulai membuka butik. Karyanya disukai oleh teman-temannya. Bisnisnya berkembang hingga memiliki beberapa tukang jahit lalu memperluas jaringan butiknya.

Setelah lima tahun di Jakarta, ayahnya memintanya meneruskan perusahaan garmen ayahnya, karena ayahnya memilih fokus sebagai Bupati, setelah terpilih. Ia menjalankan bisnis garmen ayahnya mulai dari nol. Perjuangan keras jungkir balik ia lakukan, yaitu dari pembuatan *website* sampai promosi dilakoni, hingga memiliki klien dari Italia, Australia, dan lain-lain. Kegiatan itu dilakukannya selama 5 tahun.

Perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus. Ia pernah ditipu beberapa kali. Pengalaman pahit ini membuatnya bertekad tak ingin mengulangi peristiwa yang sama. Akhirnya, ia pun terjun dalam dunia politik untuk menolong orang lain. Menolong orang inilah motivasi Eka terjun dalam bidang politik.

Eka mengikuti organisasi Keluarga Besar Marhaen dan Srikandi Demokrasi Indonesia tahun 2007. Pengalaman tersebut dijalannya beruntun dan dilanjutkan menjadi anggota DPC PDIP

di Bappilu di Tabanan, Bali. Selain itu, ia memiliki Yayasan Ekaloya, yang fokus kepada kegiatan sosial untuk masyarakat. Ia juga aktif di Forum Kota. Saat itu, sekitar 6 organisasi yang diikutinya.

Masa-masa tersebut bagi Eka memang senang melakukan kegiatan sosial. Ia menyelenggarakan pasar murah dan pengobatan gratis. Perhatiannya terhadap isu perempuan ditunjukkan dengan meningkatkan keterampilan ibu-ibu memajukan perekonomian mereka. Ia mengajarkan ibu-ibu tentang sanggul Bali sehingga mendapat kesempatan menyanggul rambut ibu-ibu PKK. Kegiatan sosial ini dilakoninya tahun 2007. Ia menginisiasi ibu-ibu membuat bakso olahan dari ikan. Semua aktivitas ini dilakukannya dengan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan ibu. Kesejahteraan ibu adalah kesejahteraan keluarga.

Salah satu program yang dilaksanakan Eka melalui Yayasan Ekaloya ialah pemeriksaan kanker serviks bagi perempuan. Dalam program ini, Eka terlibat langsung mengunjungi warga melakukan pemeriksaan kanker serviks. Ia melihat betapa ibu-ibu belum mengerti tentang kanker serviks dan sangat malu untuk diperiksa. Menurutnya, ia harus jemput bola melakukannya. Ia tidak diam mengharapkan warga yang datang langsung untuk pemeriksaan.

Pengalaman Berpolitik

Program tersebut membuat Eka dikenal oleh warga masyarakat, sehingga ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Tabanan, ia memiliki basis massa yang mendukungnya. Ketika pencalonannya menjadi anggota DPRD Tabanan, DPC PDIP tidak memiliki calon perempuan untuk diusulkan agar memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Akhirnya, DPC partai mencalonkan dirinya. Kesempatan ini disambut baik olehnya dan menjadikan itu sebuah kesempatan menolong orang banyak.

Eka terpilih sebagai anggota DPRD, dengan suara terbanyak di Bali, sekitar 5.800 suara. Ini sangat jauh dibandingkan suara calon lainnya yang berkisar 1.000-1500 suara, bahkan ada yang hanya

600 suara. Ia menjadi anggota DPRD selama 6 bulan. Pada periode kedua kepemimpinannya sebagai Bupati, ia meraih 65 persen suara. Jumlah suara yang sangat tinggi. Menurut Eka, itu terjadi karena sudah dikenal oleh warga masyarakat.

Kampanye yang dilakukan Eka adalah pesta rakyat di tiap kecamatan. Ia mengadakan lomba anak-anak muda dengan ibu-ibu. Lombanya ialah membuat yel-yel kemudian dinyanyikan. Acara berlangsung sangat seru dan menghibur rakyat. Semua warga masyarakat turun bersama di lapangan dalam suasana kegembiraan. Melalui pesta rakyat ini, sekaligus ia mengubah stigma politik angker menjadi sebuah kegembiraan. Bahkan melalui pesta tersebut, ia bisa melihat peta kekuatan politiknya.

Praktik Kepemimpinan di Pemda

Eka sangat menyukai seni dan menjalankan kepemimpinannya dengan seni. Baginya, seni adalah perwujudan Yang Agung. Ia mengaku sebagai orang yang religius. Ia mensyukuri hidup dan menikmati proses. Ia percaya semua adalah proses belajar, tidak ada yang instan. Lima tahun pertama dalam kepemimpinannya sebagai Bupati, ia mengaku banyak mengalami tantangan. Namun periode kedua kepemimpinannya, ia bisa berdamai dan mengatasinya. “Aku dikenal sebagai Bupati yang tidak pernah galau”, ujar Eka sembari tertawa lepas.

Eka memiliki motto “Berbuat, Berjuang dan Berdoa”. Ia menganggap bahwa jabatan yang diembannya saat ini sebagai Bupati adalah titipan Tuhan. Jabatan ini untuk menyejahterakan umat-Nya dan menolong umat-Nya. Tantangan yang ia hadapi ialah perjuangannya dalam mewujudkan nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam relasi antar manusia dan manusia dengan alam.

Perempuan yang mengidolakan Bung Karno ini menjalankan programnya dengan menjadikan Trisakti Pembangunan sebagai nilai-nilai pembangunan. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berdaulat di bidang budaya. Itulah

benang merah pembangunan yang dilakukannya di Tabanan, Bali. Menurut Eka, Tabanan adalah daerah pertanian. Banyak warganya merupakan kaum tani alias kaum marhaen. Itu sebabnya program yang banyak dilakukannya menyangkut keberpihakannya pada petani. Beberapa program yang sedang dan sudah dilakukannya antara lain:

1. Perda untuk petani dan nelayan. Eka sedang memperjuangkan pembebasan pajak untuk petani yang produktif. Petani yang mengalami gagal panen disubsidi oleh pemerintah, dengan membayar sejumlah uang, sehingga tidak ada fungsi alih lahan oleh petani. "Kalau petani sudah sejahtera, mereka akan malas menjual lahannya", ujar Eka.
2. Program beras sehat. Pemerintah membeli beras Tabanan untuk 11.000 orang pegawai. Jadi, pegawai tidak boleh membeli beras lain. Eka berinisiatif menambahkan tunjangan pegawai yang dikelola oleh koperasi untuk membeli beras petani. Setiap bulan, sekitar 124 ton beras yang dibeli untuk PNS Tabanan. Program ini sudah berjalan selama 4 bulan.
3. Program mobil sehat. Mobil ini berkeliling sekali dalam dua hari, ke tiap desa. Ada empat dokter yang terlibat dalam program ini, seperti dokter umum dan dokter gigi. Mobil sehat ini diluncurkan untuk mengobati kanker serviks, termasuk pemeriksaan mata dan katarak, di mana operasinya gratis. Ada juga pemberian kaca mata untuk lansia.

Program mobil sehat menunjukkan kepedulian Eka kepada perempuan. Ia melihat banyak perempuan yang belum mengerti tentang kanker serviks, dan perlunya mereka disadarkan menjaga diri agar tak terkena penyakit kanker serviks. Memang, jauh sebelum menjabat sebagai Bupati, ia sudah menunjukkan perhatiannya melalui aksi-aksi sosial yang berpihak kepada perempuan. Ia percaya bahwa kesehatan ibu adalah kesehatan keluarga. Program mobil

sehat ialah program satu-satunya di seluruh Indonesia.

4. Program selanjutnya adalah program Badan Usaha Milik Desa yang membeli hasil pertanian masyarakat, apapun bentuknya. Selanjutnya, mereka yang menyalurkan, yaitu BUMDes. Ada 58 BUMDes yang dimodali oleh Pemda Tabanan untuk menjalankan program ini. BUMDes tidak mengambil keuntungan dari program ini, namun hanya menyalurkan hasil pertanian. Hasil pertanian yang diterima BUMDes akan diteruskan kepada BUMD, yang berfungsi menjual hasil pertanian ke *supermarket* atau tempat-tempat lainnya. Program ini menolong rakyat fokus dan tidak berpusing-pusing dalam memproduksi hasil pertanian yang berkualitas. Program ini menjadikan Eka sebagai salah satu penerima penghargaan *I-News Maker*.
5. Program Trans Serasi. Program ini ialah kegiatan antar jemput siswa sekolah SMP dan SMA, sekitar 5000-6000 siswa, secara gratis. Ini menjadi program percontohan oleh UNICEF. Program ini menyediakan bus gratis dari Kementerian Perhubungan untuk Pemda Tabanan. Yang menarik dari program ini ialah Eka menggunakan angkot yang sudah tidak digunakan lagi untuk fasilitas antar jemput siswa sekolah. Sekitar 80 angkot direnovasi dan dipugar oleh Pemda Tabanan menjadi angkot yang layak pakai. Angkot dicat ulang dan diberi tempat duduk busa, yang tadinya hanya tempat duduk besi. Angkot yang digunakan gratis oleh siswa sekolah ini dibayar oleh Pemda.

Ini salah satu bentuk perhatian dan solusi yang diberikan Eka untuk menghindari pelecehan kepada anak. Dengan angkot gratis, maka anak-anak bisa pulang pergi sekolah ke rumah dengan selamat. Orang tua tidak perlu khawatir. Selain itu, program Trans Serasi ini sebuah upaya mengurangi tingkat kecelakaan sepeda motor. Menurut Eka, banyak anak yang umurnya belum cocok memakai sepeda motor dan rentan kecelakaan. Ia berencana memasukkan program

ini dalam Perda sehingga berkelanjutan dan diteruskan oleh pemimpin selanjutnya.

6. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda ini sedang diperjuangkan Eka, karena menyadari perempuan mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Perempuan memiliki taraf hidup yang harus diperhatikan. “Jadi tidak sekadar perhatian kepada pelecehan saja”, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa perempuan perlu diperhatikan bukan sebagai jenis kelamin. Perempuan harus diberikan ruang dan tempat, demikian juga anak. Anak pun perlu diberikan hak-hak sebagai anak Indonesia. Perda ini sedang diupayakan dan berharap bisa berhasil tahun ini.
7. Program infrastruktur jalan. Ketika mulai menjabat bupati, Eka menerima warisan jalan rusak sekitar 750 km. Ia berinisiatif memperbaiki infrastruktur jalan secara merata di 10 kecamatan tanpa mempedulikan apakah kecamatan tersebut penduduknya atau tidak. Baginya, semua warga Tabanan adalah warganya.

Program ini merupakan kolaborasi antara Pemda dengan masyarakat. Pemda menyediakan materialnya, sedangkan masyarakat menyediakan tenaganya. Jalan yang dibangun tebalnya 20 cm dan tahan hingga 15 tahun. Program ini dilakukan melalui bentuk hibah, dengan Surat Keputusan Bupati. Sampai sekarang, ada 2 jalan yang diberi nama ‘Jalan Ni Putu Eka Wiryastuti’. Warga membuat nama jalan demikian, karena menurut Eka, mereka sangat senang dan mencintai program tersebut.

Dampak program ini menjadi Eka lebih dekat dengan rakyatnya. Rakyat dengan rakyat makin dekat, dan rakyat dengan lingkungannya juga dekat. Selain itu, rakyat merasa bangga dengan hasil kerjanya dan bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Dampak lainnya, menurut Eka, menguatnya gotong royong di antara masyarakat. Bapak-bapak mengerjakan perbaikan jalan, dan ibu-ibu

mempersiapkan konsumsinya. Ia sendiri turun lapangan memantau program ini.

Program ini mampu menghemat anggaran pembangunan. Kalau dijadikan proyek, program ini menghabiskan dana sekitar Rp. 1,7 trilyun. Namun, program yang dikerjakan bersama warga masyarakat ini hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp. 8 milyar. Perbedaan jumlah dananya sangat besar. Inilah yang menyebabkan Eka menerima penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jalan yang diperbaiki bukan jalan kabupaten, melainkan jalan desa, penghubung antar desa, jalan subak, dan jalan ke tempat ibadah. Ada sekitar 300 km jalan yang sudah selesai dibangun dan diperbaiki.

8. Program bedah warung. Melalui program ini, Eka berharap agar warung-warung milik warganya menjadi tuan rumah lebih dari toserba-toserba yang ada yang memiliki modal besar. Sudah ratusan warung yang dibedah dan diberi modal. Warungnya dicat dan dipasang keramik, juga diberi spanduk yang bertuliskan nama warung.

Eka menjelaskan bahwa proses kepemimpinan itu penting, bukan hanya hasilnya. Sebab melalui proses, ia belajar berintegrasi diri dengan Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Ia tidak pelit untuk berbagi. Ia senang membagi ilmunya. Banyak Bupati yang melakukan studi banding ke Tabanan, karena prestasi yang ditorehkan dan capaian program yang dilakukannya. Penghargaan yang diterimanya antara lain:

- a. Penghargaan ekonomi kerakyatan, oleh *I-News Maker*, tahun 2015.
- b. Penghargaan *Sindo Awards* untuk Tata Kelola Pemerintahan terbaik.
- c. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari Pajak.
- d. Penghargaan MURI (17 Rekor MURI).
- e. Penghargaan *BUMD Awards* sebagai CEO terbaik.

Masih banyak prestasi lainnya yang diraih Eka selama kepemimpinannya. Di Indonesia, indeks harapan hidup tertinggi diraih oleh Pemda Tabanan, sekitar 75-78 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi Tabanan mencapai 6,7 persen, mengalahkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Saat Eka baru menjabat sebagai Bupati, jumlah pengangguran sebanyak 7.400 orang. Tahun 2015, angka tersebut berkurang menjadi 1.000 orang, dengan berbagai alasan. Tingkat penderita kanker serviks dari 18 persen menjadi 7 persen, tahun 2015.

Selain itu, Tabanan juga mengembangkan 22 desa wisata. Eka berharap agar semua desa menjadi desa wisata sehingga tak ada alih fungsi lahan dan ekonomi rakyat bertumbuh, karena mereka sendiri pelaku dan penikmat ekonomi. Dengan demikian, rakyat akan merasakan kearifan lokal dan adat budaya Bali.

Semua prestasi dan keberhasilan kerja Eka terekam dengan baik dan disampaikan secara *online* melalui media Pemda Tabanan. Namun, untuk *website* pribadi, memang dalam proses pembuatan. Publikasi pribadi digarap langsung oleh Eka melalui *Facebook*.

Untuk urusan transparansi dan akuntabilitas, Eka sedang memperjuangkannya. Pengalamannya di bidang bisnis membuatnya sedikit banyak memiliki gambaran soal transparansi dan akuntabilitas. Ia membuat sistem keuangan secara *online*. Ia menggunakan *e-budgeting* dan *e-planning*. Semuanya serba elektronik. Prosesnya masih berjalan 30 persen. Namun ia berharap itu bisa dipergunakan pada 2017 mendatang. Yang sekarang berlaku adalah perizinan *online* dan Perencanaan Bappeda. Menurut Eka, bila sistem keuangan dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dampaknya makin efektif dan efisien.

Dalam menjalankan kepemimpinannya di Pemda Tabanan, ia berupaya memberdayakan anak buahnya. Ia mengader bawahannya dan memberi ruang kepada mereka untuk bertumbuh. “Yang dapat diselesaikan sendiri, selesaikan saja. Tidak perlu menunggu saya”, jelas Eka. Ia mengajak anak buahnya memakai media komunikasi,

seperti *Whatsapp*, dan sebagainya.

Eka yang suka menyapa warga masyarakat ini menganggap kepemimpinan perempuan itu penting. Perempuan, atau ibu adalah sosok yang cinta damai. Perempuan itu sabar dan tangguh, penuh kasih dan toleransi. Kalau nilai-nilai ini disandingkan di dunia politik, maka itu akan menjadi penyeimbang. “Akan lebih teduh”, kata Eka, tanpa menafikan pemimpin laki-laki.

Eka memahami perlunya perjuangan perempuan untuk berhasil di segala bidang, entah itu bisnis ataupun politik. Di bidang apapun yang digeluti, perempuan hendaknya memberikan yang terbaik, alias 100 persen. Baginya, perempuan tidak sekadar “ada”, namun harus berkualitas. Misalnya, keterwakilan 30 persen harus disertai dengan kualitas perempuan. Jika ingin terjun dalam politik, hendaknya dipersiapkan dengan baik misalnya berorganisasi, belajar menolong rakyat, belajar berbicara di depan umum, memodali diri dengan keterampilan, dan lainnya.

Eka tegas menyatakan, bila bukan perempuan yang memperjuangkan derajatnya, maka tidak akan terjadi perubahan. Sekeras apapun seseorang berjuang untuk perempuan, jika perempuannya tidak mau maju, maka tidak akan ada perubahan. Perempuan perlu saling berbagi, menolong, dan mendukung satu sama lain. Di Tabanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah kepemimpinannya adalah perempuan. Perempuan mulai membuka diri. Camat ada yang perempuan, demikian pula di Dinas. Eka mendorong dan mengader mereka untuk berani tampil. Ia tak sekadar mengader, namun menanamkan agar mereka berkualitas. Perempuan perlu memiliki kemauan untuk bangkit dan berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Jangan diam dan stagnan, bekali diri dengan kemampuan dan kualitas.

Tanggapan Terhadap Kepemimpinan Ni Putu Eka Wiryastuti

Budawati Nengah, Koordinator WCC Bali, mengenal sosok

Eka sejak lama, saat sama-sama berada di organisasi Srikandi Demokrasi Indonesia. Menurut Budawati, Eka adalah sosok perempuan pemimpin yang bekerja keras. Ia serius bekerja dan selalu memikirkan rakyatnya.

Eka, di mata Budawati, merupakan sosok yang peduli terhadap temannya sesama perempuan. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang sekarang sedang diperjuangkan kini menunggu ketok palu. “Ia ikut memperjuangkan Perda tersebut”, ujar Budawati, waktu ditanya pendapatnya tentang perjuangan Eka dalam menggolkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam perjuangan untuk mengesahkan Perda tersebut, Eka kerap berkomunikasi dengan Budawati Nengah, yang menggeluti isu-isu perempuan.

Pendapat lainnya datang dari Kadek Ayu, siswa SMPN Tabanan. Kadek Ayu menggunakan transportasi ‘Trans Serasi’ sejak tahun lalu, untuk pulang pergi dari sekolahnya ke rumahnya di Tua Ilang. Sebelum memakai Trans Serasi, ia harus merogoh kantong sebesar Rp. 6.000,-. Dengan adanya Trans Serasi, ia dapat menghemat uang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan lainnya.

Komentar lainnya disampaikan oleh I Gusti Ayu, siswa SMP kelas 8. Ia bertempat tinggal di Tegal Balerang, yang jaraknya sekitar 20 menit ke sekolah. Harapan Ayu ialah agar angkutan Trans Serasi terus beroperasi, karena sangat membantu orang tua siswa untuk tidak lagi mengantar dan menjemput siswa-siswa sekolah.

Serly, kelas 7 SMPN Tabanan, menyatakan pendapat positif terhadap program Ni Putu Eka, terutama angkutan gratis Trans Serasi. Ia tinggal di Kediri. Dengan Trans Serasi, ia menempuh perjalanan ke sekolah sekitar 15 menit. “Senang, kebantu. Uang jajan enggak habis. Bisa rame-rame sama temen. Angkotnya banyak,” seru Serly dan temen-temannya ceria. Serly dan teman-temannya menjelaskan bahwa angkuta Trans Serasi cukup aman. Sebelumnya, ia tidak pernah naik angkutan umum berbayar karena takut. Namun sejak adanya Trans Serasi, ia menjadi berani naik angkutan umum.

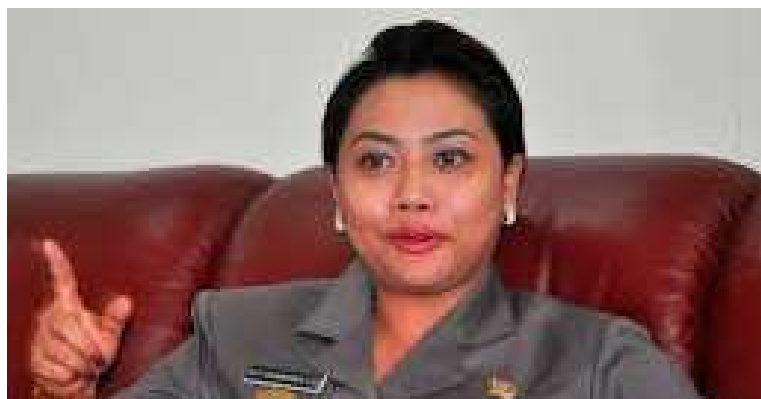
“Kalau ini kan dari pemerintah. Kalau yang dulu, takut, kayak diculik gitu. Pernah ada anak yang dibawa kabur,” ujar I Gusti Ayu Serly.

Keberadaan angkutan Trans Serasi bagi para supir sangatlah menolong. Penghasilan mereka setelah menjadi supir Trans Serasi yang mengantar jemput anak sekolah, makin tetap dan bertambah daripada sebelumnya, ketika menyupiri angkuta umum. Waktu menyupiri angkutan umum, pendapatan mereka tidak menentu. “Kalau lagi banyak rejeki, ya banyak. Kalau ndak, ya cukup membeli bensin aja,” ujar Pak Komang. “Kadang enggap dapat uang. Kalau beli bensin, jadi minus,” tambah Pak Komang. Sejak di Trans Serasi, penghasilan para supir memang lebih tetap. “Kita yakin kalau ke sini, pasti dapat uang. Penghasilan saya Rp. 70.000 per hari, bersih saya dapat dari Trans Serasi untuk mengantar jemput anak sekolah. Hanya waktunya memang terikat. Pagi jam 6.00, siang jam 12.00, sore jam 17.00,” jelas Pak Made yang sudah menjadi supir sejak tahun 2002.

“Saya senang sekali sama Bu Eka, pendukungnya-lah. Sangat terima kasih untuk Bupati, mudah-mudahan terus ada gebrakan begini untuk rakyat kecil. Ada uang, rakyat yang merasakan,” kata Pak Made Sedanau, yang menjadi supir sejak 1990-an.

Selain masalah penghasilan, para supir tersebut merasa senang dengan adanya program Koperasi Trans Serasi. Mereka bisa mendapatkan dana tanpa jaminan. Jaminannya hanya Trans Serasi. Bunga dikenakan, tetapi sangat kecil. Program Trans Serasi ini menolong para supir dan rakyat kecil.





BAGIAN KETIGA

PEMBELAJARAN DARI

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

"We treat our people like royalty. If you honor and serve the people who work for you, they will honor and serve you."--Mary Kay Ash

"Surround yourself with a trusted and loyal team. It makes all the difference."--Alison Pincus

"For me, a better democracy is a democracy where women do not only have the right to vote and to elect but to be elected."--Michelle Bachelet, head of UN Women, former president and defense minister of Chile.

"It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it."--Aung San Suu Kyi, Burmese pro-democracy leader

Dari perjalanan pengalaman perempuan pemimpin yang terekam di dokumentasi ini terungkap hal-hal yang penting untuk kita refleksikan bersama mengenai praktik kepemimpinan mereka di komunitas sebagai pembelajaran yang menarik.

Proses Menjadi Pemimpin

Dalam era demokrasi pasar bebas saat ini, kepentingan individual tidak terlepas dari kepentingan pasar. Pasar bebas demikian mencengkram menyetir arah dan isi kesadaran individual. Orang tidak lagi sepenuhnya merdeka dalam menentukan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan pribadi baik di ruang privat maupun publik. Kekuatan pasar bebas membelenggu kebebasan hakiki pribadi, sehingga otonomi dan otentisitas individu terganggu. Pasar bebas juga telah menciptakan mitos-mitos baru mengenai kekuasaan liberal yang bisa menggoyahkan landasan etis orang, kewarasan dan moralitas publik yang ada.

Ketika melihat titik-tolak alasan mengapa para perempuan pemimpin yang terdokumentasi pengalamannya di sini terjun ke dunia politik atau kekuasaan publik, tampak bahwa mereka memiliki mimpi atau visi atau idealisasi pribadi ingin mewujudkan kemajuan bagi kaum perempuan serta kesejajaran dengan laki-laki, dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam pandangan mereka, kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya sangat penting guna menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Dalam kaitan itu, juga diperlukan kesetaraan dalam hak dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat dan bangsa. Mewujudkan cita-cita itu bukanlah hal yang mudah. Sejak Kartini dan perempuan lainnya berjuang di sepanjang sejarah Indonesia, maka hambatannya sangat besar. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan pemimpin khususnya, dan gerakan perempuan Indonesia umumnya.

Kembali ke pengalaman perempuan pemimpin yang terekam dalam dokumentasi ini terlihat proses bagaimana mereka menjadi pemimpin dengan latar belakang yang berbeda-beda dan corak praktik kepemimpinan yang berlainan. Tidak sejak awal mereka memiliki impian menjadi anggota dewan ataupun menjadi bupati. Cita-cita itu ternyata tumbuh dalam perjalanan hidup mereka, akibat bersentuhan dengan dunia sehari-hari yang menunjukkan potret ketertinggalan, kemiskinan, dan ketimpangan perempuan di masyarakat. Sentuhan-sentuhan hidup sehari-hari itu jualah yang mendorong mereka hendak memperjuangkan nasib kaumnya supaya jauh lebih baik. Itulah pangkal musabab mengapa mereka mencoba masuk dan bertarung di dunia politik.

Modalitas-Modalitas Yang Mendukung

Menjadi pemimpin, berdasarkan pengalaman mereka, memerlukan persiapan dan kesiapan diri pribadi yang memadai dan matang. Ukuran yang memadai itu sendiri tentulah berbeda-beda menurut kapasitas mereka masing-masing. Mereka memerlukan modal sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Untuk mereka yang berlatar belakang aktivis masyarakat, gerakan buruh, gerakan perempuan, dan lainnya, maka modal sosialnya terbangun jauh-jauh hari sebelum terjun di dunia politik. Kedekatan sosial terbentuk karena implementasi kerja-kerja mereka di tingkat lapangan di masyarakat. Kerja-kerja yang bermanfaat atau berdampak positif akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kiprah mereka. Memang di antara mereka ada yang memiliki keluarga yang pengaruh sosialnya cukup besar karena kelas sosial yang baik, sehingga dukungan yang mereka peroleh merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap status keluarganya.

Modalitas sosial yang cukup sangat dibutuhkan dalam fase persiapan mereka menjadi pemimpin. Perlunya jaringan sosial dan dukungan masyarakat yang luas agar bersedia menerima

kehadiran mereka di kancah politik. Pengalaman mereka menunjukkan betapa tidak ada modal sosial yang dapat diraih secara instan. Mereka harus bekerja keras dan kerja cerdas untuk membangun relasi sosial yang solid. Mereka memeras keringat agar dapat memenangkan hati masyarakat ataupun konstituen di daerah-daerah pemilihan, bahkan berjuang terus mempertahankan apresiasi masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.

Selain modalitas tersebut, mereka juga perlu modalitas politik untuk terjun di dunia kekuasaan. Dokumentasi ini memperlihatkan bahwa persiapan mereka membangun jejaringan politik ataupun terlibat dengan partai politik, sangat menentukan. Dukungan sosial yang kuat harus ditopang dengan legitimasi partai politik terkait. Kebanyakan mereka awalnya ditawari masuk ke partai politik menjadi anggota partai, kader, ataupun calon anggota legislatif, dalam rangka pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen. Ketertarikan mereka bergabung di partai politik tentu latar belakangnya sangat beragam. Ada yang tertarik dengan visi dan misi partai politik terkait, karena cocok dengan pandangan pribadi mereka mengenai pemajuan perempuan, sehingga dipandang mampu mewakili perjuangan mereka. Agustin Poliana, Irma Suryani, dan narasumber lainnya boleh dikatakan mengalami proses pendidikan politik yang panjang dan berliku-liku, dengan melibatkan diri dan belajar di partai politik maupun birokrasi pemerintahan yang ada. Mereka tak ingin melepaskan kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk bergulat meraih keberhasilan di arena kekuasaan yang tersedia.

Mereka yang terpilih menjadi perempuan pemimpin membuktikan bahwa modal politik perlu mendapat perhatian yang serius, selain modal sosial. Oleh karena, di alam demokrasi, partai politik adalah salah satu pilar utama menuju kekuasaan. Partai politik menjadi kendaraan kekuasaan yang legitim dan legal. Meskipun demikian, di tengah keterbukaan iklim politik sekarang, terutama dengan UU Pilkada yang baru, maka jalur perseorang bisa menjadi alternatif mencapai kekuasaan politik. Dengan berlakunya

jalur tersebut di dalam Pilkada kini, meskipun dengan persyaratan yang cukup berat, maka modal sosial dan modal politik menjadi sumberdaya yang harus sama-sama serius dipersiapkan oleh kalangan perempuan yang hendak maju menjadi pemimpin.

Semua narasumber dalam dokumentasi ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki latar belakang berorganisasi yang cukup panjang. Ada yang sejak SD hingga perguruan tinggi aktif berorganisasi. Terlepas dari berbagai alasan mengapa mereka suka berorganisasi, tetapi pengalaman tersebut mereka sadari atau tidak, telah berkontribusi dalam pembentukan karakter mereka. Dimulai dari organisasi sosial ataupun profesional, kemudian mereka terjun ke organisasi politik. Dengan pengalaman itu akan memudahkan mereka maju menjadi anggota dewan atau bupati di daerah masing-masing.

Sumberdaya lainnya yang juga harus mereka persiapkan ialah modal ekonomi. Dalam realitasnya, mereka memerlukan biaya-biaya politik untuk berkampanye, sosialisasi, rapat-rapat, dan sebagainya. Besarnya biaya yang harus mereka keluarkan kadang-kadang menyurutkan langkah mereka maju ke arena Pileg ataupun Pilkada yang ada. Mereka melakukan strategi tertentu untuk mengatasi persoalan minimnya ketersediaan dana yang dimiliki. Masyarakat yang mereka dampingi selama ini, keluarga yang mendukung, teman-teman yang segagasan, dan pihak lainnya, berperan dalam penyediaan dana politik. Dan tak selalu dukungan dana tersebut bentuknya uang tunai, tetapi ada yang berbentuk alat-alat atau sarana kampanye, penyediaan fasilitas-fasilitas tempat dan lainnya, sebagai ekspresi keterlibatan publik terhadap perjuangan mereka.

Memang dunia politik bagi kaum perempuan di Indonesia bukanlah suatu yang baru karena sudah berkiprah sejak 1928, namun kebanyakan perempuan masih memandang awam hal tersebut. Itu terjadi karena berbagai hal, misalnya tatanan budaya masyarakat yang kurang mengakomodir, tafsir agama yang picik, dan hukum pasar yang menindas, menyebabkan mayoritas

perempuan enggan terlibat dalam politik. Belum lagi ada pameo di masyarakat, bahwa politik identik dengan 'kekuasaan' yang berbahaya, zolim, bahkan korup. Politik hanyalah milik laki-laki. Dalil Machiavelli mengenai politik ditafsirkan oleh kalangan awam secara semena-mena guna menunjukkan betapa jahatnya 'politik' itu. Kesadaran inilah yang selama ini tertanam dan banyak disalah-pahami orang. Sedikit banyak, ini turut mempengaruhi cara berpikir kalangan perempuan. Meskipun peluang perempuan untuk menggeluti politik cukup terbuka lebar, namun akses-akses ke arah itu masih sempit akibat konstruksi budaya yang ada.

Dari perjalanan perempuan pemimpin yang terekam ini terungkap, bahwa modalitas-modalitas yang ada tersebut belumlah lengkap untuk mendukung mereka menjadi pemimpin. Kesiapan diri pribadi yang matang dan mantap juga benar-benar dibutuhkan. Kesiapan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan berpolitik harus mereka pelajari hari demi hari agar mumpuni di bidangnya. Pemahaman atau pengetahuan mengenai fungsi-fungsi jabatan mereka kelak, baik sebagai anggota dewan maupun bupati, haruslah dikuasai. Walaupun partai politik pengusung mereka mungkin membekali mereka dengan pelatihan-pelatihan tertentu, namun itu saja masih kurang memadai. Mereka harus terus-menerus mencakapkan dan menerampilkan diri mereka dengan berbagai kemampuan yang relevan dengan bidang-bidang kerjanya.

Mengapa kesiapan diri pribadi itu penting bagi mereka, karena ada kebiasaan-kebiasaan tertentu di partai politik yang terkait dengan rapat-rapat usainya hingga dini hari. Rapat-rapat di parlemen juga tidak menutup kemungkinan berlangsung hingga pagi hari. Kunjungan-kunjungan lapangan yang lama menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Persepsi masyarakat selama ini masih memandang 'minor' perempuan yang meninggalkan keluarganya (khusus mereka yang sudah berumah tangga) dan pulang pagi. Pandangan minor ini pernah menimpa Sahat misalnya, ketika masyarakat melihatnya masih bujangan, sementara harus berbicara tentang perlindungan perempuan dan anak. Memang

masyarakat tidak selalu dalam posisi yang kritis dan adil dalam menghakimi mereka. Tetapi mereka bisa menyiasati situasi atau kondisi yang tidak relevan tersebut, dengan strategi yang simpati ketika berhadapan dengan pandangan minor. Kesiapan fisik, mental, emosi, dan sikap perilaku, menjadi landasan yang tak bisa diabaikan dalam kepemimpinan mereka. Semua itu mereka pelajari di dalam proses kepemimpinan dan meningkat kemajuannya seiring dengan berjalannya waktu.

Apabila mengacu pada lima jalur menuju kepemimpinan yang dikembangkan oleh Apfelbaum dan Hadley, yaitu: kharisma, pewarisan, pencapaian karya profesional, seleksi, dan penghargaan, maka terlihat bagaimana para narasumber di dalam dokumentasi ini, melalui jalur-jalur itu. Mereka menjadi anggota dewan maupun kepala daerah karena seleksi, penghargaan, dan pencapaian karya profesional mereka. Apalagi mereka yang petahana, tentu dukungan sosial dan politik mengalir sebagai efek praktik kepemimpinan di komunitas. Mereka yang menjadi bupati juga melalui seleksi, pencapaian karya profesional dan penghargaan, baik oleh partai politik pendukung maupun warga masyarakat.

Jalan menuju kepemimpinan tidak serta merta berjalan mulus tanpa hambatan. Hambatan itu datang dari diri sendiri (tidak percaya diri, tidak paham dunia politik, dsb.), keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas. Akan tetapi, dengan penuh semangat dan terus belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada, mereka mampu mengatasinya.

Dalam proses menjadi pemimpin ataupun kepemimpinan saat ini, mereka harus berkompetisi dengan kalangan laki-laki, baik dari internal partai politik yang sama ataupun dari partai politik lainnya di parlemen ataupun birokrasi yang ada. Kerap partai politik maupun birokrasi lebih mendahulukan kalangan laki-laki maju sebagai anggota dewan ataupun kepala daerah (bupati). Budaya patriarkhal yang masih kuat di masyarakat kita menentukan bangunan berpikir di internal partai politik juga.

Karena itu, pertarungan yang sengit mereka alami pula dalam proses kepemimpinannya.

Matriks 1: Modalitas yang Mendukung

No.	Nara-sumber	Sosial	Politik	Ekonomi	Bu-daya	Posisi Jabatan
1	Agustin Poliana	- Awalnya adalah ibu rumah tangga, kemudian bergabung dengan simpatisan Megawati (PROMEG). - Menggalang dukungan untuk kemenangan Megawati menjadi Ketua Umum PDI di KLB Bali. - Tetap dekat dengan masyarakat/konstituennya.	- Terlibat dalam aksi-aksi PDI pro-Megawati melawan pemerintahan Orde Baru. - Menjadi pengurus anak cabang PDIP tahun 1999 di Krembangan, Surabaya sekaligus mengikuti Pemilu menjadi anggota dewan di DPRD Kota Surabaya. - Selama empat periode (1999-2014) menjadi anggota dewan di DPRD Kota Surabaya.			- Ketua Bidang Anggaran DPRD Kota Surabaya. - Ketua Komisi D di DPRD Kota Surabaya.
2	Fitri Nora	- Terlibat di organisasi KPI, mendirikan organisasi PADUSI, menjadi Ketua P2TP2A di Pariaman, dan pengorganisasian massa dalam rangka otonomi kota Pariaman. - Keluarga mertuanya sebagai aktivis Aisyiah dan Muhammadiyah. - Orangtuanya birokrat di Pemda Pariaman.	- Bergabung dengan Partai Gerindra tahun 2009 dan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Pariaman. - Ketua PIRA, sayap perempuan Partai Gerindra di Pariaman.			Anggota Komisi III dan Badan Anggaran DPRD Kota Pariaman.

3	Irma Suryani Chaniago	• Menginisiasi lahirnya tim 9 menentang privatisasi Pelindo dan terlibat dalam mengorganisir pemogokan buruh Pelindo, tahun 1998. • Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak di Partai Nasdem. • Ketua Umum Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia.	• Ketua DPD DKI Partai Nasional Benteng Kedaulatan (PNBK). • Bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Menjadi Ketua Garda Wanita Malahayati; Ketua Garda Buruh; anggota DPP Partai Nasdem.			• DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, dll.
4	Miryam S Haryani	• Terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. • Aktif sebagai pengusaha. • Terlibat dalam aksi-aksi menurunkan Soeharto pada 1998 dengan menjadi Ketua Urusan Logistik.	• Wakil Sekjen Partai Bintang Reformasi (PBR), tahun 2000. • Tahun 2004 menjadi Sekjen Suara Perempuan Reformasi (organisasi sayap perempuan PBR). • Tahun 2007 masuk ke Partai Hanura dan dicalonkan menjadi anggota legislatif tahun 2009 dan menjadi anggota DPR RI. • Tahun 2014 kembali memenangkan Pileg menjadi anggota DPR RI. • Ketua Srikandi Hanura (sayap perempuan Partai Hanura).			• Pernah menjadi anggota Komisi II DPR RI, tahun 2009-2014. • Anggota Komisi V DPR RI, tahun 2014-2019.

5	Sahat Farida Berlian	• Terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. • Terlibat dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia. • Wakil Sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi (organisasi sayap pemuda PDI Perjuangan).	• Tahun 2013 direkrut pengurus anak cabang PDIP Cinere Depok menjadi calon anggota dewan 2014-2019 dan terpilih.			• Anggota Badan Musyawarah di DPRD Kota Depok. • Anggota Komisi D di DPRD Kota Depok.
6	Susiana S	• Terlibat dalam organisasi kemahasiswaan dan pemuda. • Terlibat dalam organisasi bayangkari. • Sekretaris Cabang di Koalisi Perempuan Indonesia.	• Tahun 2013 menjadi anggota Partai Hanura di Bengkulu Tengah. • Menjadi pengurus anak cabang Partai Hanura. • Menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu Tengah, tahun 2014.			• Anggota Komisi I. • Anggota Badan Legislasi dan Badan Anggaran
7	Nining S Saranani	• Sebagai wiraswatawan dan pengusaha salon sejak tahun 1990-an. • Ketua Tiara Kusuma (organisasi Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia) sejak 1997. • Wakil Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Kendari. • Wakil Ketua Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK), organisasi perancang busana (KARTINI), asesor untuk menilai salon-salon kecantikan di seluruh Indonesia.	• Tahun 2004 menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional. • Tahun 2009 menjadi caleg dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan. • Tahun 2014 menjadi anggota DPRD Kota Kendari dari Partai Gerindra.			• Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Kendari. • Sekretaris Komisi II.

8	Badingah	• Terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. • Aktif di 29 organisasi masyarakat di Gunung Kidul. • Keluarga pedagang di Gunung Kidul.	• Menjadi wakil bupati Gunung Kidul sejak 2010. • Menjadi bupati tahun 2015.			• Wakil bupati Gunung Kidul tahun 2010-2015. • Bupati Gunung Kidul tahun 2015-2020
9	Ni Putu Eka Wiryastuti	• Terlibat di ormas/ LSM dan sayap partai Srikandi Banteng Muda Indonesia. • Pembina Forum Kota Tabanan dan organisasi sosial Galang Hati (penanggulangan HIV/AIDS). • Terlibat dalam organisasi Keluarga Besar Marhaen dan Srikandi Demokrasi Indonesia tahun 2007.	• Anggota DPRD Tabanan dan Ketua Komisi IV selama 6 bulan			• Bupati Tabanan Bali tahun 2015

Aspek Kepemimpinan

Dalam kepemimpinan masa kini dituntut suasana keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik yang tinggi. Standar profesi semacam ini juga berlaku bagi kalangan perempuan pemimpin. Aspek keterbukaan mencerminkan kematangan pemimpin untuk menerima masukan-masukan dari warga masyarakat atau publik mengenai kepemimpinannya. Masukan-masukan tersebut berupa sumbang saran atau pemikiran maupun kritikan-kritikan tajam yang tidak selalu bersifat membangun, tetapi juga bisa menjatuhkan moralitas perjuangan. Dari pengalaman narasumber di dokumentasi ini terlihat bahwa mereka secara proaktif turun ke bawah atau lapangan, mendengarkan aspirasi warga masyarakat, bahkan blusukan dan sidak. Semua tindakan ini dimaksudkan untuk mencari dan menerima masukan-masukan dengan

mendengarkan langsung keluhan-keluhan perempuan dan rakyat umumnya sehingga mendapatkan data-data segar dari bawah. Birokrasi pemerintahan dan birokrasi parlemen bisa menghalangi mereka, perempuan pemimpin, untuk ikut simpati dan empati dengan warga masyarakat ataupun perempuan, dengan segudang persoalannya, apalagi mampu memberikan solusi-solusi yang jitu. Keterbukaan diri dalam kepemimpinan diperlukan memperkuat basis pengetahuan dan keterampilan si pemimpin itu sendiri. Dan setidaknya, para narasumber di sini mengemukakan, bahwa mereka pun membuka diri terhadap pandangan dan usulan-usulan warga masyarakat mengenai kepemimpinan mereka. Apakah mereka demokratis atau tidak demokratis.

Aspek lain dalam kepemimpinan moderen kini ialah transparansi dan akuntabilitas. Aspek ini tentu tidak terlepas dengan aspek keterbukaan. Transparansi dan akuntabilitas ini mencakup banyak hal, seperti visi-misi, program dan keuangan. Dalam proses menjadi pemimpin, kadangkala pemaparan visi-misi, program dan keuangan, tampak demikian indah dan muluk-muluk. Warga masyarakat dan kalangan perempuan dibuat terkagum-kagum dengan semua itu. Akan tetapi, di dalam praktik kepemimpinannya, ketika warga masyarakat ataupun kalangan perempuan menjadi lengah dan tidak kritis, pelan-pelan ‘janji-janji politik’ tersebut mulai disembunyikan, bahkan dengan sengaja. Kalangan pemimpin mulai mengatur strategi untuk menutup-nutupi visi-misi, program dan keuangannya. Dengan ingatan publik yang terkadang pendek, maka sang pemimpin mulai berlaku menyimpang dan korup. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, mereka mulai bertindak sewenang-wenang bahkan melampaui kepatutan publik. Padahal kepercayaan dan keprihatinan publik (*public trust and public concern*) harus menjadi modal dasar pemimpin untuk memimpin. Suara warga masyarakat adalah suara Tuhan (*vox populi vox Dei*). Maka bersikap dan bertindak transparan dan akuntabel adalah aspek kepemimpinan yang profesional.

Dalam dokumentasi ini, para narasumber berusaha bersikap dan bertindak transparan dan akuntabel dalam kepemimpinannya. Mereka menyampaikan visi-misi, program dan keuangannya ke publik, tak hanya ketika masa kampanye, tetapi juga dalam praktik-praktik politik sehari-hari mereka. Mereka menginformasikan apa yang mereka lakukan, berapa anggarannya, dan sejauh mana capaiannya. Sarana informasi tersebut sangat luas, misalnya melalui situs milik pribadi, *facebook*, media massa, ataupun media sosial lainnya. Mereka melibatkan banyak pihak untuk bekerjasama dalam rangka menelisik dan mengawal program kerja ataupun kebijakan-kebijakan maupun anggaran-anggarannya. Prinsipnya, semakin banyak kepala yang memikirkan dan mencari solusinya, maka makin baik. Itu peran perempuan pemimpin untuk memadukan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam rangka penyelesaian masalah.

Akan tetapi, masalah transparansi dan akuntabilitas di kalangan perempuan pemimpin masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena, aspek ini memang berpangkal dari kejujuran terhadap diri sendiri. Kalau tidak jujur terhadap diri sendiri, bagaimanakah kita bisa jujur terhadap orang lain yang kita pimpin? Para nara sumber di sini menunjukkan bahwa mereka berupaya untuk 'menjadi diri sendiri'. Mereka belajar untuk mempertanggungjawabkan ke publik atas kerja-kerja kepemimpinan mereka. Tentu ini tidaklah mudah karena tantangannya bisa datang dari banyak arah, misalnya dari partai pengusung, keluarga, komunitas, dan warga masyarakat. Bisa saja prakarsa yang baik tersebut disalah-pahami oleh publik, sehingga memunculkan kontroversi-kontroversi yang tidak produktif.

Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan program kerja adalah penting. Untuk menjadikan hal tersebut bermakna, maka forum-forum kritis warga masyarakat di konstituen (kalangan dewan) maupun rakyat (kepala daerah) harus diciptakan untuk mengawasi jalannya program dan menilai dampaknya terhadap perubahan masyarakat. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi

informasi sekarang, forum-forum tersebut bisa diciptakan di ruang maya. Pendek kata, semakin banyak pihak yang terlibat dalam mempersoalkan transparansi dan akuntabilitas visi-misi, program kerja dan keuangan perempuan pemimpin, maka makin positif aspek kepemimpinan mereka.

Selain ketiga aspek kepemimpinan tersebut, masih diperlukan aspek kesadaran keadilan dan kesetaraan gender (*gender justice and equality*). Artinya, pemahaman yang memadai mengenai hal itu harus ada sehingga ketika merancang dan melaksanakan program kerja dan anggarannya, perempuan pemimpin tidak menjadi 'bias gender'. Tak bisa disalahkan, bahwa mereka yang dikader partai politik yang narsis-masokhis misalnya, melahirkan cara berpikir dan bertindak yang bisa meminggirkan dan mendiskriminasi kalangan perempuan. Pengalaman ini dialami perempuan pemimpin dalam dokumentasi ini. Mereka yang berupaya mengajukan kebijakan-kebijakan maupun program kerja yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan justru mendapat hambatan dari kalangan internal partai mereka ataupun dari kalangan birokrat di sekelilingnya. Meskipun pemerintah sudah melakukan program kerja nasional 'pengarusutamaan gender' untuk kalangan pejabat negara (sipil maupun militer), akan tetapi tidak menjamin bahwa cara berpikir dan bertindakya berubah. Tak jarang terjadi resistensi dari kalangan pejabat pemerintah maupun kalangan anggota dewan sendiri. Untuk isu yang satu ini, tidak bisa ditangani oleh perempuan pemimpin sendirian, karena memerlukan perubahan sistem sosial dan kenegaraan.

Aspek lain yang bisa dipelajari dari pembelajaran ini ialah komunikasi interaktif, kreativitas dan inovasi perempuan pemimpin. Kepemimpinan moderen kini menghendaki pola komunikasi yang interaktif, tidak monologis, melainkan dialogis. Perjumpaan pemikiran dan tatap muka, dan berbicara langsung, menjadi komponen penting dalam strategi komunikasi saat ini. Pengalaman para narasumber menunjukkan bahwa mereka mencoba bertatap muka, turun lapangan, berdialog, guna menyerap aspirasi dan

mencari inspirasi. Mereka menjaga komunikasi yang baik dengan konstituen maupun warga masyarakat mereka. Membalas sms, membuka rumah 24 jam, menerima telpon, bahkan menerima protes warga, merupakan bentuk-bentuk komunikasi mereka yang efektif. Banyak hal yang tersumbat dapat dibereskan ketika dialog antara perempuan pemimpin dengan warga masyarakat ataupun warga perempuan dilakukan. Tak jarang mereka ketika reses datang ke daerah-daerah pemilihannya untuk bertukar pikiran dan menyerap aspirasi, kemudian mengusulkannya di parlemen. Di kalangan kepala daerah, mereka biasanya mencek kerja-kerja SKPD dan memastikan apakah program kerja dilaksanakan atau tidak. Komunikasi interaktif tersebut bersifat multi dimensi, karena setidaknya mampu mengungkapkan hal-hal tersembunyi dan gelap menjadi terang benderang dan terpanggungan. Tanpa komunikasi yang interaktif, mustahil perempuan pemimpin bisa mengikuti dinamika pihak yang mereka pimpin. Setidaknya, hal-hal tersebut dikerjakan pula oleh para narasumber.

Rasanya hampir tidak terelakkan bahwa kepemimpinan saat ini menuntut kerja-kerja kreatif dan inovatif. Perempuan pemimpin sebagai anggota dewan maupun kepala daerah sekarang banyak diharapkan publik untuk membuat terobosan-terobosan dalam kebijakan dan program kerja. Dengan daya kritis publik yang kian meningkat, perempuan pemimpin diminta untuk menelurkan produk-produk kebijakan dan layanan-layanan publik yang prima berkualitas dan handal. Warga masyarakat tak ingin solusi-solusi yang setengah hati dan tidak tuntas. Mereka menginginkan segala sesuatu paripurna. Inilah yang menyebabkan mengapa kerja-kerja kreatif dan inovatif dibutuhkan di kalangan perempuan pemimpin. Pengalaman yang ada memperlihatkan, bahwa dengan keterbatasan dana atau anggaran yang ada, para narasumber di sini, masih bisa berbuat lebih baik. Tak tersedia infrastruktur gedung, jalan, dan lainnya, harus diselesaikan persoalannya. Keterbatasan anggaran masih bisa dicarikan sumber-sumber alternatif yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Jalan buntu selalu terpampang di hadapan pemimpin yang pesimis, tetapi terobosan

selalu dilakukan oleh pemimpin yang optimis. Terbukti mereka tidak berputus asa ketika sarana tidak tersedia, mereka masih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menjalankan program kerjanya. Antara program kerja dan anggaran memang seperti 'dua sisi' dari satu mata uang, tidak bisa dipisah-pisahkan, namun terpaku pada salah satunya saja tidaklah memicu kreativitas dan inovasi. Mutu produk dan layanan publik tergantung sejauh mana kreativitas dan inovasi dikembangkan oleh perempuan pemimpin. Maka itu, belajar untuk menjadi pemimpin yang otentik sekaligus belajar menjadi kreatif dan inovatif.

Aspek terakhir kepemimpinan yang tidak bisa diabaikan saat ini ialah kode etik kepemimpinan. Belakangan banyak dijumpai bahwa pemimpin atau pejabat publik tidak peduli dengan moralitas publik dan etika jabatannya (*public morality, trust and profession*). Pelanggaran norma hukum dan norma moral oleh pejabat menjadi iklan publik yang kita santap setiap hari melalui media massa cetak maupun elektronik. Perilaku moral dan sosial pejabat publik telah melampaui batas-batas kewarasan dan kewajaran yang memuaskan warga masyarakat. Mereka memelintir norma hukum untuk membela pelanggaran norma moral yang mereka kerjakan. Orang yang korup dan masuk penjara masih berhak menjadi kepala daerah atau menjadi anggota dewan. Memang secara norma hukum diperbolehkan, namun moral publik menegaskan bahwa mereka tidak berhak untuk menjadi pejabat publik atau pemimpin.

Dan sejauh ini, para narasumber dalam dokumentasi ini memperlihatkan, bahwa mereka bekerja di bawah kepantasan moral publik dan legitimasi publik. Kode etik sebagai kepala daerah dan anggota dewan tetap mereka jalankan, meskipun tantangan-tantangan datang dari kalangan dewan, birokrasi, maupun warga masyarakat atau konstituennya. Dengan tetap memegang kode etik itulah mereka bisa bekerja kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan, pengawasa, anggaran, dan layanan-layanan publik yang berkualitas, prima, berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gardiner, Rita, *Gender, Authenticity and Leadership: Thinking with Arendt*, New York: Palgrave McMillan, 2015.
- Arguden, Yilmaz, *Keys to Governance: Strategic Leadership for Quality of Life*, New York: Palgrave McMillan, 2011.
- Bekkers, Victor; Jurian Edelenbos and Bram Steinjn (eds.), *Innovation in the Public Sector: Linking Capacity and Leadership*, New York: Palgrave McMillan Ltd., 2011.
- Bolden, Richard; Beverley Hawkins, Jonathan Gosling, Scott Taylor, *Exploring Leadership: Individual, Organizational, and Societal Perspective*, New York: Oxford University Press Inc., 2011.
- Blackburn, Susan, *Women and the State in Modern Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- Campbell, Scott and Ellen Samiec, *5D Leadership: Key Dimensions for Leading in the Real World*, USA: Black Publishing, 2005.
- Gill, Stephen (ed.), *Global Crises and the Crisis of Global Leadership*, New York: Cambridge University Press, 2012.
- Goyal, Omita (ed.), *Interrogating Women's: Leadership and Empowerment*, India: SAGE Publications India Pvt Ltd., 2015.
- Grint, Keith, *Leadership: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, 2010.
- H. Werhane, Patricia and Mollie Painter-Morland (eds.), *Leadership, Gender, and Organization*, (New York: Springer, 2011).
- Helms, Ludger (ed.), *Comparative Political Leadership*, New York: Palgrave McMillan Ltd., 2012.
- K. Mishra, Aneil and Karen E. Mishra (eds.), *Becoming A Trustworthy Leader: Psychology and Practice*, (New York: Routledge, 2013).
- Kalyanamitra, *It's a Politics: Rekam Jejak Pengalaman Perempuan dalam Pemilu 2014*, Jakarta, 2015.
- Lau Chin, Jean; Bernice Lott, Joy K. Rice, and Janis Sanchez-Hucles (eds.), *Women and Leadership: Transforming Visions and Diverse Voices*, New York: Palgrave McMillan, 2009.

- O. Solheim, Bruce, *On Top of The World: Women's Political Leadership in Scandinavia and Beyond*, Westport, Connecticut.: Greenwood Press, 2000.
- Pardey, David, *Introducing Leadership*, UK: Elsevier Ltd., 2007.
- Price, Terry, *Leadership Ethics: An Introduction*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- R. Goethals, George; Georgia J. Sorenson, and James MacGregor Burns (eds.), *Encyclopedia of Leadership*, vol.1, USA: Sage Publication, Inc., 2004.
- Rigg, Clare and Sue Richards (eds.), *Action Learning, Leadership and Organizational Development in Public Services*, New York: Routledge, 2006.
- Rickards, Tudor and Murray Clark, *Dilemmas of Leadership*, New York: Routledge, 2006.
- Sbaity Kassem, Fatima, *Party Politics, Religion, and Women's Leadership: Lebanon in Comparative Perspective*, New York: Palgrave MacMillan Ltd., 2013.
- Saptari, Ratna, Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Stead, Valerie and Carole Elliot, *Women's Leadership*, New York: Palgrave MacMillan, 2009.
- Williams, Christopher, *Leadership Accountability in a Globalizing World*, New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Wren, J. Thomas, *Inventing Leadership: The Challenge of Democracy*, USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2007.

"...sebagai anggota legislatif perempuan, dia tak ingin dipandang sebelah mata oleh anggota legislatif laki-laki. Sehingga jangan hanya datang, duduk dan diam menunjukkan kemolekan, namun tidak memperlihatkan keterampilan dan kemampuan. Ketika perempuan duduk di kekuasaan politik atau lembaga legislatif, jangan sebagai hiasan politik untuk memenuhi afirmasi 30 persen. Perempuan dalam politik harus mewarnai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan-keputusan."

(Agustin Poliana, anggota DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur)

"...senantiasa banyak belajar dan berbagi pengalaman adalah penting. Kemampuan hanya akan dimiliki, bila perempuan mau terus belajar. Jangan merasa pintar dan tidak mau belajar dari yang senior."

(Miryam S. Haryani, anggota DPR RI, Jakarta)

"...bila bukan perempuan yang memperjuangkan derajatnya, maka tidak akan terjadi perubahan. Sekeras apapun seseorang berjuang untuk perempuan, jika perempuannya tidak mau maju, maka tidak akan ada perubahan. Perempuan perlu saling berbagi, menolong, dan mendukung satu sama lain."

(Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan Bali)

Organisasi ini didirikan pada 28 Maret 1985 dengan tujuan menjadi pusat komunikasi dan informasi perempuan dalam rangka membangun gerakan untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sekaligus melakukan pendidikan feminis, penyediaan perpustakaan perempuan, advokasi kebijakan, dan pendampingan kelompok-kelompok perempuan marginal baik di perkotaan maupun di pedesaan.

ISBN 978-602-97900-5-4

